



BAZNAS BAZIS
Provinsi DKI Jakarta



SIMPUL KOLABORASI KEBAIKAN

**Transformasi Program Pendistribusian & Pendayagunaan
BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta**



BAZNAS BAZIS
Provinsi DKI Jakarta



BAZNAS BAZIS
Provinsi DKI Jakarta

SIMPUL KOLABORASI KEBAIKAN

Transformasi Program Pendistribusian
& Pendayagunaan
BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta

SIMPUL KOLABORASI KEBAIKAN

Transformasi Program Pendistribusian dan
Pendayagunaan
BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta

© 2022

x + 206 hlm: 15,5 x 23 cm

Saat Suharto Amjad
Rini Suprihartanti

Co-Writer: Nana Mintrati

Editor: Amirul Hasan

Lay Out: Aamaliyah Herdiati

Cover: Romadhon Hanafi

Cetakan I, Oktober 2022

BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta

Graha Mental Spiritual Lantai 5,

Jl. Awaludin II, Tanah Abang, RT.2/RW.17, Kb. Melati,

Tanah Abang, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu kota Jakarta

10130

(021) 3901367

www.baznasbazisdki.id

Izinkan kami menyampaikan alfu alfi mabruk atas terbitnya buku “Simpul Kolaborasi Kebaikan”. Buku yang merupakan ikhtiar dari BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta dan menjadi bukti konkret dari kerja sama yang produktif antara BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Provinsi dalam upaya mengentaskan kemiskinan di wilayah DKI Jakarta, termasuk wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Melalui program-program unggulan seperti “Semua Bisa Makan”, “Pesantren Tahfidz Difabel”, “Difabis”, “Bedah Rumah”, dan “Bedah Kawasan”, BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta telah berhasil menjangkau dan membantu masyarakat yang membutuhkan termasuk masyarakat di wilayah Jakarta Selatan.

Kami berharap bahwa buku “Simpul Kolaborasi Kebaikan” dapat menjadi kolaborasi kita semua dan inspirasi bagi banyak pihak dalam membangun kolaborasi yang efektif dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan memberikan kebaikan bagi kemaslahatan umat.

Munjirin, S.Sos, M.Si.
Wali Kota Jakarta Selatan

“Congratz! It’s a well written and eye opener book. Buku ini menceritakan kisah perjuangan BAZNAS (basis) DKI Jakarta yang terlibat dalam banyak program besar menjamah mereka yang kurang beruntung dalam kehidupan. Dikemas dalam gaya bahasa yang renyah dan mengalir membawa pembaca hanyut seakan hadir dalam proses transformasi dan kolaborasi yang dilakukan. Membawa pesan yang sangat jelas untuk terus bergerak, tidak pernah menyerah, dan jeli melihat peluang. Very inspiring!”

Ir. Adiwarman Azwar Karim, SE., MBA., MAEP.

Entah. Campur baur pikiran ketika dikabari BAZNAS (BAZIS) DKI, turunkan buku membahas program pemberdayaan. Jelas ini perlu diapresiasi. Sebuah keberanian urun rembug atasi kemiskinan. Setidaknya ada dua alasan: Ke-1 kemiskinan di Jakarta besar dan akut. Dan ke-2 gebrakan ini mengubah tradisi BAZ, BAZIS, BAZNAS.

Ada yang mesti diperhatikan sungguh-sungguh. Kemiskinan kita termasuk akibat kebijakan. Maka kemiskinan itu harus dilawan dengan kebijakan pula. Kegiatan pemrberdayaan sifatnya tetap terbelenggu sebagai kegiatan sosial. Maka tegasnya: Kebijakan harus dilawan dengan kebijakan. Bukan dengan kegiatan sosial.

Dengan menyadari rumus tersebut, diharap para pegiat kemanusiaan bisa *positioning*-kan diri. Tidak menjadi *ge-er* atau menjadi frustrasi. Bagaimanapun, kehadiran buku ini menjadi bukti. Bahwa ada satu oase penting di Jakarta bagi yang kehausan. Oase itu bernama BAZNAS (BAZIS) DKI. Selamat menyimak.

Erie Sudewo

Tokoh Perubahan Republika tahun 2017

Tidak gampang mengelola transformasi lembaga zakat milik umat ini utk tetap melayani umat tapi juga berdiri sebagai wakil pemerintah. Tapi BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta mampu mementaskannya dengan baik. BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta menjadi satu-satunya lembaga zakat pemerintah yg mampu melihat peluang dan membangun kolaborasi yang kuat dengan segenap anak bangsa. BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta memainkan peran sebagai inisiator kuat perekat kebaikan, implementator kolaborasi, dan produsen gagasan program bermanfaat gerakan zakat bersama lembaga-lembaga zakat lain di DKI.

Tentu saja ucapan terima kasih yang besar atas dedikasi para pejuang zakat di BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih telah mewakili banyak masyarakat memerankan negara yang mencintai warganya dan menjaga warganya tetap bahagia.

Bambang Suherman

Ketua FOZ Pusat

Kalau ibarat film, buku ini adalah *Behind The Scene* dari Program-program pendayagunaan Baznas (Bazis) DKI Jakarta. Dimana kita bisa mengetahui di balik kreativitas dan inovasi program, serta di balik keberhasilan dan manfaat nyata dari program pendayagunaan zakat yang dilakukan BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta, kita akan mendapatkan penjelasan bagaimana proses pengemasan dan implementasi dari program-program tersebut. Dengan demikian, kita bisa mempelajari dan akhirnya kita bisa mereplikasinya. Buku seperti ini memang sangat kita perlukan saat ini.

Ahmad Juwaini

Direktur Keuangan Sosial Syariah, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

Buku ini tidak saja menginspirasi gerakan filantropi khususnya filantropi Islam dalam membuat berbagai program kebajikan, namun akan memberi tenaga kepada para pemikir ummat untuk lebih serius dalam menggali kekuatan ummat untuk memberi kontribusi positif kepada berbagai upaya menyelesaikan permasalahan ummat.

BAZNAS (BAZIS) DKI yang juga memiliki *mile stone* dan sejarah yang panjang dalam gerakan zakat Indonesia. Saya meyakini ke depan BAZNAS (BAZIS) DKI akan menjadi model bagi pengelola zakat di berbagai provinsi lainnya.

H. M. Arifin Purwakananta

Deputi BAZNAS RI

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta dapat menghadirkan buku “Simpul Kolaborasi Kebaikan: Transformasi Program Pendistribusian & Pendayagunaan”. Buku ini hadir sebagai bentuk komitmen kami dalam mengoptimalkan pemanfaatan dana Zakat, Infak, dan Sedekah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan di wilayah DKI Jakarta.

Buku ini menggambarkan perjalanan transformasi BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta dalam mengembangkan program pendistribusian dan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada kolaborasi dengan berbagai pihak, serta mengembangkan inovasi program yang lebih berdaya guna dan memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat. Buku ini juga membahas potensi dan masalah yang ada di Jakarta, serta program-program pemerintah dan LSM yang ada di Jakarta dalam menangani masalah-masalah tersebut.

Saya berharap buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, terutama bagi para muzaki, lembaga zakat, dan pihak-pihak yang terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat di wilayah DKI Jakarta. Saya juga memberikan apresiasi kepada penulis buku ini yaitu Bapak Ir. Saat Suharto Amdjad dan Ibu Rini Suprihartanti SE, MSi, sebagai penulis buku ini serta berterima

kasih kepada seluruh staf BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta yang telah berkontribusi dalam pembuatan buku ini.

Akhir kata, saya berdoa semoga buku ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk terus berkolaborasi dan berinovasi dalam mengembangkan program pemberdayaan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berdampak positif bagi kehidupan masyarakat terutama di Provinsi DKI Jakarta.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

DR. AKHMAD H. ABUBAKAR, M.M.

Ketua BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	vii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
BAB II	
JAKARTA; POTENSI DAN MASALAHNYA.....	11
BAB III	
TRANSFORMASI BAZNAS (BAZIS) PROVINSI DKI	
JAKARTA	33
BAB IV	
SIMPUL KOLABORASI KEBAIKAN	61
BAB V	
TRANSFORMASI PROGRAM: INOVASI	
BERDAYAKAN UMAT	69
BAB VI	
PENUTUP	203



BAB I

PENDAHULUAN

Februari 2019 adalah tonggak sejarah baru bagi Badan Amil Zakat Infak Shadaqoh (BAZIS) DKI Jakarta. Setelah melewati dinamika yang cukup panjang, diskusi, dan tarik ulur, akhirnya organisasi pengelola zakat tertua di DKI Jakarta ini bertransformasi menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tingkat provinsi. Perubahan ini sesuai dengan aturan perundang-undangan terkait zakat, yaitu UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang merupakan amandemen UU N. 38 Tahun 1999. Aturan ini mengamanatkan seluruh BAZDA (termasuk BAZIS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus melakukan penyesuaian paling lambat 5 (lima) tahun setelah UU diterbitkan.

Di sisi lain, ada keinginan para pemangku kepentingan di DKI Jakarta untuk dapat mempertahankan nama dan konsep BAZIS seperti yang sudah dijalankan. Kajian dan diskusi para pemangku kepentingan pun dilakukan secara intens untuk mencari titik temu masalah ini. Namun, pada akhirnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan melakukan penyesuaian BAZIS menjadi BAZNAS setelah terjadi kesepakatan antara Pemerintah Provinsi DKI yang diwakili oleh Wakil Gubernur saat itu, Sandiaga S. Uno dengan Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. Bambang Sudibyo. Di antara kesepakatan yang dicapai adalah nama BAZIS tetap dapat melekat mengiringi nama BAZNAS.

Selanjutnya, terjadilah proses transisi organisasi dari BAZIS DKI menuju BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta, yang dimulai dengan penyelesaian pelaksanaan tugas dan fungsi BAZIS DKI. Pemerintah Provinsi DKI pun membentuk panitia seleksi

calon pimpinan BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta. Untuk memudahkan penyebutan, untuk berikutnya kami hanya akan menuliskan BAZNAS (BAZIS).

Setelah proses peralihan selesai secara administrative, Gubernur DKI, Anies R. Baswedan mengeluarkan Keputusan Gubernur 694 Tahun 2019 tentang Pimpinan BAZNAS (BAZIS) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2019-2024. Mereka adalah (alm) Dr. K.H. A. Lutfi Fathullah, MA, Dr. K.H. Nur Alam Bakhtir, Saat Suharto, Rini Suprihartanti, SE, M.Si, dan Drs. Achmad H. Abubakar, MM. Kesemuanya dilantik pada tanggal 29 April 2019.

Sejak saat itu, BAZNAS (BAZIS) memulai fase baru. Berbagai perubahan pun dilakukan di berbagai lini, mulai dari tata organisasi kelembagaan, visi dan misi, budaya kerja hingga strategi dan inovasi. Dengan berbagai perubahan dan pembenahan ini, potensi dan sumber daya BAZNAS (BAZIS) yang dimiliki bisa semakin optimal dalam membantu dan membawa manfaat bagi masyarakat.

A. MENGAWAL PERUBAHAN

Mengawal perubahan yang *smooth* di lembaga yang sudah sangat besar dan mapan ini tentu saja tidak mudah. Beragam tantangan yang harus dihadapi para nakhoda BAZNAS (BAZIS). Mulai dari budaya kerja yang birokratis, kesenjangan usia pegawai, hingga semangat inovasi yang minim. Sebagaimana diketahui, selama ini BAZIS DKI berada di bawah organisasi tata laksana pemerintahan, yang notabene sangat kental birokrasinya. Sedikit

sekali pegawai berusia muda yang ditempatkan di sini. Pun dalam hal penghimpunan, setiap bulan dana zakat masuk dari *payroll* pegawai negeri sipil (PNS) DKI secara otomatis. Jika boleh kita sebut, selama ini BAZIS DKI berada dalam zona yang sangat nyaman.

Namun demikian, penting untuk dicatat di sini, proses perubahan yang dilakukan bukan berarti menegasikan karya dan kerja BAZIS DKI selama ini. Apa yang sudah dilakukan oleh BAZIS DKI selama ini tentu saja telah membawa banyak manfaat dan maslahat bagi masyarakat dan umat, di DKI Jakarta pada khususnya. Namun, dengan potensi dan sumber daya yang dimilikinya, kami meyakini, kemaslahatan dan kebermanfaatannya yang bisa diberikan dapat lebih besar dan luas lagi.

Pepatah berbahasa Arab yang cukup akrab di kalangan santri Indonesia, “*Al muhafadzatu alal qadimis shalih, wal akhdzu alal jadidil aslah,*” ini sangat tepat untuk menggambarkan situasi perubahan di BAZNAS (BAZIS) saat itu. Pepatah ini memiliki makna “Menjaga tradisi lama yang sudah baik, dan mengadopsi tradisi baru yang lebih baik,” inilah semangat yang mewakili kami para pimpinan BAZNAS (BAZIS) ke depan.

Salah satu perubahan yang terlihat mencolok dalam periode BAZNAS (BAZIS) saat ini adalah program-program pendistribusian dan pendayagunaan. Selama ini, program-program penyaluran BAZIS DKI—sebagaimana lembaga filantropi pada awal-awal berdirinya—sangat karitatif. Mulai dari santunan yatim, bantuan uang sekolah, maupun biaya pengobatan.

Saat ini, layanan-layanan karitatif itu masih ada dan tidak dihilangkan. Hanya saja, kami memperkaya dan memodifikasi dengan berbagai program yang memiliki dampak lebih dibandingkan layanan *charity* biasa. Sebagai contoh, dalam program Bagi i-Piring yang kini berganti nama menjadi Semua Bisa Makan (SBM). Sejatinya, SBM adalah program karitas bagi kelompok miskin dan rentan di ibu kota. Alih-alih kita membagikan uang tunai atau makanan langsung kepada mustahik, yang BAZNAS (BAZIS) lakukan adalah menggandeng warung makan untuk menyalurkan bantuan ini, dengan kartu dan voucher sebagai alat tukarnya. Dengan demikian, warga miskin yang mendapat bantuan tetap terjaga muruahnya, karena ketika datang ke warung mereka “membeli” bukan meminta. Ada proses transaksi di situ. Di sisi lain, warung makan juga mendapat pelanggan baru yang tentu saja berdampak pada pendapatan dan peningkatan omset mereka.

Demikian pula dalam program bantuan kepada penyandang disabilitas. Jika selama ini, biasanya mereka mendapatkan santunan langsung, saat ini BAZNAS (BAZIS) memberdayakan mereka melalui program Difabis (Difabel Bisa). Mereka diberikan pelatihan keterampilan, dilibatkan dalam kegiatan usaha bersama, dan didampingi menjalani usaha, sehingga ke depannya mereka bisa mandiri dan berkarya. Bukan sekedar bantuan dan pemberdayaan, program ini adalah upaya “advokasi” bagaimana kita memberikan kesempatan dan memperlakukan para penyandang disabilitas secara bermartabat.

Sedangkan dalam program kebencanaan, BAZNAS (BAZIS) secara aktif melibatkan masjid dan mushola sebagai jejaring strategis. Mereka menjadi ujung tombak dalam setiap respon dan layanan yang terkait dengan bencana. Masjid memiliki peranan yang sangat vital, karena tempat itu adalah salah satu titik berkumpulnya dan berorganisasinya masyarakat. Jika selama ini, masjid hanya menerima bantuan sarana ibadah, saat ini mereka mulai dilibatkan dalam program-program yang lebih *sustain*. Dengan demikian, bukan lagi sekedar objek, mereka menjadi subjek.

Ada semangat kolaborasi yang sangat kental dalam setiap program yang digulirkan BAZNAS (BAZIS). Kita semua menyadari, untuk menghadapi dan mengatasi masalah-masalah yang sangat kompleks di sekitar kita, tidak bisa bekerja sendirian. Karena ada begitu banyak orang yang memiliki semangat kebaikan. Banyak pula kelompok yang memiliki potensi dan sumber daya. Bagaimana kita semua bisa mengoptimalkan setiap potensi dan sumber daya itu, dan kemudian bahu membahu mengatasi setiap masalah yang ada.

Semangat kolaborasi yang dibangun di tubuh BAZNAS (BAZIS) tak terlepas dari konsep Jakarta City 4.0 yang digagas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sekedar gambaran, tahapan City 1.0 adalah sosialisasi pemerintah kepada warganya. Bagaimana pemerintah menyampaikan informasi kepada publik dan publik mengikutinya. Pada tahapan City 2.0, Pemprov DKI akan menjadi penyedia atau pelayan. Sedangkan warganya menjadi seorang

customer sehingga tahapannya seperti konsultasi. Pada tahapan City 3.0, Pemprov DKI akan bertransformasi sebagai fasilitator dan warga sebagai partisipan. Dalam proses ini yang ditekankan merupakan partisipasi warga. Sedangkan City 4.0, pemerintah sebagai kolaborator dan warga sebagai kreator. Kolaborasi menjadi kata kunci, di mana pemerintah memfasilitasi dan mengoptimalkan kreasi dan inovasi warganya.

Jika mengikuti term City 4.0, program-program yang digulirkan BAZNAS (BAZIS), tidak bersifat *top down*. Ide program itu justru banyak lahir dari masyarakat penerima manfaat. Maka untuk menyerap beragam ide itu, BAZNAS (BAZIS) kerap menggelar JakBee Hackathon, yaitu kompetisi ide, gagasan, dan inovasi sosial yang diikuti oleh kalangan pemuda dan pelajar. Mereka ditantang memberikan ide dan inovasi untuk mengatasi masalah-masalah yang ada, baik dalam isu perkotaan, digital, ekonomi, hingga pendidikan dan kesehatan.

B. PROSES PANJANG TRANSFORMASI

Proses transformasi yang terjadi di BAZNAS (BAZIS) tentu saja membutuhkan waktu yang cukup panjang. Apa yang kami lakukan saat ini harus bisa terus berjalan dan berkesinambungan hingga masa selanjutnya. Proses perubahan itu tidak saja terjadi pada program pendistribusian dan pendayagunaan, melainkan juga pada semua aspek yang ada di lembaga ini.

Dalam aspek penghimpunan misalnya, BAZNAS (BAZIS) tidak saja terpaku pada zakat para ASN di lingkungan pemerintah

provinsi. Kini, Divisi Penghimpun juga menggarap zakat, infak dan sedekah dari berbagai kelompok, golongan dan lapisan masyarakat. Mulai dari karyawan BUMD, masyarakat umum, hingga kelompok milenial. Kami juga membuka lebih banyak kanal donasi yang memudahkan donatur menyalurkan derma mereka melalui BAZNAS (BAZIS), mulai dari saluran *off line* hingga *online*.

Kami juga menjalin kemitraan strategis dengan berbagai entitas untuk membuka akses yang lebih luas terhadap sumber-sumber dana filantropi. Tidak hanya pada dana ZIS, melainkan juga CSR dan yang sejenisnya.

Pun dalam aspek tata kelola kelembagaan. Banyak hal yang kami lakukan dalam rangka transformasi ini. Mulai dari restrukturisasi organisasi dan penguatan tata kelola seluruh fungsi organisasi, implementasi layanan digital, internalisasi *service culture*, hingga peningkatan kompetensi SDM. Tentu ada banyak lagi yang harus dilakukan dalam aspek ini.

Kami juga melakukan perbaikan terus menerus (*continues improvement*) dari sisi perencanaan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada *stakeholder* BAZNAS (BAZIS), baik itu muzaki, mustahik, maupun amil yang mengelola. Berbagai riset juga dilakukan untuk melihat sejauh mana program yang dijalankan memiliki dampak dan perubahan bagi mustahik. Selain itu juga melakukan kajian atas kepuasan muzaki terhadap layanan yang diberikan BAZNAS (BAZIS) selama ini. Dengan demikian kita

dapat mengukur, mana yang harus diperbaiki, mana yang harus dipertahankan, dan seterusnya. Sehingga proses perencanaan dan pengembangan berjalan berdasarkan data yang valid.

Buku yang ada di tangan Anda saat ini adalah sebagian kecil potret transformasi yang kami lakukan di BAZNAS (BAZIS). Karena berbagai keterbatasan, saat ini kami hanya menampilkan beberapa program yang digulirkan sejak tahun 2019. Diangkatnya sebagian program BAZNAS (BAZIS) dalam buku ini tentu saja bukan untuk menihilkan dan mengecilkan program lain. Program-program ini adalah representasi dari banyak program pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang ada di BAZNAS (BAZIS).

Kami juga menyajikan *logical model* (model logis) dari setiap program yang diangkat. Logic Model adalah metode visual untuk menyampaikan sebuah ide yang menguraikan dan membagi pemahaman keterkaitan antar-elemen untuk mengoperasikan sebuah program atau usaha perubahan. *Logic model* sebagai alat untuk menceritakan kinerja program dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan: apa yang coba dicapai dan mengapa program tersebut dianggap penting, bagaimana mengukur efektifitasnya, dan bagaimana melakukannya dengan benar.

Tujuan menyajikan *logic model* dari program yang kami angkat adalah untuk menunjukkan, bahwa setiap program yang dijalankan bukan semata-mata karena “wangsit” yang bisa langsung dijalankan. Ada proses perencanaan, analisis dan penilaian yang harus dilalui.

Sehingga setiap program yang kami jalankan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Karena setiap rupiah yang kami gunakan untuk membiayai program ini adalah amanah yang dititipkan para donatur, sehingga harus disalurkan dan didistribusikan sebagaimana mestinya.



BAB II

JAKARTA; POTENSI DAN MASALAHNYA

Selain sebagai ibu kota negara, DKI Jakarta mempunyai peran yang sangat penting dan multifungsi. Jakarta merupakan kota yang berkontribusi paling tinggi bagi perekonomian nasional, karena Jakarta adalah pusat kegiatan keuangan di tingkat nasional. Jakarta juga merupakan pusat kegiatan pemerintahan, dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat atau perwakilan lembaga internasional. Dengan demikian, posisi Jakarta sangat penting bagi negara.

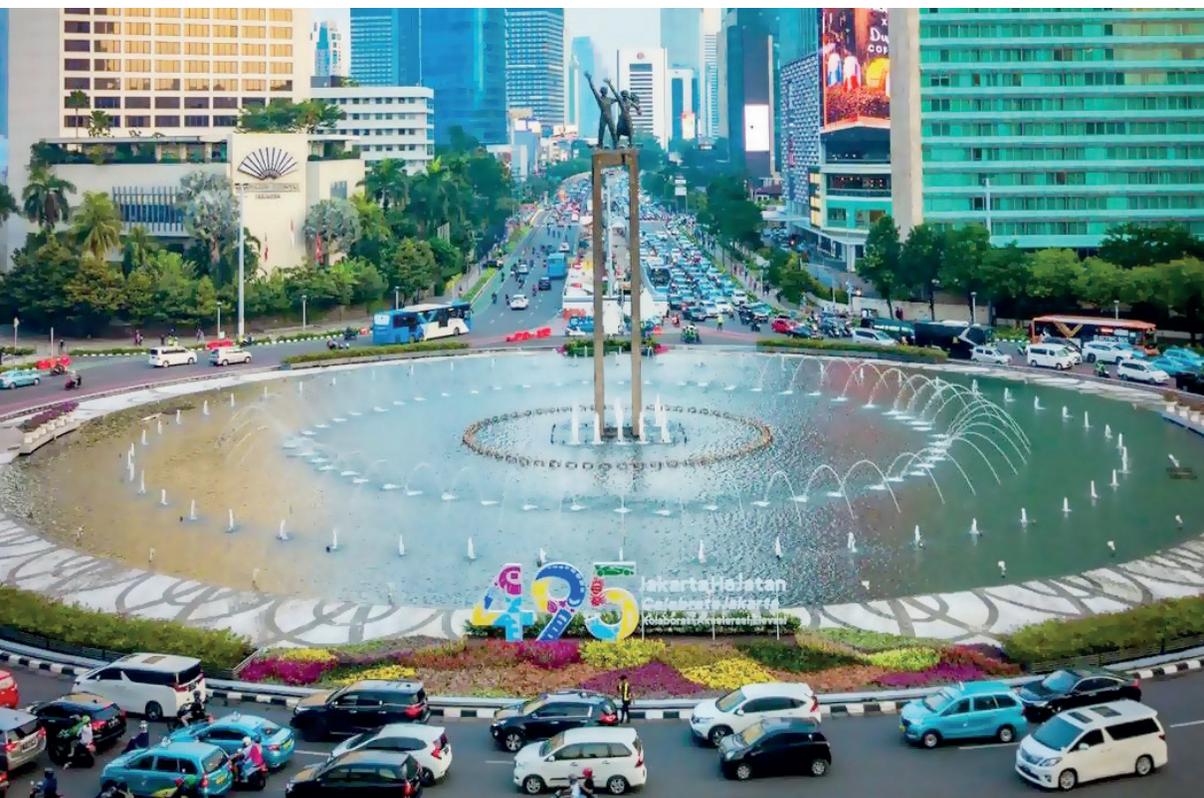
Seperenam dari PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia dihasilkan oleh Jakarta. Kontributor utama perekonomian Jakarta adalah jasa keuangan, perdagangan, manufaktur, dan perbankan. Alasan utama pesatnya pertumbuhan penduduk Jakarta adalah karena terbuka luasnya kesempatan kerja.

Bahkan, ditilik dari jumlah populasi, menurut *Demographia*, Jakarta menduduki urutan kedua sebagai kota metropolitan terbesar di dunia setelah Tokyo di Jepang. Kota Jakarta yang dimaksud di sini adalah Metropolitan Jakarta ditambah dengan wilayah Bogor, Tangerang dan Bekasi atau biasanya disebut dengan Jabotabek. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, disebutkan, bahwa wilayah Jabodetabek ini berpenduduk 29.116.662 jiwa atau sekitar 11% dari penduduk Indonesia, dan menjadi salah satu wilayah terpadat penduduknya di Indonesia.

Dengan jumlah populasi sebesar itu, tentunya masuk akal bila pertumbuhan bisnis di Jakarta sangat cepat dibanding daerah lainnya. Logikanya, produk atau jasa akan berkembang di suatu wilayah jika ada peminatnya. Semakin banyak peminatnya, semakin berkembang bisnis tersebut. Banyaknya peminat berbanding lurus dengan jumlah populasi di suatu wilayah. Jumlah penduduk di Jakarta sangat melimpah, terutama karena banyaknya pendatang yang berakhir menetap di kota metropolitan ini. Dengan sumber daya manusia yang melimpah, perputaran ekonomi jadi lebih mudah. Bisnis cepat berkembang.

Bisnis di Jakarta juga berkembang pesat karena ketersediaan infrastruktur. Harus diakui, infrastruktur di Jakarta lebih lengkap dan baik dibandingkan beberapa kota lainnya. Mulai dari jalan

Foto: Suasana Kota Jakarta masa kini



raya, jalan tol, fasilitas umum, pusat perbelanjaan, bandara internasional maupun nasional, dermaga, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut membuat kegiatan menjadi lebih mudah, sehingga kegiatan ekonomi pun tidak begitu sulit dikembangkan.

Faktor ketiga yang membuat bisnis di Jakarta berkembang pesat adalah adanya transportasi yang mencukupi. Transportasi umum maupun pribadi memiliki akses yang mudah, sehingga masyarakat pun dengan gampang mengembangkan bisnisnya.

Akibat lanjutan dari perkembangan bisnis di Jakarta yang begitu pesat adalah perputaran uang yang besar. Banyak pihak mengkalkulasi, perputaran uang di Jakarta mencapai sekitar 70 persen dari total perputaran uang secara nasional. Sedangkan dari sisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2021, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), DKI Jakarta tertinggi secara nasional, yakni sebesar Rp 2,91 kuadriliun. Jika dilihat per penduduk, PDRB per kapita DKI Jakarta mencapai Rp 274,71 juta pada tahun 2021. Artinya, rata-rata pendapatan per kapita penduduk Jakarta tertinggi secara nasional, empat kali lebih besar dari rata-rata pendapatan penduduk secara nasional yang hanya sebesar Rp 62,23 juta per tahun.

Laporan Bank Indonesia tahun 2021 juga menunjukkan, secara keseluruhan tahun 2021, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tercatat sebesar 3,56%, pada hal tahun 2020 minus -2,39% karena ada pandemi Covid-19. Namun, harus diakui, pertumbuhan DKI

Jakarta pada tahun 2021 lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 3,69%.

A. POTENSI

Ekonomi dan bisnis di Jakarta tumbuh pesat juga karena melimpahnya sumber daya manusia, sesuai dengan besarnya populasi. Harus diakui, pertumbuhan ekonomi di Jakarta didukung oleh pekerja, pengusaha, pewirausaha, dan profesional yang tinggal di wilayah sekitarnya, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Berdasarkan pencatatan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Jumlah penduduk DKI Jakarta sendiri, yakni yang ber-KTP di Jakarta, sebanyak 11,25 juta jiwa pada Juni 2021. Dari sejumlah itu, sebanyak 7,95 juta jiwa atau 70,73% penduduknya merupakan kelompok usia produktif, yakni yang berusia antara 15 sampai 64 tahun. Sisanya, sebanyak 2,73 juta jiwa (24,28%) adalah kelompok usia belum produktif (0-14 tahun) dan 561,57 ribu jiwa (4,99%) merupakan kelompok usia sudah tidak produktif (65 tahun ke atas).

Dari sisi jenis pekerjaan, secara umum, pekerja pada sektor formal berjumlah lebih banyak yaitu sebesar 61,74% dibandingkan dengan pekerja sektor informal sebesar 38,26% dari seluruh pekerja di DKI Jakarta. Artinya, angka ini mengatakan bahwa tiga dari lima pekerja di DKI Jakarta adalah pekerja formal.

Dukcapil DKI Jakarta juga punya catatan, pada tahun 2020, mayoritas penduduk DKI Jakarta bekerja sebagai karyawan swasta, yakni sebesar 31,98% atau sebanyak 2.703.000 orang. Terbanyak kedua, yakni sebesar 24,90% atau sebanyak 2.104.378 orang adalah pekerjaan mengurus rumah tangga. Jumlah ini disusul oleh penduduk yang berstatus sebagai pelajar/mahasiswa yang mencapai sebesar 13,17% atau sebanyak 1.112.861 orang. Banyaknya sekolah dan perguruan tinggi di DKI Jakarta menjadi salah satu faktor banyaknya penduduk dengan status pelajar/mahasiswa. Pekerjaan lainnya dengan jumlah penduduk yang cukup banyak seperti pegawai negeri, anggota TNI, sopir, karyawan badan usaha milik negara, dokter, polisi, dosen, wartawan, pengacara, dan lain-lain.

Namun, seperti halnya kondisi secara nasional, lebih dari sepertiga penduduk DKI Jakarta hanya tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), yang mencapai 4,34 juta orang atau 38,57%. Bahkan, penduduk Jakarta yang hanya tamatan Sekolah Tingkat Lanjutan Pertama (SLTP) juga masih tergolong banyak, yakni sebanyak 1,48 juta orang (13,19%) dan jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 915,07 juta orang (8,14%).

Penduduk DKI Jakarta yang berkesempatan menikmati jenjang pendidikan tinggi jenjang S1 berjumlah 1,17 juta orang (10,38%), 38,26 ribu orang merupakan lulusan D1 dan D2, 377,86 ribu jiwa lulusan D3. Ada juga sebanyak 114,93 ribu orang yang berpendidikan hingga S2, dan 7,1 ribu orang berpendidikan hingga S3.

B. POTENSI ZAKAT DAN FILANTROPI ISLAM

Apa yang dapat dimaknai dari profil ekonomi dan sumber daya manusia di Jakarta? Yakni terbukanya potensi zakat dan aksi filantropi, baik itu filantropi pada umumnya, maupun yang khusus berbasis keislaman.

Dalam hal potensi zakat, Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pernah melakukan pemetaan potensi zakat di 416 kabupaten dan 98 kota di 34 provinsi Indonesia pada tahun 2022. Dalam menghitung potensi zakat itu, juga digunakan asumsi efektivitas potensi zakat yang ditunjukkan dengan persentase penduduk muslim (%) yang diambil dari hasil sensus penduduk tahun 2020, misalnya prosentase penduduk muslim di Jakarta yang mencapai 84 persen.

Dalam Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) yang disusun BAZNAS tersebut diidentifikasi secara komprehensif seluruh potensi objek zakat yang ada di suatu kabupaten/kota. Berdasarkan rekapitulasi IPPZ, Provinsi DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan nilai potensi zakat yaitu sebesar Rp 64,5 triliun, disusul oleh provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat dengan nilai masing-masing sebesar Rp 36,2 triliun dan Rp 30,6 triliun.

Sedangkan potensi zakat BAZNAS Provinsi yang dipetakan dalam kajian adalah objek zakat penghasilan ASN dan non-ASN, zakat perusahaan BUMD provinsi, dan zakat ritel. Potensi zakat BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta tercatat senilai



Foto: Orang menunaikan zakat di Gerai BAZIS DKI

Rp302,9 miliar dengan indeks literasi 54,60% dan optimalisasi penghimpunan zakat sebesar Rp165,38 miliar.

Selain aksi zakat, aksi kedermawanan sosial masyarakat juga sangat tinggi. Tahun 2021 lalu, salah satu lembaga amal (*charity*) di Inggris, yaitu Charities Aid Foundation (CAF) dalam laporan World Giving Index 14 Juni 2021, menobatkan Indonesia sebagai negara yang paling dermawan di dunia. Penobatan yang sama sebelumnya juga pada tahun 2018. Tentu saja, Jakarta menjadi salah satu barometer dalam indeks ini.

Terdapat tiga indikator yang menjadi ukuran WGI, yaitu: (1) Membantu orang asing atau tidak dikenal; (2) Memberi sumbangan uang; (3) Menjadi relawan. Seperti pada 2018, Indonesia berada di peringkat atas karena didorong oleh faktor “memberi sumbangan”

yang tinggi, dengan skor 83 persen. Menurut laporan tersebut, 8 dari 10 orang di Indonesia menyumbangkan uangnya (berdonasi).

Merujuk hasil survei dari CAF di atas, menunjukkan, pandemi dan krisis ekonomi tidak menghalangi masyarakat Indonesia untuk berderma. Bahkan, kondisi pandemi justru meningkatkan semangat masyarakat untuk saling membantu kepada sesama.

Predikat Indonesia sebagai negara dermawan didukung oleh beberapa faktor di antaranya yaitu kuatnya pengaruh ajaran agama dan tradisi (kearifan) lokal yang berkaitan dengan kegiatan berderma. Dalam sebuah wawancara, Badan Pengarah Filantropi Indonesia, Erna Witoelar mengungkapkan, dalam setahun potensi donasi masyarakat Indonesia jika dioptimalkan bisa mencapai Rp 200 triliun, namun baru terhimpun sekitar 3% (tiga persen) atau sekitar Rp 6 triliun.

Dalam catatan yang dilakukan portal *indorelawan.org*. teridentifikasi, bahwa di DKI Jakarta ada sebanyak 93 lembaga filantropi yang bergerak dalam berbagai bidang. Mereka ada yang focus pada isu bantuan hukum, disabilitas, kesehatan, hak asasi manusia, kepemimpinan, kesetaraan gender, dan sebagainya.

Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedai KOPI, Kunto Adi Wibowo, agama menjadi salah satu motivasi seseorang untuk melakukan donasi atau kegiatan filantropi di Indonesia. "Filantropi agama menyalurkan lebih dari 80 persen dari total penyaluran dana filantropi di tahun 2020, disusul oleh filantropi perusahaan", tutur Kunto.

C. MASALAH LATEN IBU KOTA

Implikasi dari perannya sebagai ibu kota negara, pembangunan Jakarta memiliki kekhususan jika dibandingkan daerah lainnya. Pembangunan di wilayah Jakarta juga mempunyai tantangan dan permasalahan yang lebih kompleks dibanding daerah lain, di samping menyimpan potensi yang sangat besar. Kota dengan populasi lebih dari 10 juta jiwa ini selalu berhadapan dengan masalah urbanisasi, keamanan, kemiskinan, transportasi, lingkungan, pengelolaan kawasan khusus, dan masalah sosial kemasyarakatan lain yang memerlukan pemecahan masalah secara sinergis melalui berbagai instrumen.

Gubernur atau kepala daerah silih berganti. Berbagai strategi diupayakan untuk menangani. Ada yang dapat teratasi, namun tak sedikit yang masih menjadi PR hingga kini. Berikut ini beberapa masalah laten yang dihadapi Jakarta.

Urbanisasi

Jakarta telah lama menjadi magnet urbanisasi masyarakat Indonesia. Banyak orang yang nekat mengadu nasib di ibu kota. Sensus terakhir mencatat, 10,61 juta orang tinggal di Jakarta. Jumlah tersebut belum termasuk para pekerja dari kota-kota penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. DKI Jakarta bahkan masuk dalam sepuluh besar kota terpadat di dunia.

Kepadatan di Jakarta sudah terjadi sejak tahun 1950-an. Menurut Sejarawan Susan Blackburn dalam *Jakarta Sejarah*

400 Tahun, jumlah penduduk di Jakarta pada tahun 1952 adalah 1,782 juta jiwa. Angka tersebut mengalami lonjakan sebesar 823.000 jiwa dibanding tahun 1948.

Jumlah penduduk di ibu kota pun terus bertambah seiring berjalannya waktu. Pada tahun 1965, tercatat sebanyak 3,813 juta orang tinggal di Jakarta. Penambahan jumlah penduduk Jakarta bukan disebabkan oleh angka kelahiran yang tinggi, melainkan para pendatang dari berbagai daerah.

Menurut Susan, ada beberapa alasan mengapa masyarakat berbondong-bondong bermigrasi ke Jakarta. *Pertama*, Jakarta kembali menjadi pusat pemerintahan. Migrasi masyarakat dalam jumlah besar mulai terlihat setelah kembalinya pusat pemerintahan Republik Indonesia dari Yogyakarta ke Jakarta pada akhir 1949. *Kedua*, sebagian masyarakat datang ke Jakarta untuk menghindari kerusuhan di daerah asal mereka. Untuk diketahui, saat itu banyak terjadi pemberontakan melawan pemerintah Republik Indonesia di sejumlah daerah pada tahun 1950-an.

Alasan *ketiga* adalah faktor ekonomi. Berdasarkan survei tahun 1953, mayoritas masyarakat memilih pindah ke Jakarta karena ingin mendapatkan kehidupan lebih baik dibanding di pedesaan. “Sebagai tempat kedudukan pemerintah nasionalis yang baru yang telah menjanjikan bahwa kemerdekaan akan membawa kemakmuran, Jakarta tampaknya menawarkan harapan baru bagi para penduduk pedesaan,” tulis Susan, seperti disitat Kompas (2021). Meski begitu, ada pula

pendatang yang hanya menetap sementara di Jakarta. Mereka umumnya akan tinggal beberapa bulan di Jakarta dan kembali ke kampung halaman untuk bercocok tanam.

Faktanya kini, kepadatan penduduk di Jakarta berdampak pada segala bidang, terutama perumahan. Banyak masyarakat yang akhirnya memilih mendirikan rumah semi-permanen di pinggir jalan atau bawah jembatan. Permasalahan penambahan penduduk di Jakarta ini masih belum terpecahkan seutuhnya hingga saat ini.

Hingga kini, arus urbanisasi ke Jakarta masih belum dapat dibendung, karena memang ketimpangan pembangunan masih terjadi di negeri ini. Setiap habis lebaran, diprediksi jumlah pendatang ke ibu kota mencapai puluhan ribu.

Urbanisasi adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Dalam sebuah forum internasional yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Gubernur DKI Jakarta 2017-2022, Anies R. Baswedan menyebut sebagian besar penduduk dunia akan tinggal di kota, sebagai bagian dari fenomena urbanisasi besar, yang akan terjadi beberapa tahun ke depan. Setidaknya lebih dari separuh populasi dunia akan tinggal di kota. Angka urbanisasi tersebut, akan meningkat dari tahun ke tahun.

“Diprojektikan bahwa setidaknya 60,4% populasi dunia akan tinggal di kota pada tahun 2030 dan 68% pada tahun 2050 dan nantinya peran kota penting bagi peradaban kita,” kata Anies.

Pemerintah DKI Jakarta, berkomitmen bahwa Jakarta adalah milik semua orang. Sehingga kita tidak lagi mendengar ada operasi yustisi setiap habis lebaran. Jakarta memberikan kesempatan kepada siapa saja atas dasar keadilan dan inklusivitas, untuk berkarya dan mencari kehidupan di Jakarta. Kita tidak boleh menegasikan fenomena ini, yang harus dilakukan adalah langkah-langkah afirmatif, bagaimana urbanisasi ini tidak menimbulkan masalah dan kerawanan kota.

Kemiskinan Perkotaan

Secara umum, kemiskinan perkotaan masih menjadi permasalahan yang dihadapi Jakarta. Secara kuantitas jumlah penduduk Jakarta yang hidup di bawah garis kemiskinan merupakan kategori *hardcore poverty*, yang membutuhkan penanganan khusus. Penduduk miskin kota yang masuk kategori tersebut sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah. Selain itu, potensi jumlah penduduk yang masuk dalam kategori rawan miskin dan rentan terkena guncangan perubahan seperti kenaikan harga, inflasi, dan pandemi juga dapat meningkat sewaktu-waktu.

Pada tahun 2015 – 2019 tren persentase penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta cenderung menurun walaupun dengan deviasi tidak lebih dari 1 persen dalam periode tersebut. Namun, pada tahun 2020, persentase penduduk miskin DKI Jakarta melonjak naik. Pada September tahun 2019 angka



Foto pemukiman pada Jakarta

kemiskinan Jakarta adalah 3,42 persen, dan naik menjadi 4,53, persen pada Maret tahun 2020. Artinya, penduduk miskin di DKI Jakarta bertambah 118,6 ribu orang atau naik sebesar 1,11 persen dibandingkan kondisi September 2019. Saat pandemi, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis, jumlah penduduk miskin Jakarta meningkat menjadi 496.840 pada September 2020.

Dalam rilis berikutnya, angka kemiskinan kembali meningkat pada Maret 2021 menjadi 501.920 orang. Namun angka ini kembali mengalami penurunan pada September 2021, menjadi 498.290, atau 4,67 persen. Jumlah ini berkurang 3.630 orang dibanding Maret 2021.

Turun naiknya angka kemiskinan ini disinyalir karena pandemi yang juga melanda Jakarta, di mana banyak orang kehilangan pekerjaan dan menurunnya penghasilan. Tidak hanya Jakarta, berbagai daerah lain juga mengalami nasib yang sama.

Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi kemiskinan patut diapresiasi, meski masalah tersebut belum sepenuhnya teratasi. Beberapa strategi yang ditempuh pemerintah di antaranya melalui pendekatan; pengurangan beban pengeluaran bagi masyarakat miskin, juga peningkatan produktivitas warga, khususnya produktivitas masyarakat miskin dan rentan.

Upaya yang dilakukan antara lain dan tidak terbatas pada pemberian bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan. Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang diperluas cakupannya untuk memastikan anak di luar sekolah dapat kembali mengenyam bangku pendidikan, Kartu Jakarta Sehat (KJS) Plus, program pengendalian harga komoditas pangan pokok, subsidi pangan, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi anak murid PAUD dan Sekolah Dasar. Selain itu juga akses terhadap hunian terjangkau, perluasan cakupan pelayanan air bersih, subsidi transportasi dengan program Jak Lingko, dan sebagainya.

Adapun peningkatan produktivitas warga, khususnya produktivitas masyarakat miskin dan rentan dilakukan melalui beberapa pendekatan, antara lain peningkatan kualitas pendidikan vokasi, agar sesuai dengan kebutuhan dunia industri; Pengembangan Kewirausahaan Terpadu untuk melahirkan wirausahawan baru; penataan regulasi (perizinan, zonasi usaha, dsb) dan penguatan implementasinya untuk mendukung kemudahan berusaha bagi pelaku Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah. Selain itu juga dengan mendorong formalisasi usaha dari sektor-sektor usaha informal; pendampingan sekaligus perluasan akses terhadap modal dan pasar melalui kolaborasi dengan sektor swasta; hingga komitmen penggunaan produk lokal yang dihasilkan pelaku usaha binaan pemerintah daerah; pemberian pelatihan kerja pada PPKD; serta peningkatan kapasitas berwirausaha bagi kelompok masyarakat termiskin.

Pendidikan

Permasalahan pendidikan ditandai dengan masih banyaknya prasarana dan sarana pendidikan dasar yang perlu diperbaiki dan peningkatan proses belajar mengajar agar lulusan dapat lebih berkualitas. Dalam hal ini perlu juga ditingkatkan kualitas sumber daya manusia pendidikan agar metode dan proses dapat diterima oleh peserta didik, sehingga proses pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penataan dan pengembangan urusan pendidikan dan peningkatan akses pendidikan untuk semua lapisan masyarakat serta masih terjadi tawuran antar pelajar.

Selain itu pada urusan pendidikan diperlukan beberapa kegiatan yaitu penyediaan data terkini peta kondisi gedung sekolah dan sarana penunjang pendidikan. Data ini sebagai bahan penyusunan program rehabilitasi/perawatan, rehab total jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Jika dilihat dari data pemerintah, pembangunan pendidikan di Jakarta cukup menggembirakan. Persentase Angka Partisipasi Sekolah pada suatu kelompok umur tertentu di Provinsi DKI Jakarta masih sangat baik pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs. Walau belum mencapai 100 persen seluruhnya namun angka tertinggi pada angka partisipasi sekolah dasar (SD/MI) pada tahun 2018 yaitu sebesar 99,77 persen dan angka partisipasi sekolah menengah pertama (SMP/MTs) pada tahun 2019 yaitu sebesar 98.33 persen. Sementara itu, persentase Angka Partisipasi Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA) mengalami peningkatan yang signifikan dari 59,72 persen pada tahun 2011, meningkat menjadi 72.01 persen pada tahun 2019.

Sementara itu jumlah Angka Putus Sekolah pada jenjang SD sampai dengan SMA dan SMK di DKI Jakarta mengalami penurunan angka yang signifikan pada setiap jenjang pendidikan. Artinya, pembangunan pendidikan yang dilakukan pemerintah provinsi DKI Jakarta telah mencapai target yakni mengurangi angka putus sekolah anak yang merupakan investasi modal manusia. Berdasarkan data pemerintah, Angka Putus Sekolah tertinggi di DKI Jakarta terdapat pada jenjang pendidikan SMK pada tahun 2017 sebesar 2.690 orang yang kemudian menurun sangat signifikan pada tahun 2018 dan tahun 2019 hingga mencapai 47 orang pada tahun 2019. Hal yang sama terjadi pada jenjang pendidikan SD, SMP/MTs dan SMA.

Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang diluncurkan pemerintah merupakan salah satu program strategis untuk memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA/SMK dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta. Sasaran utamanya adalah siswa miskin, atau peserta didik pada jenjang satuan pendidikan sekolah dasar sampai dengan menengah yang secara personal dinyatakan tidak mampu baik secara materi maupun penghasilan orang tuanya yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan. Kebutuhan dasar pendidikan yang dimaksud mencakup: seragam, sepatu, dan tas sekolah, biaya transportasi, makanan serta biaya ekstrakurikuler.

Banjir

Banjir dan genangan air merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi Jakarta. Banjir dan genangan air ini utamanya disebabkan oleh curah hujan lokal yang tinggi, curah hujan yang tinggi di daerah hulu yang berpotensi menjadi banjir kiriman, dan rob atau air laut pasang yang tinggi di daerah pantai utara. Selain itu, terjadinya banjir dan genangan air di Jakarta juga disebabkan oleh sistem drainase yang tidak berfungsi dengan optimal, tersumbatnya sungai dan saluran air oleh sampah dan berkurangnya wilayah-wilayah resapan air akibat dibangunnya hunian pada lahan basah atau daerah

resapan air serta semakin padatnya pembangunan fisik. Hal lainnya adalah prasarana dan sarana pengendalian banjir yang belum berfungsi maksimal.

Bencana banjir luar biasa terjadi apabila faktor penyebab banjir dan genangan tersebut terjadi secara bersamaan akan mengakibatkan kerugian fisik-material dan ekonomi sangat besar bagi warga kota. Selain hal tersebut, faktor manusia turut memberikan andil dalam menyebabkan banjir yang masih relevan dengan tantangan Jakarta, antara lain: pendangkalan ruang terbuka biru (RTB) yang ada, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran/sungai, kecenderungan masyarakat untuk memperkecil saluran/sungai, dan sebagainya.

Fenomena banjir yang terjadi di Jakarta tidak lepas dari kemiringan lerengnya, lokasi kota Jakarta yang masih tergolong dalam tingkat kemiringan lereng 0-3 persen. Kemiringan lereng pada kota Tangerang dan Bekasi memiliki karakteristik yang sama, sehingga dapat dinyatakan bahwa sebagian besar kawasan Jabodetabek berada pada kemiringan lereng relatif landai.

Dengan kondisi kemiringan lahan yang demikian, ditambah dengan 17 sungai yang mengalir di wilayah Jakarta menyebabkan kecenderungan semakin rentannya wilayah Jakarta untuk tergenang air dan banjir pada musim hujan. Terlebih jika memperhatikan tingginya tingkat perkembangan wilayah di sekitar Jakarta, menyebabkan semakin rendahnya



Foto Banjir Jakarta

resapan air ke dalam tanah dan menyebabkan *run off* air semakin tinggi, yang pada gilirannya akan memperbesar ancaman banjir di wilayah Jakarta.

Jika melihat ke belakang, banjir besar pernah terjadi pada tahun 1600-an, saat Jakarta masih bernama Batavia, lalu terjadi lagi pada 1918. Usai Indonesia merdeka, banjir besar juga pernah terjadi pada awal 1976. Di dekade 2000-an, banjir besar pernah melanda Jakarta pada 2002 dan 2007. Banjir 2007 membuat setidaknya 80 jiwa melayang dan 320 ribu jiwa mengungsi.

Banjir besar lagi-lagi menerjang Jakarta pada 2015, saat itu, curah hujan masuk kategori ekstrem, yakni 170 mm per hari. Empat tahun berselang, tepatnya saat malam pergantian tahun 2020, banjir kembali menerjang Jakarta, setidaknya 15 persen warga terdampak banjir awal tahun itu.

Tidak hanya masalah banjir, melansir World Economic Forum, Jakarta menjadi kota yang paling berpotensi tenggelam. Permukaan tanah Jakarta disebut menurun hingga 6,7 inci per tahun karena pemompaan air tanah yang berlebihan. Karena hal itu, sebagian besar kota Jakarta diprediksi tenggelam pada tahun 2050.

Kemacetan

Selain banjir, kemacetan juga merupakan masalah yang harus dihadapi warga ibu kota setiap hari. Permasalahannya semakin parah seiring dengan bertambahnya penduduk dan penggunaan kendaraan pribadi. Berdasarkan Traffic Index 2017, Jakarta pernah berada di peringkat ke-4 kota termacet di dengan tingkat kemacetan 61 persen, hanya kalah dari Mumbai, New Delhi dan Bogota.

Peringkat ini lalu mengalami penurunan pada 2017, Jakarta berada di peringkat ke-7 dengan tingkat kemacetan 53 persen, dan kembali mengalami penurunan peringkat ke-10 pada 2019. Namun di 2019, tingkat kemacetan Jakarta tetap berada di angka 53 persen.

Untuk mengatasi masalah ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan hierarki prioritas pengembangan transportasi yang terdiri dari 4 (empat) hierarki yaitu pejalan kaki, kendaraan ramah lingkungan, angkutan umum, dan kendaraan pribadi. Pejalan kaki menjadi prioritas pertama karena merupakan moda transportasi dengan menggunakan bagian tubuh untuk melakukan mobilitas dan pergerakan orang yang murah dan ramah lingkungan. Selanjutnya adalah penggunaan kendaraan ramah lingkungan dan angkutan umum yang ditujukan untuk mengurangi volume penggunaan kendaraan pribadi dalam mengurai kemacetan.

Berjalan kaki dan bersepeda merupakan salah satu kendaraan ramah lingkungan yang cenderung dilakukan untuk jarak perjalanan yang dekat. Sedangkan untuk perjalanan yang relatif lebih jauh Pemerintah Provinsi Jakarta melakukan penerapan Transportation Demand Management (TDM). Bentuk dari TDM adalah pemberlakuan *push and pull strategy*. *Push strategy* merupakan kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi untuk dibatasi ruang geraknya agar beralih kepada angkutan umum, sedangkan Kebijakan *pull strategy* merupakan kebijakan untuk meningkatkan penggunaan angkutan umum. Dalam merealisasikan pelaksanaan *push and pull strategy* tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah merencanakan kegiatan – kegiatan strategis melalui penetapan rencana aksi 9 (sembilan) Kegiatan Strategis Daerah (KSD) dalam bidang transportasi.



BAB III

TRANSFORMASI BAZNAS (BAZIS) PROVINSI DKI JAKARTA

Transformasi kelembagaan BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta berjalan sepanjang usianya yang melebihi setengah abad. Selain perubahan nama lembaga dari BAZ, BAZIS, hingga BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta, institusi ini juga mengalami perubahan visi dan misi, struktur organisasi, program, hingga budaya kerja.

Akademisi dan pemerhati filantropi Islam, Amelia Fauzia, dalam bukunya “Faith and State; A History of Islamic Philanthropy in Indonesia” (2013), melihat ada tiga alasan utama mengapa BAZIS DKI—yang kemudian menjadi BAZANS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta, mampu menjaga eksistensinya dan bersaing dengan banyak organisasi pengelola zakat yang hadir belakangan. *Pertama*, BAZNAS (BAZIS) mampu meningkatkan kinerja di berbagai bidang, seperti menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Kedua, lembaga ini terus merekrut pemimpin muslim dan ulama dalam strukturnya, sehingga dapat memberikan keseimbangan antara negara dan kepentingan masyarakat. Sejak awal, BAZNAS (BAZIS) adalah satu-satunya BAZ yang menjadi anggota aktif Forum Zakat (FOZ), sebuah asosiasi organisasi-organisasi filantropi Islam yang dibentuk oleh LSM dan LAZ. Keterlibatan BAZNAS (BAZIS) dalam forum ini merupakan indikasi bahwa manajemennya relatif terbuka. *Ketiga*, tumbuhnya persepsi di kalangan umat Islam bahwa tidak ada salahnya membayar zakat kepada badan zakat berbasis negara. Bahkan, beberapa sarjana muslim mendukung pengumpulan zakat oleh negara sebagai praktik zakat yang ideal.

Perjalanan kiprah BAZNAS (BAZIS) menjadi saksi sejumlah peristiwa penting terkait peran negara dalam urusan pengelolaan zakat hingga terwujudnya Undang-Undang Pengelolaan Zakat Tahun 1999 dan amandemen UU No. 23 tahun 2011. Pertumbuhan kinerja dan prestasi BAZNAS (BAZIS) tidak lepas dari dukungan para gubernur DKI Jakarta dari masa ke masa, dari satu periode ke periode yang lain.

A. SEJARAH

Pada tahun 1968, tepatnya tanggal 24 September, sebelas ulama nasional, yaitu Prof. Buya Hamka, Buya H.A. Malik Ahmad, KH. Ahmad Azhari, KH. M. Sjukri Ghazali, KH. Taufiqurrahman, H. Moh Sodry, KH. Saleh Suaidy, M. Ali Al Hamidy, Mukhtar Luthfy, Abdul Kadir, dan KH. MA. Zawawy menggelar pertemuan di Jakarta untuk membahas masalah-masalah keumatan. Dalam kegiatan ijmak ulama itu, salah satu pembahasan yang mengemuka adalah perlunya pengelolaan zakat dengan sistem administrasi dan tata usaha yang baik. Dengan demikian, pengumpulan dan pendayagunaannya zakat dalam dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Selain itu, zakat merupakan potensi umat yang sangat besar yang belum dilaksanakan secara maksimal. Karenanya, diperlukan efektivitas pengumpulan zakat, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan. Hasil ijmak mereka ini kemudian disodorkan kepada Presiden RI saat itu, Soeharto. Mereka juga berharap Presiden RI, untuk secara aktif mempromosikan zakat

dan mendukung pembentukan badan-badan zakat di bawah pemerintah provinsi.

Saran 11 ulama itu ditanggapi secara serius oleh Presiden RI yang kemudian memberikan seruan dan edaran kepada para pejabat dan instansi terkait untuk menyebarluaskan dan membantu terlaksananya pengumpulan zakat secara nasional. Dalam momen peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Istana Negara, 26 Oktober 1968, Presiden Soeharto mengeluarkan seruan tentang perlunya intensifikasi pengumpulan zakat sebagai potensi yang besar untuk menunjang pembangunan.

Merespon seruan presiden, Gubernur DKI saat itu, Ali Sadikin, mengeluarkan SK No Cb-14/8/18/68 tentang pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) DKI Jakarta pada 5 Desember 1968. DKI menjadi provinsi pertama yang menindaklanjuti seruan presiden dalam optimalisasi pengumpulan zakat. Berdasarkan keputusan tersebut, maka susunan organisasi BAZ dibentuk mulai tingkat Provinsi DKI Jakarta hingga tingkat kelurahan, tugas utamanya adalah mengumpulkan zakat di wilayah DKI Jakarta dan penyalurannya, terutama ditujukan kepada fakir miskin.

Dalam perkembangannya, BAZ DKI Jakarta bertambah kuat secara administrasi kelembagaan dan jangkauan kerjanya. Pada tahun 1973, cakupan kerja BAZ DKI diperluas sehingga menjangkau pengumpulan infak dan sedekah. Dengan demikian nama badan ini diubah menjadi Badan Amil Zakat *Infak* dan *Shadaqah* yang disingkat BAZIS. Perluasan cakupan kerja yang berimplikasi pada perubahan nama ini disebabkan masih belum

optimalnya penghimpunan zakat, masih jauh dari potensi yang ada.

Setelah lahirnya BAZIS, antusiasme terhadap pengelolaan zakat di DKI Jakarta mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan ini, menurut Fauzia (2005), dipengaruhi perubahan iklim politik pada tahun 80-an, di mana kepentingan Islam mulai banyak diakomodasi. Momentum ini kemudian menjadi titik awal pengakuan pemerintah yang lebih luas terhadap praktik dan penerapan hukum-hukum Islam di Tanah Air.

Pengakuan ini tercermin dalam beberapa kebijakan dan aturan yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan Islam, seperti; UU No. 1 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Keppres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta lahirnya media cetak Islam, bank Islam, dan beberapa institusi bernaftakan Islam lainnya. Untuk memberi dasar hukum yang lebih kuat bagi pelaksanaan zakat, Menteri Agama mengeluarkan Instruksi No. 16/ TH.1989 yang kemudian diikuti keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat dan Infak/Sedekah.

Saat Indonesia mengalami transisi demokrasi di tahun 1998, dan menguatnya pengaruh politik Islam di negeri ini, integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional pun mengalami percepatan. Satu tahun setelah reformasi, Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Zakat pun diketuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah. Dalam UU ini, Badan Amil Zakat (BAZ) pemerintah, dan juga Lembaga Amil Zakat (LAZ)



FOTO: GMS / Kantor BAZIS

non-pemerintah diakui dan difasilitasi. BAZIS DKI pun ikut menjadi saksi perubahan sosial politik di Tanah Air. Lembaga ini terus berupaya mengakomodir kebutuhan umat dengan tetap mendukung program dan kebijakan pemerintah. Karenanya, terdapat perubahan pola kerja dan struktur BAZIS sesuai dengan perubahan sosial, khususnya di era reformasi.

Setelah UU Zakat No. 38 Tahun 1999 lahir, BAZIS melakukan penyesuaian struktur organisasi, meski nama yang digunakan tetap BAZIS, bukan BAZDA sebagaimana yang tercantum dalam UU. Secara struktural, BAZIS DKI berada dalam struktur organisasi pemerintah DKI Jakarta. Karena itu, pengurus BAZIS adalah pegawai pemerintah, mulai dari struktur kelurahan, kecamatan, kota, hingga provinsi. Saat itu, pimpinan BAZIS adalah pimpinan pemerintah tertinggi di wilayah. Ketua BAZIS DKI Jakarta adalah Gubernur DKI, Ketua BAZIS kota adalah walikota atau wakil walikota, tingkat kecamatan adalah camat, dan kelurahan adalah lurah.

Struktur dan manajemen BAZIS di masa-masa ini juga mengalami perubahan secara internal sesuai tuntutan perubahan sosial dan politik di tingkat nasional maupun lokal. Misalnya, secara berangsur-angsur, dibentuk majelis pembina dan dewan pengawas dalam struktur organisasi BAZIS DKI. Sistem sentralisasi pun berubah, walau fungsi Ketua BAZIS, yaitu Gubernur DKI tetap signifikan.

Pada tahun 2011, DPR dan pemerintah mengesahkan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang merupakan

amandemen UU No. 38 Tahun 1999. Beleid ini mengamanatkan seluruh BAZDA (termasuk BAZIS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus melakukan penyesuaian paling lambat 5 (lima) tahun setelah UU diterbitkan. Di sisi lain, ada keinginan para pemangku kepentingan di DKI Jakarta untuk dapat mempertahankan nama dan konsep BAZIS seperti yang sudah dijalankan, sehingga terjadi polemik dan tarik ulur tentang perlu tidaknya dilakukan penyesuaian menjadi BAZNAS.

Kajian dan diskusi para pemangku kepentingan dilakukan secara intens untuk mencari titik temu masalah ini. Namun, pada akhirnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan melakukan penyesuaian BAZIS menjadi BAZNAS setelah terjadi kesepakatan antara Pemerintah Provinsi DKI yang diwakili oleh Wakil Gubernur saat itu, Sandiaga S. Uno dengan Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. Bambang Sudibyo. Di antara kesepakatan yang dicapai adalah nama BAZIS tetap dapat melekat mengiringi nama BAZNAS.

Sebagai tindak lanjutnya, pada 28 Februari 2019 dikeluarkanlah Peraturan Gubernur No. 3 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Provinsi DKI Jakarta. Pergub ini dikeluarkan untuk menyesuaikan aturan hukum yang sebelumnya, yaitu Keputusan Gubernur Nomor 120 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Provinsi DKI Jakarta agar sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011.

Dalam kerangka penyelesaian pelaksanaan tugas dan fungsi BAZIS DKI Jakarta, ditetapkan masa transisi yang dipimpin oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat. Tugas Tim Transisi, antara lain memberikan saran dan masukan dalam penyusunan bahan kebijakan terkait pengelolaan zakat pada BAZNAS (BAZIS) untuk diusulkan kepada gubernur. Pada masa transisi dilaksanakan Seleksi Calon Pimpinan BAZNAS (BAZIS) sesuai prosedur.



Berdasarkan Pergub No. 3 Tahun 2019, panel akan bertugas melaksanakan seleksi calon pimpinan BAZNAS (BAZIS). Hasil seleksi nantinya disampaikan kepada gubernur guna mendapatkan pertimbangan. Pada Pasal 6 ayat 4 dikatakan tim seleksi pimpinan BAZNAS (BAZIS) dibentuk paling lambat 10 hari setelah Pergub 3/2019 ini diundangkan. Pergub ini juga memberikan tenggat kepada BAZNAS (BAZIS) untuk menyelesaikan seluruh proses transformasi. Mulai dari inventarisasi dan penyelesaian pengalihan pendanaan, personil, prasarana dan sarana serta dokumen (P3D), inventarisasi dan penyelesaian hak serta kewajiban pihak ketiga atau kontrak-kontrak pihak ketiga dan mitra kerja.

Setelah melewati masa transisi dan dilakukan pemilihan Pimpinan BAZNAS (BAZIS) maka dikeluarkan Keputusan Gubernur 694 Tahun 2019 tentang Pimpinan Baznas (BAZIS)

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2019-2024 yang dilantik pada tanggal 29 April 2019. Pimpinan BAZNAS (BAZIS) DKI terdiri dari Ketua Dr. K.H. A. Lutfi Fathullah, MA, dan 4 orang Wakil Ketua, yakni Dr. K.H. Nur Alam Bakhtir, Saat Suharto, Rini Suprihartanti, SE, M.Si, dan Drs. Achmad H. Abubakar, MM. Sejak itu fase pengelolaan zakat di Provinsi DKI Jakarta dengan nama BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta dimulai.



Foto Pimpinan BAZNAS

B. VISI, MISI, TUGAS DAN FUNGSI

Seiring dengan transformasi lembaga, visi, misi, tugas dan fungsi BAZNAS (BAZIS) juga mengalami perubahan dari masa ke masa. Jika sebelumnya visi BAZIS DKI adalah “menjadi badan pengelola ZIS yang terunggul dan terpercaya”, saat menjadi BAZNAS (BAZIS), visinya berubah “menjadi simpul kolaborasi kebaikan dalam memajukan dan membahagiakan warga Jakarta.” Visi ini senafas dengan slogan DKI Jakarta di masa kepemimpinan Anies R. Baswedan, yaitu “maju kotanya, bahagia warganya.” Juga tagline “Jakarta Kota Kolaborasi” yang menjadi semangat dalam setiap program kerja pemerintah, termasuk BAZNAS (BAZIS).

BAZNAS (BAZIS) menyadari, bahwa sebesar dan sebanyak apapun masalah yang dihadapi umat dan masyarakat, sejatinya bisa diselesaikan jika kita bekerja sama dan berkolaborasi. Karena kita tidak bisa bekerja sendirian, sementara pihak lain pun memiliki semangat yang sama dalam kebaikan, juga memiliki potensi dan sumber daya untuk mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi bersama.

Untuk itu, BAZNAS (BAZIS) memosisikan diri sebagai simpul yang menautkan setiap pihak yang memiliki semangat kebaikan untuk membantu masyarakat dhuafa. Dengan demikian, tujuan untuk membahagiakan warganya bisa terwujud. Jika kebahagiaan warga bisa terpenuhi, maka kemajuan kota akan lebih mudah dicapai.

Untuk mencapai visi itu, BAZNAS (BAZIS) memiliki lima misi utama, yaitu: mewujudkan pengelolaan zakat yang amanah, professional, dan berdayaguna; mendorong partisipasi dan kolaborasi berbagai pihak untuk mencapai kemaslahatan masyarakat; meningkatkan kesadaran umat untuk membayar zakat; memperkokoh dan mengembangkan semangat saling tolong menolong dalam kebaikan; serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan data dan teknologi. Misi ini berubah dari sebelumnya “mewujudkan optimalisasi pengelolaan ZIS yang amanah, profesional, transparan, akuntabel, dan mandiri menuju masyarakat sejahtera, berdaya, dan bertakwa.”



Adapun untuk tugas dan fungsi, seperti yang tercantum pada Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (Perbaznas) No. 03 Tahun 2014 Pasal 2, bahwa BAZNAS Provinsi bertanggung jawab kepada

Baznas dan pemerintah. Kemudian di Pasal 3 dijelaskan bahwa BAZNAS Provinsi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi. Adapun fungsi BAZNAS Provinsi dijelaskan pada Pasal 4 adalah; perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi; pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi; pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi; pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat provinsi; pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional di provinsi.

Perbedaan mencolok dari tugas dan fungsi di atas dengan tugas dan fungsi sebelumnya adalah, pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan lembaga amil zakat (LAZ) berskala nasional di provinsi. Tugas ini merupakan amanat UU Zakat Tahun 2011, yang mensyaratkan LAZ yang akan membuka kantor di tingkat provinsi untuk mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS setempat.

C. TRANSFORMASI PENGHIMPUNAN

Harus diakui, penghimpunan ZIS yang diraih BAZNAS (BAZIS) adalah yang terbesar dari seluruh BAZNAS provinsi di seluruh Indonesia setiap tahunnya. Capaian target penghimpunan setiap tahun pun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Meski dianggap lembaga “plat merah”, BAZNAS (BAZIS) tidak

pernah berhenti berinovasi dalam melakukan kerja penghimpunan ZIS. Berbagai jenis layanan bagi muzaki dan donatur disiapkan untuk memudahkan mereka dalam menunaikan ZIS.

Sumber utama pengumpulan ZIS di BAZIS DKI Jakarta hingga awal tahun 2019 berasal dari potongan zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi DKI Jakarta. Pemotongan ini dilakukan berdasarkan imbauan gubernur melalui instruksi gubernur (ingub). Hal ini wajar, karena BAZIS merupakan bagian integral dari birokrasi pemerintah daerah. Dengan sistem kerja yang terstruktur dan *top-down*, penghimpunan rutin bisa diperoleh. Selain penghimpunan rutin melalui pemotongan gaji ASN, BAZIS DKI juga sering menyelenggarakan event atau kegiatan untuk meningkatkan kesadaran ASN dalam menunaikan infak dan sedekah.

Saat Peraturan Gubernur No. 3 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Provinsi DKI Jakarta dikeluarkan, BAZNAS (BAZIS) tidak bisa langsung melakukan pungutan secara otomatis dari ASN, karena instruksi gubernur yang lama dianggap tidak lagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga pemotongan zakat terhadap ASN tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu pemotongan ZIS dari potongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) ASN DKI Jakarta dihentikan sejak April 2019, sehingga kehilangan potensi penerimaan ZIS sekitar Rp 10 milyar per bulan.

Pembayaran zakat ASN dapat dilaksanakan kembali setelah terbit Instruksi Gubernur Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengumpulan dan Penunaian Zakat Pendapatan bagi Pegawai Negara Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang diterbitkan pada bulan Agustus 2019. Penting untuk dicatat **instruksi ini tidak bersifat otomatis potong, akan tetapi tetap melalui proses pengisian form kesediaan dipotong zakatnya yang ditandatangani oleh ASN.** Untuk itu, sejak Ingub tersebut terbit, tim dari penghimpunan gencar melakukan sosialisasi dan penyebaran formulir ke berbagai satuan kerja di lingkungan pemerintah provinsi untuk pemotongan zakat.

Selain melalui proses struktural, upaya pengumpulan zakat dari masyarakat umum juga dilakukan di semua wilayah DKI Jakarta



Foto: Gubernur tunaikan zakat

hingga ke tingkat RT/RW. Biasanya ada Petugas Operasional (PO) yang ditunjuk di tiap kelurahan dan kecamatan. Metode pengumpulannya melalui voucher infak atau map Gerakan Amal Shadaqoh (GAS) dan Gerakan Amal Ramadhan (GAR). Strategi *canvassing* ini termasuk metode yang cukup lama dijalankan di lingkungan BAZIS DKI.

Seiring proses perubahan di institusi ini, strategi penghimpunan berbasis retail ini juga mengalami transformasi. BAZNAS (BAZIS) mulai menggencarkan komunikasi publik, *canvassing*, dan kerjasama dengan mitra perusahaan/instansi. BAZNAS (BAZIS) juga aktif membuka membuka gerai-gerai layanan pembayaran dalam berbagai event dan momen. Tempat-tempat strategis di Jakarta, seperti mall, pusat perbelanjaan, stasiun, dan obyek wisata juga disasar untuk memudahkan muzaki dan donatur membayar ZIS.

Kini, di tengah arus digital yang semakin deras, BAZNAS (BAZIS) pun melakukan adaptasi dengan melakukan optimasi kanal digital. Sejak tahun 2020, BAZNAS (BAZIS) melahirkan divisi baru, yaitu “Divisi Marketing dan Digital Fundraising”, untuk mengoptimalkan penghimpunan melalui digital.

BAZNAS (BAZIS) aktif melakukan kampanye melalui Facebook Ads, agar menarik warganet berdonasi melalui kanal digital, salah satunya via *landing page* **simpulkebaikan.id**. Terlebih saat pandemi melanda tahun 2020-2022 lalu, di mana masyarakat semakin akrab dengan transaksi digital, dan layanan donasi *online* sangat diminati masyarakat. Selain itu, beberapa platform lain



Foto: Gerai Zakat Bazis

yang juga dimanfaatkan BAZNAS (BAZIS) adalah QRIS, LinkAja Syariah, Kitabisa, dan layanan digital perbankan mitra.

BAZNAS (BAZIS) juga menggandeng berbagai pihak menjadi mitra pengumpul zakat, sebagaimana yang diatur dalam UU Zakat No. 23 Tahun 2011, yang disebut dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk membantu tugas BAZNAS (BAZIS) pada institusi, yayasan, masjid, atau sejenisnya. UPZ ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BAZNAS (BAZIS) atas usulan dari institusi masing-masing. BAZNAS (BAZIS) pun membentuk divisi khusus untuk menjangkau dan menjalin kerja sama dan berkolaborasi dengan berbagai instansi, baik di lingkup pemerintahan Provinsi DKI Jakarta maupun instansi swasta.

UPZ selain sebagai mitra strategis dalam penghimpunan ZIS, juga memiliki fungsi untuk pemberdayaan masyarakat di

lingkungan UPZ. Sehingga memudahkan masyarakat dalam proses penunaian ZIS dan memudahkan dalam merespon kebutuhan mustahik pada lini terkecil masyarakat yang membutuhkan.

Hingga kini sudah tercatat sebanyak 56 UPZ yang tergabung di BAZNAS (BAZIS). Dari jumlah tersebut ada 43 UPZ yang aktif dalam penghimpunan maupun penyaluran ZIS. Semua UPZ tersebut terdiri dari UPZ BUMD sejumlah 8 Unit dan UPZ instansi swasta sebanyak 35 Unit.

Selain pembentukan UPZ pada instansi swasta dan BUMD, BAZNAS (BAZIS) juga menasar instansi internal struktural Pemprov DKI Jakarta, yakni pembentukan Petugas Operasional (PO) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/ Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD). Langkah ini merupakan implementasi Ingub No 46 tahun 2019, dan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 124 Tahun 2019 tentang Optimalisasi Penunaian dan Pengumpulan Zakat Pendapatan ASN di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Terobosan lain di bidang penghimpunan adalah kehadiran layanan muzaki di struktur BAZNAS (BAZIS). Layanan muzaki ini seperti *customer relationship management* (CRM) di sebuah perusahaan. Layanan ini dimaksudkan untuk menjaga hubungan baik antara lembaga dengan para donaturnya. Pada tahun 2020, layanan muzaki BAZNAS (BAZIS) Jakarta telah memperbaiki layanan kepada muzaki, yaitu dengan memberikan notifikasi kepada para muzaki. Pemberian notifikasi ini menggunakan 2 cara, yaitu menggunakan SMS Blasting dan WA notifikasi.

Sejak diluncurkan, layanan ini mendapat sambutan positif. Donatur atau muzaki merasa lebih dekat dan akrab dengan lembaga, karena mereka kerap disapa baik itu berupa doa & ucapan terima kasih saat menunaikan zakat, juga penyampaian informasi dan program lembaga. Selain itu, layanan muzaki ini juga menyediakan layanan konsultasi zakat, selalu memberikan pelayanan prima dan memberikan respon cepat kepada keluhan muzaki, baik untuk penghitungan zakat maupun terkait komplain terhadap pemotongan ZIS.

D. TRANSFORMASI PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN

Kebijakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, baik yang konsumtif maupun produktif, dibuat dengan mempertimbangkan waktu dan konteks sosial-ekonomi. Pada tahun 1969, terdapat tiga sasaran pendayagunaan, yaitu pemberian bantuan untuk fakir miskin (67%), bantuan infrastruktur *fi sabilillah* (20%), dan operasional amil (13 %). Persentase bantuan ini berubah-ubah seiring waktu. Sebagai contoh, pada tahun 1973, bantuan untuk *fi sabilillah* mendapat porsi besar, yakni 66 % dan 1984 sebanyak 82 %. Terjadinya fluktuasi persentase pendistribusian dan pendayagunaan ZIS bagi fakir miskin dan sabilillah ini lebih banyak dipengaruhi kondisi sosial-ekonomi ketika itu. Pada tahun 1970-an, bantuan lebih diarahkan pada proyek-proyek pembangunan dan pengembangan, mengikuti ideologi developmentalisme pemerintah saat itu (Fauzia, 2005).

Dalam perkembangannya, kategorisasi pendayagunaan ini mengacu pada kategori sektoral, yaitu pendidikan, ekonomi, dan sosial keagamaan. Hanya saja, latar belakang mustahik atau penerima manfaat, tetap mengacu pada terminologi delapan asnaf zakat, seperti yang diatur dalam Alquran Surat At-Taubah ayat 60. Adapun untuk pendayagunaan dana infak atau sedekah lebih fleksibel karena tidak ada ketentuan khusus yang mengatur secara detail untuk pemanfaatannya.

Dalam menyalurkan dana ZIS, BAZNAS (BAZIS) membagi dua kategori program, yaitu pendistribusian, dan pendayagunaan. Pendistribusian adalah penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk konsumtif. Beberapa model pendistribusian bantuan ini antara lain berupa: pendistribusian bantuan langsung, pendistribusian kemitraan, dan layanan aktif.

Pendistribusian bantuan langsung dilakukan di kantor layanan, baik yang berada di kantor pusat maupun di tingkat kota atau kelurahan. Masyarakat yang tergolong asnaf mengajukan langsung melalui kantor layanan. Setelah melalui proses penilaian, mereka akan mendapatkan bantuan sesuai yang diajukan. Referensi lembaga masyarakat, atau institusi pemerintah terdekat menjadi prasyarat utama dalam penyaluran bantuan langsung ini.

Adapun pendistribusian melalui kemitraan adalah program penyaluran yang melibatkan institusi di luar BAZNAS (BAZIS), atau lembaga pemberdayaan lain yang memiliki kemampuan dan ketrampilan sesuai dengan programnya. Sebagai contoh adalah



Foto: KSBB

program solidaritas sosial KSBB (Kerjasama Sosial Berskala Besar) bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Lembaga-lembaga/Perusahaan lain seperti : JNE, Tokopedia, Indosat, PT. Bank DKI, PT Jantra Swarna Dikta, PT. Prima Power Nusantara, PT. Papros, MKKS dan Rumah Yatim. Juga respon tanggap bencana sebagai bentuk kehadiran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menanggulangi kemiskinan karena kebencanaan dengan pola bantuan dan bersinergi dengan BAZNAS (BAZIS).

Selain pola penyaluran di atas, BAZNAS (BAZIS) juga memiliki unit Layanan Aktif yang berada di bawah BAZNAS (BAZIS) Tanggapan Bencana (BTB). Unit ini dibentuk untuk merespon kebutuhan masyarakat yang bersifat darurat seperti kejadian bencana alam, kebakaran, dan yang lainnya.

Adapun penyaluran dengan model pendayagunaan adalah penyaluran dana zakat atau ZIS bagi penerima manfaat untuk usaha secara produktif sehingga mendatangkan manfaat secara ekonomi. Pendayagunaan adalah bentuk pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam membentuk usaha produktif, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umum.

Melalui model pendayagunaan ini, masyarakat ikut berperan aktif dalam program sebagai subyek. Mereka diberi bantuan agar potensi yang dimilikinya dapat dioptimalkan sehingga bisa menopang dan menunjang kehidupan dirinya dan keluarganya. Berbeda dengan program berbasis pendistribusian yang menysasar individu, program pendayagunaan menysasar kelompok. Tujuannya agar terbentuk komunitas yang bisa melahirkan bisnis swadaya berbasis potensi lokal. Selain itu, keunggulan pemberdayaan berbasis kelompok juga lebih efisien dari sisi biaya program.

Secara keseluruhan, program yang dijalankan BAZNAS (BAZIS) tergabung dalam lima pilar, yaitu: ekonomi (Jak B Berdaya), keagamaan (Jak B Bertaqwa), pendidikan (Jak B Cerdas), lingkungan (Jak B Green), dan kesehatan (Jak B Sehat). Masing-masing pilar ini memiliki berbagai program yang sesuai dengan sektor di atas, baik konsumtif maupun produktif.

Program-program yang dijalankan BAZNAS (BAZIS) juga dijalankan sebagai respon atas berbagai masalah yang masih dihadapi masyarakat, khususnya umat Islam Jakarta. Masalah-

masalah seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan bencana alam menjadi pijakan utama agar program pendistribusian dan pendayagunaan berjalan tepat sasaran.

Jak B Berdaya

Jak B Berdaya adalah program pemberdayaan ekonomi dan membangun kepekaan sosial kepada masyarakat berupa pemberian bantuan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga melalui ketrampilan produktif, sarana usaha dan permodalan, serta pemberian santunan dan kafalah kepada fakir dan miskin. Pelaksanaan program ini bertujuan meningkatkan martabat keluarga kurang mampu dengan model berkelompok maupun perorangan. Meningkatkan akses pembiayaan yang sebelumnya hanya terbatas pada usaha rumah tangga dan jenis usaha mikro lainnya sehingga dapat mempercepat pengembangan sektor riil. Misi jangka panjang program ini adalah mendorong tumbuhnya wirausahawan baru melalui pengembangan komunitas usaha supermikro dengan prinsip pengelolaan keuangan syariah.

Beberapa program pendayagunaan yang berada di dalam sektor ini antara lain: Zmart, Saudagar Tangguh, Difabis, Bagi i-Piring (Semua Bisa Makan) dan Pesantren Tahfidz Difabel. Adapun program pendistribusiannya antara lain: kafalah yatim, bantuan kurban, bantuan alat bantu dengar, pemberian kuris roda, bantuan kaki palsu, dan yang lainnya.

Jak B Bertaqwa

Jak B Bertaqwa adalah program dakwah berupa kegiatan syiar Islam dalam rangka menanggulangi kemunduran/keterbelakangan nilai-nilai agama dalam masyarakat akibat dari kurangnya atensi dan perhatian masyarakat terhadap nilai-nilai agama. Program ini dilakukan dengan cara membangun pengetahuan maupun infrastruktur, menumbuhkan kembali nilai-nilai agama, dan membangun budaya yang islami kepada masyarakat.

Misi jangka panjang program ini adalah mengokohkan peran zakat terhadap syiar islam melalui revitalisasi dan pembangunan pusat layanan pemberdayaan umat. Beberapa program yang masuk dalam sektor ini adalah: Pendidikan Dasar Ulama (PDU), Masjid Award, Santunan Dai, bantuan PHBI, syiar dakwah dengan berbagai instansi dan komunitas, festival Ramadhan, pemulasaraan jenazah dan yang lainnya.

Jak B Cerdas

Jak B Cerdas adalah program pendidikan berupa pemberian bantuan penunjang pendidikan untuk penerima manfaat yang berasal dari keluarga miskin dan rentan atau anak yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Selain itu juga program kaderisasi pemuda pelajar dan mahasiswa yang mandiri menggunakan sarana penyaringan dengan lomba proposal bisnis, melatih pelajar untuk bekerjasama dan

menjadi bagian dari masyarakat yang suka memberi, tangan diatas, pemberi solusi kepada masyarakat.

Misi jangka panjang dari program ini adalah menjadikan pelajar atau mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin menjadi profesional yang andal dan enterpreur yang tangguh, serta memiliki kopetensi yang spesifik agar dapat berkompetisi di dalam dunia kerja. Selain itu mereka dilatih dan diasah untuk memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan sosial, serta menjadi relawan dalam kegiatan -kegiatan BAZNAS (BAZIS).

Beberapa program yang masuk dalam pilar ini adalah Jak Bee (Business Entrepreneur Empowerment), Beasiswa SMA, Beasiswa Mahasiswa MDJ (Masa Depan Jakarta), Hackathon, dan bantuan penelitian untuk mahasiswa S2 dan S3.

Jak B Green

Jak B Green adalah program sosial berorientasi pada perbaikan lingkungan serta menyiapkan wilayah binaan menjadi subyek terhadap perbaikan yang lebih baik. Kegiatan program ini antara lain penataan kampung/lingkungan dalam kategori kumuh menjadi lingkungan yang lebih layak di wilayah Jakarta. Program yang termasuk di dalamnya adalah bedah rumah dan bedah Kawasan.

Dalam program tersebut juga membangun rumah untuk kategori dhuafa dan memberikan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat miskin Jakarta namun juga lingkungan tempat

tinggal. Misi jangka panjang program ini adalah mewujudkan aksi peduli dalam program kemanusiaan dan pemberdayaan lingkungan melalui komunitas binaan berbasis potensi lokal.

Jak B Sehat

Jak B Sehat adalah program kesehatan yang bertujuan memberikan bantuan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh masyarakat miskin Provinsi DKI Jakarta untuk dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera. Misi program jangka panjangnya adalah memberikan bantuan kesehatan untuk masyarakat tidak mampu dan mengupayakan berdirinya rumah sehat.

Beberapa program yang termasuk dalam pilar ini adalah; bantuan pengobatan, peningkatan gizi mustahik, berbagi susu dan madu (Basuma), dan yang lainnya.

BAZNAS (BAZIS) Tanggap Bencana (BBTB)

Untuk merespon kejadian bencana yang kerap terjadi, BAZIS (BAZNAS) juga memiliki unit khusus yang bernama BAZNAS (BAZIS) Tanggap Bencana (BBTB). Divisi ini dibentuk untuk merespon kejadian bencana agar dapat menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana

Unit ini juga bertugas mengurangi dampak bencana yang mengakibatkan kemiskinan dan menekan risiko keterparahan kemiskinan akibat bencana. BBTB juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Pengurangan Risiko Bencana (PRB) melalui edukasi; menangani korban bencana melalui tahapan Rescue, Relief, Recovery, Recontruction; serta menumbuhkan jiwa kerelawanan di masyarakat, menguatkan kapasitas dan membangun jaringan relawan.



BAB IV

SIMPUL KOLABORASI KEBAIKAN

Jakarta Kota Kolaborasi dan Kreasi. Itulah *tagline* yang diusung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan Kota Jakarta sebagai kota yang maju dan sejahtera. Sebagai kota kolaborasi dan kreasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selalu melibatkan partisipasi warga dari semua lapisan masyarakat untuk membangun kota Jakarta.

Melalui *tagline* “Kota Kolaborasi dan Kreasi”, Jakarta diharapkan menjadi City 4.0 di mana pemerintah berperan sebagai penyedia platform dan warga sebagai *co-creator*. Sebagai penyedia platform, Pemprov DKI Jakarta menyediakan data kebutuhan, sebagai narahubung di lokasi, misalnya dengan pengurus RW atau kelurahan, serta memfasilitasi pemberian bantuan. Dengan menjadi City 4.0, kota Jakarta diharapkan dapat menciptakan kultur berbagi gagasan dan ekosistem yang saling mendukung antara pemerintah dengan warganya.

Menuju Jakarta sebagai kota kolaborasi, Pemprov DKI Jakarta mengajak warga bersama-sama menciptakan perubahan, inovasi, dan menorehkan sejarah baru. Hal itu dilakukan dengan menyambut semua orang yang ingin berkolaborasi dalam membangun kota. Dari warga, penghuni baru, pengunjung, hingga komunitas dari segala usia, pekerjaan, ras, latar belakang sosial dan ekonomi. Pemprov DKI Jakarta juga memfasilitasi berbagai informasi, ide, serta peran untuk berkolaborasi demi mencapai tujuan kota.

Bahkan, sejak dari proses perencanaan, Pemprov DKI telah melibatkan masyarakat untuk berkolaborasi. Perencanaan

partisipatif yang diterapkan di Provinsi DKI Jakarta ini mengedepankan pemberian peluang kepada masyarakat yang seluas-luasnya sehingga dapat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan secara *bottom-up* bagi kepentingan bersama. Untuk itu, titik berat dari perencanaan partisipatif tersebut diarahkan pada penggerakan seluruh sumber daya yang ada di masyarakat. Masyarakat diajak untuk berkolaborasi sesama warga melalui penggerakan partisipasi masyarakat dalam wadah filantropi, *corporate social responsibility* (CSR), swadaya masyarakat dan lain-lain.

Dalam rangka mendorong tumbuhnya peran serta masyarakat tersebut, dilakukan pendampingan bagi masyarakat pada level komunitas atau rukun warga (RW) pada proses Musrenbang dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Dengan adanya pendampingan bagi proses Musrenbang, diharapkan mampu menjawab permasalahan yang ada di level komunitas secara lebih riil, sekaligus dapat diselaraskan dengan target dan prioritas daerah. Pendampingan dimaksud dilakukan oleh kader-kader yang berasal dari masyarakat setempat, yang diharapkan mengerti akan kondisi, permasalahan, dan potensi lingkungannya masing-masing.

Salah satu contoh nyata menuju kota kolaborasi, dalam menghadapi pandemi Covid-19, Pemprov DKI Jakarta meluncurkan Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) melalui Jakarta Development Collaboration Network (JDCN). KSBB ini dikelola oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19

Provinsi DKI Jakarta. Dengan program tersebut, Pemprov DKI mengajak masyarakat untuk saling menguatkan dan meringankan beban. Masyarakat yang ingin membantu difasilitasi agar bantuannya diterima masyarakat lain yang membutuhkan.

KSBB dirancang untuk memudahkan donatur mencari calon penerima bantuan melalui data terbuka yang disediakan Pemprov DKI di situs corona.jakarta.go.id. Sehingga selain tepat sasaran, bantuan juga tidak tumpang tindih. Hal itu dapat dilakukan karena data bantuan dapat diakses publik sehingga tercipta pemerataan distribusi bantuan.

Awalnya, ada empat program KSBB yang dirancang pemprov DKI Jakarta, yakni KSBB Pangan, KSBB Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM), KSBB Pendidikan, dan KSBB Penataan Pemukiman.

Dalam KSBB Pangan yang dimulai sejak bulan April 2020 lalu, donatur dapat memberi bantuan berupa sembako, makanan siap saji, paket lebaran, dan paket THR. Kriteria penerima bantuan mirip dengan penerima bantuan sosial selama PSBB.

Sedangkan dalam KSBB UMKM, Pemprov DKI memfasilitasi pelatihan, prasarana, hingga permodalan. Tujuannya, agar para pelaku UMKM dapat kembali beraktivitas, dan mampu bertahan di tengah pandemi lewat pelatihan yang disampaikan secara *online* dan *offline*.

Sementara KSBB Pendidikan dirancang untuk membantu tenaga pengajar dan siswa dalam menjalani program Pembelajaran

Jarak Jauh (PJJ). Melalui program ini, baik siswa maupun tenaga pengajar yang terhalang keterbatasan gawai akan mendapat bantuan berupa ponsel pintar atau tablet untuk peserta didik, serta komputer atau laptop kepada para pendidik.

Terakhir, KSBB Penataan Pemukiman merupakan program yang mempertemukan donatur yang ingin berkontribusi di kawasan kumuh di DKI Jakarta. KSBB ini berfokus pada penyediaan sarana dan prasarana di lingkup Rukun Warga (RW) padat penduduk di DKI Jakarta.

Sepanjang tahun 2020, sebanyak 224 kolaborator dipastikan berpartisipasi dalam program KSBB, yakni 143 kolaborator di KSBB Pangan dan 81 kolaborator di KSBB UMKM. Pemprov DKI Jakarta juga menggandeng sembilan lembaga kemanusiaan dan dua perusahaan teknologi finansial untuk membangkitkan UMKM dari keterpurukan akibat Covid-19.

BAZNAS (BAZIS) memainkan peranan signifikan dalam program KSBB ini. Total lebih dari Rp 17 miliar nilai bantuan yang digalang BAZNAS (BAZIS) untuk membantu masyarakat melalui kolaborasi kolosal ini selama masa pandemi. Berbagai entitas, baik sosial maupun bisnis juga memberikan kepercayaan mereka melalui BAZNAS (BAZIS) untuk menyalurkan bantuan yang dibutuhkan masyarakat yang terkena dampak pandemi. Bersama unsur pemerintah provinsi, BAZNAS (BAZIS) juga berbagai lembaga filantropi lainnya, bahu-membahu membantu masyarakat, baik di bidang pangan, pendidikan, maupun pemukiman.



Foto: BAZIS Serahkan bantuan KSBB

Senafas dengan semangat yang dicanangkan pemerintah, BAZNAS (BAZIS) juga menjadikan kolaborasi sebagai nilai utama. Bahkan, sejak tahun 2019, BAZNAS (BAZIS) mengubah visinya “menjadi simpul kolaborasi kebaikan dalam memajukan dan membahagiakan warga Jakarta.”

BAZNAS (BAZIS) juga menyadari, bahwa sebesar dan sebanyak apapun masalah yang dihadapi umat dan masyarakat, sejatinya bisa diselesaikan jika kita bekerja sama dan berkolaborasi. Karena kita tidak bisa bekerja sendirian, sementara pihak lain pun memiliki semangat yang sama dalam kebaikan, juga memiliki potensi dan sumber daya untuk mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi bersama.

Untuk itu, BAZNAS (BAZIS) memosisikan diri sebagai simpul yang menautkan setiap pihak yang memiliki semangat kebaikan untuk membantu masyarakat dhuafa. Dengan demikian, tujuan

untuk membahagiakan warganya bisa terwujud. Jika kebahagiaan warga bisa terpenuhi, maka kemajuan kota akan lebih mudah dicapai.

Untuk itu, semangat kolaborasi terinternalisasi dalam setiap program yang dijalankan BAZNAS (BAZIS). Sebagai contoh, program Semua Bisa Makan (SBM) yang sebelumnya bernama Bagi i-Piring yang diinisiasi BAZNAS (BAZIS), melibatkan banyak pihak, mulai dari pengembang aplikasi, pemilik warung makan, dan perusahaan.

Mereka berbagi peran dalam program ini sesuai kapasitasnya. Pengembang aplikasi membangun platform berbasis android, yang memungkinkan pemilik warung memindai voucher atau kartu yang ditukarkan oleh masyarakat penerima bantuan atau manfaat. Pemilik warung bertugas menyiapkan makanan bagi masyarakat, dan perusahaan berperan sebagai penyandang dana untuk berjalannya program ini.

Dalam program Masjid Tanggap Bencana, BAZNAS (BAZIS) melibatkan secara aktif, ratusan masjid di seluruh wilayah DKI Jakarta. Mereka menjadi simpul dan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat yang mengalami musibah dan bencana.

Pun demikian dalam program Difabis. BAZNAS (BAZIS) tidak bekerja sendirian. Dari sisi tempat, pihak pemerintah yang menyediakan. Dari sisi tenaga pendamping, ada relawan yang diberdayakan. Sementara dari penerima manfaat, ada komunitas penyandang disabilitas yang dilibatkan.

Intinya, kini bukan saatnya jalan sendiri dan tonjolan egosentrisme. Kini saatnya kerja sama dan kolaborasi.



BAB V

TRANSFORMASI PROGRAM; INOVASI BERDAYAKAN UMAT

Tidak dapat dipungkiri, selama ini, kesan yang muncul terhadap badan pengelola zakat pemerintah adalah birokratis, tidak inovatif, dan kolot. Program-program yang dijalankan lebih banyak seremonial dan tidak substantif. Ada gurauan di kalangan pengelola zakat, bahwa program yang dijalankan badan zakat pemerintah banyak yang bernunasa “wadi’ah”—istilah dalam akad muamalah yang terkait dengan titip-menitip barang—karena sering kali program dijalankan berdasarkan pesanan atau titipan.

Menjadi tantangan tersendiri bagi kami, para pimpinan baru di BAZNAS (BAZIS) ketika mendapatkan amanah di lembaga ini. Maka salah satu cara untuk mengubah stigma itu adalah dengan melahirkan program-program baru yang inovatif. Keberadaan program ini bukan bermaksud menihilkan program lama yang telah ada lebih dahulu, melainkan untuk melengkapi dan memperkaya layanan yang dapat diberikan kepada masyarakat.

Semakin inovatif program yang kami lahirkan, semakin baik citra lembaga di mata masyarakat. Semakin baik citra, semakin besar amanah yang dititipkan para donatur melalui lembaga. Dengan demikian, semakin banyak masyarakat yang terbantu.

Inovasi program yang dilahirkan harus benar-benar menjawab kebutuhan riil penerima manfaat kelompok sasaran. Inovasi bukan sekedar “gaya-gayaan” supaya terlihat keren dan viral, tapi minim substansi. Karena, selama ini banyak program yang dilahirkan memiliki kesan “wah” dan hebat, ternyata tidak bisa berjalan berkesinambungan. Lebih parahnya lagi, program tersebut tidak



berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat, alih-alih bisa dinilai keberhasilannya.

Untuk itu, dalam melahirkan program inovatif, baik pendistribusian maupun pemberdayaan, kita tidak boleh mengabaikan kajian dan analisis yang mendalam. Karena program yang akan kita jalankan harus benar-benar menjawab masalah yang dihadapi oleh masyarakat kelompok sasaran. Sehingga setiap rupiah amanah yang ditiptkan donatur kepada kami, bisa memberdayakan dan tentu pula dipertanggungjawabkan.

Salah satu perangkat yang kami gunakan dalam melakukan desain, perencanaan, monitoring, dan evaluasi program adalah *logic model*. Perangkat cukup populer khususnya bagi kalangan perencana dan peneliti yang bekerja dalam mendesain, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program pembangunan dan proyek-proyek sosial yang didanai pemerintah, lembaga

penyandang dana, serta perusahaan swasta. *Logic model* juga menjadi alat untuk menceritakan kinerja program dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan: apa yang ingin dicapai dan mengapa program tersebut dianggap penting; bagaimana mengukur efektifitasnya; dan bagaimana melakukannya dengan benar.

A. LOGIC MODEL

Logic model adalah gambar visual logis suatu program yang menunjukkan rangkaian hubungan sebab-akibat antara **input, aktivitas, output dan outcome** yang diharapkan di masa yang akan datang sebagai respon atas permasalahan yang dihadapi pada saat ini. *Logic model* adalah metode visual untuk menyajikan ide; suatu cara untuk menggambarkan dan memberikan pemahaman tentang hubungan atau koneksi antar elemen penting dalam pelaksanaan program atau upaya perubahan pada kelompok sasaran.

Urgensi *logic model* adalah karena tidak banyak pihak yang memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana sebuah program berjalan. Oleh karena itu, *logic model* dibuat untuk dapat membantu: mengeksplisitkan apa yang diketahui mengenai program dan mengklarifikasi bagaimana program dijalankan (dioperasikan). Selain eksekusi yang luar biasa, efektivitas organisasi pada akhirnya memerlukan desain, perencanaan, pengawasan,

dan langkah-langkah sukses. *Logic model* dapat berkontribusi terhadap kualitas semua ini.

Konsep inti *logic model* adalah:

1. **Planning** : *Logic model* menyajikan kerangka untuk perencanaan yang menjembatani *gap* antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan.
2. **Program management** : *Logic model* digunakan untuk menjelaskan, menelusuri, serta mengendalikan proses dan fungsi
3. **Evaluation** : *Logic model* membantu menentukan kapan dan bagaimana evaluasi dijalankan sehingga sumber daya bisa dikatakan telah efektif dan efisien penggunaannya
4. **Communication** : *Logic model* membantu mengkomunikasikan suatu program baik kepada pimpinan, staf, pemberi dana, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dengan menggunakan *logic model* yang sistematis ketika mendesain, merencanakan, mengkomunikasikan, serta mengevaluasi, maka hal tersebut akan memberikan kontribusi baik bagi individu maupun organisasi. Dengan membuat *logic models* akan membantu semua yang terlibat berpikir tentang apa yang mereka lakukan, apa yang ingin mereka capai, dan apa yang perlu mereka lakukan untuk menyelesaikan semua hal penting.

Logic model menunjukkan hubungan antara sumber daya yang digunakan (*input*), aktivitas yang dilakukan (proses), produk yang dihasilkan (*output*) dan manfaat yang diperoleh (*outcome*). *Logic model* juga dapat mencakup: pernyataan masalah (*problems statement*) – mengapa layanan atau program diperlukan; tujuan (*goal*) – tujuan keseluruhan; asumsi – dasar untuk ide-ide (*the basis for the ideas*); rasional – informasi dalam model.



a. Kapan Logic Model Digunakan?

Logic model bisa digunakan untuk program baru, yakni membantu memperjelas cara sebuah program menyelesaikan masalah dalam batasan asumsi tertentu; serta membantu dalam mengembangkan sistem pengukuran dan evaluasi kinerja. Selain itu *logic model* juga bisa digunakan pada program yang sudah ada, yakni membantu memahami dan menguji asumsi-asumsi yang melandasi program yang sedang berjalan. Jadi walaupun *logic models* cenderung digunakan untuk merencanakan program baru, tetapi juga dapat digunakan dalam fase perencanaan, implementasi maupun fase peninjauan.

b. Manfaat Logic Model

Manfaat dari *logic model* adalah mengilustrasikan jalan pikir program atau kegiatan secara masuk akal. Model ini memberikan perhatian intensif pada hubungan yang paling penting antara tindakan-tindakan dan hasil. Membangun pemahaman bersama di antara staff dan dengan para pemangku kepentingan. Membantu staff dalam mengelola hasil dan menginformasikan desain program serta menemukan gap dalam logika program dan bekerja untuk menyelesaikannya.

Manfaat *logic model* adalah menggambarkan alur logika program dan kegiatan; memberikan penekanan pada hubungan yang paling penting antara tindakan dan hasil; membangun pemahaman bersama di berbagai level organisasi dan para pemangku kepentingan; membantu dalam mengelola hasil dan menginformasikan desain program; menemukan gap dalam logika program dan kemudian menyelesaikannya.

c. Elemen Logic Model

Logic model memiliki beberapa bagian yaitu :

1. Situation

Situasi merupakan keadaan yang kompleks dari lingkungan, sosiopolitik dan ekonomi. Situasi dapat berupa suatu masalah atau isu yang dijadikan sebagai dasar dalam pengembangan model logika. Situasi merupakan

pernyataan yang menjelaskan relevansi program, termasuk deskripsi masalah dan siapa yang terpengaruh, serta menetapkan baseline untuk perbandingan pada akhir intervensi (kondisi sebelum dan sesudah). Pada saat melakukan *brainstorming*, pikirkan mengapa itu menjadi masalah dan untuk siapa.

Contoh pertanyaan yang dapat dikemukakan untuk memahami situasi antara lain: Apa masalahnya?; Apa penyebabnya?; Pada siapa masalah tersebut terjadi?; Apa yang kita ketahui terkait masalah tersebut?; Adakah hasil riset dan pengalaman masa lalu yang dimiliki?; Pelajaran apa yang dapat dipetik darinya? Jawaban atas pertanyaan tersebut merupakan landasan untuk menyusun *logic model*.

2. Priorities

Setelah situasi dan masalah dianalisis, dilakukan situasi mana yang mendapat perhatian intensif. Dengan kata lain, dalam pengembangan *logic model* diperlukan prioritas dari situasi yang kompleks. Faktor dalam menentukan prioritas antara lain visi dan misi, nilai-nilai, sumber daya, data historis dan keahlian dan pengalaman.

3. Input

Input merupakan semua sumber daya yang dikuasai organisasi dan masih perlu diproses sehingga dapat bermanfaat dalam menghasilkan *output* dan *outcome*.

Input adalah apa yang kita investasikan, baik berupa sumber daya maupun kapasitas yang dimasukkan ke dalam intervensi, termasuk sumber daya manusia baik berupa waktu staf dan atau relawan, pengetahuan, keterampilan atau keahlian; sumber daya keuangan; fasilitas dan peralatan yang diperlukan untuk mendukung program; dan kemitraan/kolaborasi yang terlibat dalam intervensi.

Perincian input membantu membuat perbandingan investasi aktual dengan investasi yang direncanakan, yang dapat digunakan untuk meningkatkan program masa depan dan penetapan anggaran. Menetapkan input memungkinkan kita untuk meng-inventarisasi apa yang sudah dimiliki dan apa diperlukan untuk melaksanakan program.

4. Output

Output merupakan produk langsung dari sebuah kegiatan dalam suatu program yang diharapkan akan berkontribusi pada *outcome*. *Output* adalah apa yang kita tawarkan. *Output* juga dapat dipahami sebagai kegiatan, layanan, event, dan produk yang menjangkau kelompok sasaran. *Output* mengarah pada *Outcome*. *Output* meliputi aktivitas dan partisipasi. Aktivitas adalah apa yang kita lakukan; apa yang program lakukan dengan sumber daya untuk mencapai hasil. Aktivitas adalah proses dan tindakan yang terjadi.

Di dalam *output* juga dipaparkan siapa yang dijangkau oleh program, yang masuk dalam kategori partisipasi. Partisipasi mengacu pada orang atau sekelompok orang, yang kegiatannya akan memberikan dampak, yakni kelompok sasaran program dan juga kelompok sasaran lainnya atau individu yang direncanakan untuk berinteraksi.

Pada beberapa *logic model*, penulisan *activity* terpisah dari *output*. Pada model ini, *output* didefinisikan sebagai produk dari kegiatan/ *activity*. Hal ini biasanya ditulis untuk memasukkan angka, misalnya, jumlah pelatihan, atau jumlah peserta yang menghadiri sebuah pelatihan. Istilah *output* dan *outcome* umumnya sering membingungkan. Perbedaan utama adalah bahwa *output* berhubungan dengan apa yang kita lakukan, sedangkan *outcome* mengacu pada hasil atau perubahan yang telah dibuat oleh program.

5. Outcome

Outcome merupakan perubahan atas suatu kondisi, perilaku, sikap, pengetahuan dan keterampilan dari kelompok sasaran program atau penerima manfaat, yang mengindikasikan kemajuan atau justru kemunduran terhadap visi dan tujuan dari program.

Outcome adalah apa yang dihasilkan. *Outcome* adalah perubahan atau manfaat spesifik bagi kelompok sasaran

program. *Short-term outcomes* mengacu pada perubahan langsung atau awal; *intermediate outcome* adalah perubahan titik tengah; dan *longterm outcome* mengacu pada hasil akhir, atau dampak. Dengan kata lain secara dimensi waktu, ada tiga jenis *outcome*, yakni :

- a) *Outcome* berdimensi jangka pendek menunjukkan hasil perubahan pembelajaran (*learning*) dan dapat dicapai dalam waktu 1 sampai dengan 3 tahun.
- b) *Outcome* jangka menengah menunjukkan hasil perubahan tindakan (*action*) dan dapat dicapai dalam waktu 4 sampai dengan 6 tahun.
- c) *Outcome* jangka panjang menunjukkan hasil perubahan kondisi dari suatu organisasi, partisipan atau sistem secara umum.

Biasanya ada hubungan “jika-maka” antara outcome: jika *short-term outcome* terjadi, maka diharapkan tercapai *intermediate outcome*. Jika *intermediate outcome* terjadi, maka diharapkan tercapai *longterm outcome*. Outcome biasanya saling terkait dan saling bergantung, seperti halnya kesuksesan jangka panjang dibangun di atas kesuksesan sebelumnya.

6. Assumptions

Asumsi merupakan anggapan dasar terkait dengan program dan pihak yang terlibat di dalamnya yang mendasari dan mempengaruhi pengambilan keputusan.

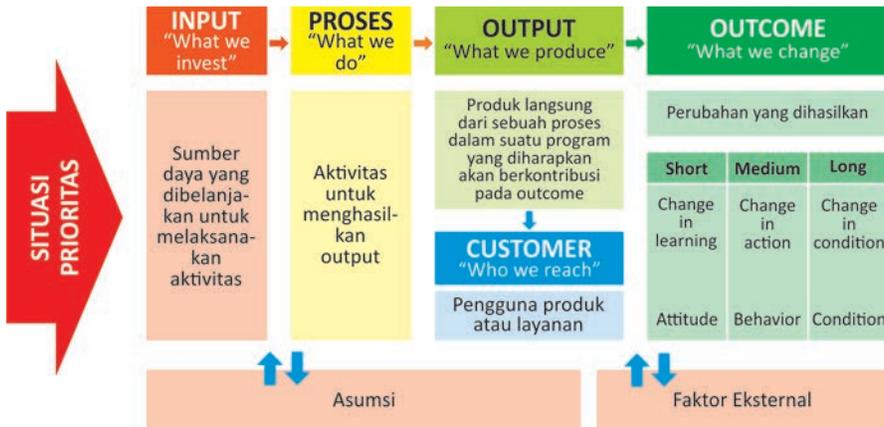
Asumsi dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip, keyakinan atau ide-ide mengenai masalah dan situasi, sumber daya dan staf, cara kerja program, hasil dari program, basis pengetahuan, lingkungan internal dan eksternal serta partisipan. Ketidakakuratan asumsi kerap kali menimbulkan kegagalan suatu program.

Asumsi membuat kita berpikir tentang bagaimana dan mengapa strategi akan berhasil di kelompok sasaran program. Asumsi ini seharusnya tentang masalah, atau bagaimana program akan beroperasi, termasuk asumsi tentang sumber daya, staf, basis pengetahuan, dan peserta. Saat melakukan brainstorming, pikirkan tentang apa yang Anda ketahui versus apa yang Anda asumsikan tentang masalah dan program Anda.

7. **External Factors**

Faktor eksternal mencakup semua hal di luar kendali pengelola program yang memiliki pengaruh besar dalam pencapaian outcome. Eksistensi faktor eksternal dapat mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dalam mencapai tujuan sebuah program. Faktor-faktor eksternal meliputi lingkungan kultural, struktur ekonomi, pola demografi, lingkungan politik, pengaruh media, latar belakang dan pengalaman partisipan, perubahan peraturan, kebijakan prioritas dan sebagainya.

External factor adalah kondisi di mana program hanya memiliki kontrol yang kecil, seperti faktor politik, ekonomi, budaya, sumber daya, dll. *External factor* mesti menjadi pertimbangan karena bisa mempengaruhi pelaksanaan program dan pencapaian hasil yang diinginkan.



Pengembangan *logic model* ada dua pola yakni *backward mapping* dan *forward mapping*. *Backward mapping* dimulai dari *long-term outcomes* kemudian bergerak ke belakang atau yang disebut dengan menggunakan pendekatan kanan ke kiri. Sedangkan *forward mapping* dimulai dari *output* atau *short-term outcomes* kemudian bergerak ke depan atau yang disebut menggunakan pendekatan kiri ke kanan.

Pengembangan *logic model* dalam kajian ini menggunakan pendekatan kiri ke kanan (*left-to-right approach*). Pendekatan ini dipilih karena program-program penyaluran BAZNAS (BAZIS), baik pada program pendistribusian maupun pendayagunaan, telah diimplementasikan namun belum memiliki *logic model*.

Pendekatan ini dimulai dengan merumuskan input dan aktifitas atau kegiatan program. Selanjutnya bergerak ke kanan dengan mengajukan pertanyaan “mengapa”. Pendekatan ini seperti rangkaian hubungan “*If, Then*”

Verifikasi dilakukan selama proses penyusunan *logic model* menggunakan rangkaian pertanyaan “*If-Then*”. Jika terdapat hubungan yang tidak logis dalam rangkaian *if-then* tersebut maka langsung diperiksa dan diperbaiki dengan yang lebih sesuai. Setelah model selesai dibuat selanjutnya verifikasi akhir oleh penanggung jawab dan pelaksana program melalui diskusi terbatas. Panduan untuk melakukan verifikasi akhir model menggunakan acuan pertanyaan yang dikembangkan oleh McLaughlin and Jordan (1999). Keempat pertanyaan tersebut adalah: (a) apakah tingkatan dalam model telah cukup dalam memberikan pemahaman tentang elemen-elemen dan keterkaitannya, (b) apakah model logika telah lengkap, (c) apakah semua elemen telah logis dan apakah masih ada jalur lain yang logis untuk mencapai hasil program, dan (d) apakah seluruh faktor luar telah diidentifikasi dan potensi yang memengaruhi telah diuraikan.

B. THEORY OF CHANGE

Suatu *logic models* yang baik memiliki *theory of change* (ToC) yang solid untuk membimbingnya. *Theory of change* menjelaskan proses tentang bagaimana perubahan akan terjadi; hal ini menggambarkan hubungan antara tindakan atau intervensi yang dilakukan dengan *outcome* program,

dan bagaimana hal ini dapat mewujudkan perubahan yang diinginkan. Pada dasarnya, *ToC* adalah landasan alur logika dalam *logic model*. Mengembangkan *ToC* dapat memberikan gambaran besar (*big picture*) program dengan mendeskripsikan bagaimana dan mengapa perubahan akan terjadi serta menunjukkan jalan dalam menuju perubahan.

Para *stakeholders* lembaga seringkali membutuhkan ilustrasi ini untuk membantu mereka memahami dengan tepat apa yang ingin dilakukan oleh inisiator atau pengusul program, serta perubahan apa yang diharapkan darinya. Bagi evaluator program, *ToC* membantu memahami kemajuan program yang dimaksudkan dari intervensi (kegiatan) ke hasil (sasaran) untuk memudahkan pengembangan pertanyaan evaluasi dan rencana evaluasi. *ToC* pada dasarnya adalah deskripsi dan ilustrasi yang komprehensif tentang bagaimana dan mengapa perubahan yang diinginkan diharapkan terjadi dalam konteks tertentu.

Theory of change menjelaskan bahwa seseorang yang akan melakukan perubahan harus memiliki konsep tentang perubahan agar proses perubahan tersebut terarah dan mencapai tujuan yang ada. *ToC* mempunyai dasar, yaitu tergantung pada apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapai perubahan tersebut, dan strategi apa yang akan dilakukan. Terdapat keterkaitan antara *ToC* dengan

monitoring evaluasi. Karena dalam melakukan monitoring evaluasi suatu program kegiatan, yang menjadi fokus utamanya adalah perubahan yang terjadi dalam proses. Itu semua termasuk kedalam perencanaan program. Kemudian dari perencanaan tersebut diimplementasikan, prosesnya di-monitoring sedangkan *output* serta *impact*-nya merupakan hasil dari evaluasi.

ToC merupakan eksplorasi sistematis yang menjelaskan secara komprehensif tentang bagaimana sebuah perubahan yang diinginkan terjadi atas suatu kondisi tertentu. *ToC* menghubungkan antara aktivitas, hasil dan konteks. *ToC* sangat bermanfaat dalam menyusun tujuan, rencana strategis dan evaluasi program dengan 3 elemen utama, yaitu: masalah, solusi, dan perubahan yang diinginkan. Dalam menyusun *ToC* untuk sebuah program (misalnya program A), selalu dimulai dengan pertanyaan mengenai “apa tujuan jangka panjang (perubahan yang diinginkan) program A?” yang diikuti dengan pertanyaan berikutnya “kondisi seperti apa yang sebaiknya terjadi sehingga tujuan jangka panjang program A tercapai?”

Gambaran sederhana dari *theory of change*:

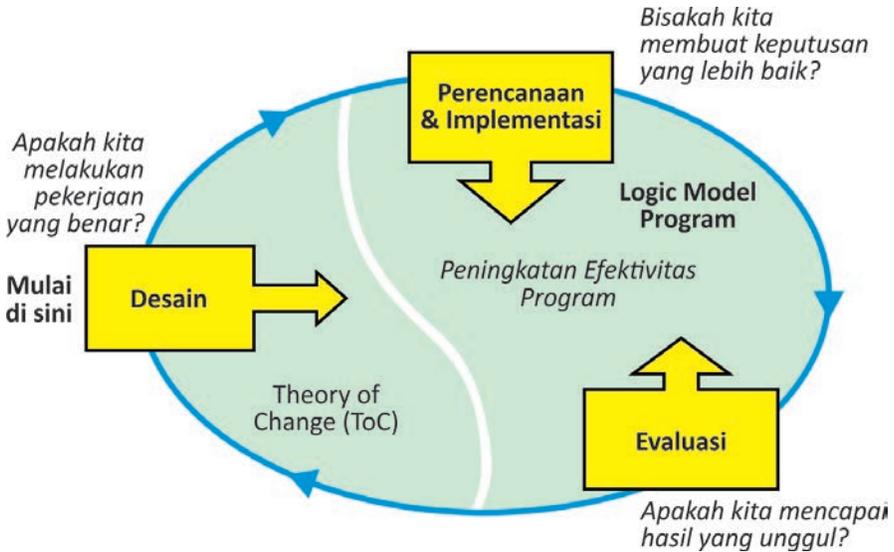


Theory of change menjelaskan bagaimana dan mengapa sebuah program diharapkan untuk mencapai hasil yang dinyatakan

Dari diagram ini, kita dapat menjabarkan: apa pernyataan masalah yang mengemuka, kebutuhan masyarakat, hasil yang diharapkan, faktor yang berpengaruh, strategi yang dijalankan, dan terakhir, asumsi yang mendasari mengapa strategi ini akan berhasil mengubah komunitas yang disasar.

C. TOC, LOGIC MODEL, DAN LOGICAL FRAMEWORK

Antara *theory of change* dan *logic model*, ada perbedaan pada tingkat detail dan penggunaannya tetapi mewakili logika yang sama. Suatu model *ToC* hanya merupakan representasi umum tentang bagaimana penanggung jawab program percaya bahwa perubahan akan terjadi. Sedangkan *logic model* dari suatu program mendefinisikan sumber daya, kegiatan yang direncanakan, dan keluaran dan hasil mereka dari waktu ke waktu yang mencerminkan hasil yang diinginkan. Kedua jenis model berbeda dalam penampilan dan penggunaannya. Tingkat detail dan fitur membedakan antara *theory of change* dengan *logic model* dari suatu program. *ToC* model merupakan sebuah konseptual, sedangkan *logic model* program adalah operasionalnya.



ToC memberikan ‘gambaran besar’ dan merangkum pekerjaan pada tingkat strategis, sementara *logic model* menggambarkan pemahaman tingkat program (implementasi) dari proses perubahan. Dengan kata lain, *logic model* seperti lensa mikroskopis yang memperbesar jalur tertentu di dalam ToC.

ToC memberikan gambaran yang luas, tetapi setelah pendanaan disetujui, donor ingin melihat bagaimana program akan dilaksanakan. Hal ini dijelaskan dan dijabarkan dalam dalam *logic model* dan *Matrix Log Frame* yang menyajikan pada tingkat detail.

Sebuah organisasi yang bekerja di banyak sektor, di area tematik yang berbeda dan dalam konteks yang berbeda, meskipun mereka memiliki satu ToC, bisa

dimungkinkan memiliki beberapa *logic model/ log frame matrix*, untuk mencerminkan berbagai program yang mengalir dari *ToC*. *ToC* memberikan fokus pada proses sosial, ekonomi, politik dan kelembagaan yang kompleks yang mendasari perubahan masyarakat. Dengan kata lain, *logic model/ log frame* dapat dikembangkan untuk setiap hasil tunggal yang digambarkan pada *ToC*.

Logical framework atau *log frame*, sesuai dengan namanya, menyajikan intervensi dengan cara yang 'logis' dan berurutan. Rapi dan bersih di mana 'X mengarah ke Y'. Dengan *log frame*, hanya komponen yang terhubung langsung ke program yang digambarkan. Ini linier yang berarti bahwa semua kegiatan mengarah pada *output* yang mengarah pada *outcome* dan *goal*; mempunyai kerangka, dari satu tahap ke tahap yang lain, dan dengan menggunakan indikator yang jelas, terukur dan spesifik.

Biasanya ada fleksibilitas terbatas dan sedikit ruang untuk munculnya hasil yang tidak diharapkan dengan *log frame*. Anda dapat melirik *log frame* dan melihat apakah hasil tidak sinkron dengan masukan dan kegiatan, itu tidak menunjukkan mengapa kegiatan diharapkan menghasilkan hasil.

Sebaliknya, *ToC* menunjukkan mengapa sebuah program memiliki pembenaran di setiap langkah. Dengan kata lain, *ToC* memiliki alasan mengapa satu

hasil mengarah ke yang berikutnya. Selanjutnya, ToC dimaksudkan sebagai dokumen 'hidup'; direvisi dan diperbarui sesuai dengan perubahan konteks.

Pengembangan ToC biasanya dimulai dari 'atas', dengan identifikasi '*Big Hairy Audacious Goal (BHAG)*' dan kemudian bekerja mundur untuk memetakan jalur hasil. Dalam mengembangkan ToC, pertanyaan yang diajukan adalah 'jika kita melakukan X maka Y akan berubah karena...'

Kerangka logis di sisi lain biasanya dirancang setelah ToC atau intervensi/program dikembangkan. Dengan kata lain, *log frame* biasanya tidak dimulai dengan BHAG, tetapi dimulai dari 'bawah', yang menggambarkan input, aktivitas, *output*, dll., yang mengarah pada tujuan. Pertanyaan yang akan diajukan dalam mengembangkan *log frame* adalah 'Jika kita berencana untuk melakukan X, maka ini akan memberikan hasil Y'.

Logical framework atau *log frame* dipakai dalam pengorganisasian program bahkan tahap-tahap berikutnya dalam manajemen program yaitu pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program. Dikatakan dipakai untuk pengorganisasian karena orang-orang yang terlibat dalam program dengan kerangka ini akan selalu: berpikir terorganisir, dapat menghubungkan kegiatan-investasi-hasil, dapat digunakan untuk menetapkan indikator

kinerja dan mengalokasikan tanggung jawab, dapat digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas, dapat juga digunakan untuk menyesuaikan dengan keadaan yang tiba-tiba berubah dan dengan kerangka logis ini penanggung jawab program dapat memperhitungkan resiko, kemungkinan kesalahan dari perencanaan yang telah dibuat dengan baik dan benar.

Jakarta
kota kolaborasi

Boji Piring

BAZNAS (BAZIS)
Membantu dan Selamatkan

LAUNCHING

SEMUA BISA MAKAN

#AyoTraktirMakanSaudaramu



Scan donasi melalui aplikasi pembayaran

OVO Gopay Bank

kirim ke:
998.889
DKI Jakarta
84

Jakarta
kota kolaborasi

LAUNCHING

SEMUA BISA

#AyoTraktirMakanSaudaramu

R. 6.10.21 | Oktober 2021

arang M
sanggr

baznasbazis @bazn

SEMUA BISA MAKAN

**SEMUA
BISA MAKAN**

Hati Khodijah masih gusar, sudah lima bulan lebih ia menutup warung makan usahanya. Pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh dunia tidak hanya menghilangkan banyak nyawa, tapi juga hasil usaha. Siti Khodijah (39) termasuk dari jutaan orang yang merana, usahanya harus ia hentikan sementara karena “pagebluk” ini.

Selain karena khawatir terpapar virus, kebijakan pembatasan sosial yang diterapkan secara besar-besaran di ibu kota membuatnya berada dalam pilihan sulit. Jika tetap buka tak banyak pelanggan yang datang. Jika ia terus menutup warungnya, dapurnya terancam tak lagi bisa “ngebul”. Usaha yang dijalankan Khodijah memang termasuk yang dikecualikan, namun siapa yang hendak datang jika pusat usaha yang tak jauh dari warungnya terkena kebijakan pembatasan.

“Normalnya, saya bisa memasak 15 liter (beras) per hari, ini 5 liter saja sulit habis,” ujar ibu dua anak ini.

Khodijah telah membuka usaha warung makan khas Tegal di Jakarta sejak tahun 1999. Warung berukuran 3 x 6 meter itu berlokasi tak jauh dari pusat perbelanjaan terbesar di Asia Tenggara, Tanah Abang. Oleh karenanya, ketika pasar itu harus ditutup karena pandemi, warungnya pun sangat terdampak.

Di tengah kegundahannya itu Khodijah mendapatkan angin segar. Ia didatangi seorang staff dari BAZNAS (BAZIS). Pria tersebut menawarkan Khodijah menjadi mitra BAZIS DKI dalam program Bagi i-Piring, yang kemudian berubah nama menjadi “Semua Bisa Makan”. Melalui program ini, BAZNAS (BAZIS) akan menempatkan (deposit) sejumlah dana di warung milik Khodijah. Dengan dana tersebut, Khodijah harus menyiapkan makanan, dan melayani pelanggan yang datang dengan membawa kartu atau voucher khusus yang diterbitkan BAZIS DKI.

Setiap voucher yang ditukar, akan dipindai untuk dilihat validitasnya. Jika valid, maka mereka akan mendapatkan satu porsi lengkap nasi dan lauk, dari warung makan milik Khodijah yang diberi nama “Warteg Widya”.

“Dalam sebulan kita dapat jatah 100 porsi makan, senilai Rp15.000/porsi,” jelas Khodijah.

Pelanggan yang membeli dengan voucher atau kartu tersebut adalah penerima manfaat program yang dipilih BAZIS DKI dan mitranya. Sebagian besar mereka berasal dari kalangan ekonomi bawah, seperti pemulung, penyapu jalan, dan musafir. Selain itu, ada juga kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan manula yang biasanya datang dengan diwakilkan pihak keluarganya.

Meski secara nilai uang tidak terlalu besar, program SBM ini menjadi stimulan usaha bagi Khodijah yang cukup lama terpukul karena pandemi. Dengan program ini, warung makan milik Khodijah dapat kembali berputar karena disokong modal usaha tambahan. Selain itu, ia juga mendapat pelanggan pasti, yaitu para mustahik yang datang dengan kartu atau voucher.

Khodijah merasa bersyukur dan berterima kasih kepada BAZNAS (BAZIS) yang membantunya kembali bangkit pasca-pandemi. Selain itu, melalui program ini, Khodijah pun merasa dirinya bisa lebih bermanfaat bagi orang lain. Selain memberikan porsi makan sesuai “jatah” yang sudah ditentukan, Khodijah juga kerap memberikan kelebihan.

Khodijah menjelaskan, untuk porsi makan senilai Rp 15 ribu, biasanya hanya terdiri dari nasi, sayur, dan telur. Sering kali Khodijah mengganti lauknya dengan ikan atau ayam yang nilainya lebih mahal dari yang ditentukan.

“Ada rasa puasa juga ya bisa ikut membantu orang lain. Kita sudah ditolong, kita juga harus menolong,” tukasnya.



“Pesan saya kepada para pemilik warung yang terlibat dalam kegiatan ini, sambut mereka sebagai customer premium, hormati mereka bukan sebagai orang yang membutuhkan tapi sebagai orang yang akan membuka pahala anda.”

Anies Baswedan
[Gubernur DKI 2017-2022]

a. Double Track Program

Program “Semua Bisa Makan” merupakan jelmaan ulang program sebelumnya yang bernama Bagi i Piring. Lewat program tersebut, BAZNAS (BAZIS) membagikan kebahagiaan kepada para duafa dengan memberi mereka makan gratis kepada masyarakat yang membutuhkan melalui warung-warung makan yang menjadi mitra.

Cara kerjanya, BAZNAS (BAZIS) merekrut warung makan sebagai mitra penyalur. Mereka diberikan sejumlah dana sebagai deposit yang dikonversi menjadi paket menu makanan. Di saat yang sama, BAZNAS (BAZIS) memberikan mustahik sebuah kartu—yang kemudian diubah menjadi voucher—sebagai alat pembayaran ketika akan “membeli” di warung makan mitra.

Untuk memastikan program ini tepat sasaran bagi mustahik yang membutuhkan, BAZNAS (BAZIS) juga membangun platform aplikasi berbasis Android yang digunakan oleh pihak

warung. Jadi, setiap mustahik yang datang ke warung untuk membeli makanan, mereka harus menunjukkan kartu atau voucher yang dimiliki. Lalu pemilik warung akan memindai (scan) barcode / QR Code yang tertera.

Ketika transaksi itu valid, maka dana deposit yang ditiptkan di warung akan berkurang. Mereka pun memberikan paket menu makanan kepada mustahik.

Tujuan awal program ini adalah memberikan “kafalah” atau jaminan bagi masyarakat miskin, khususnya kelompok rentan, seperti panyandang disabilitas maupun manula, agar terpenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu makan sehari-harinya. Dengan alat pembayaran khusus, dana yang diberikan untuk kebutuhan makan dapat tersalur efektif. Tidak seperti bantuan sosial pada umumnya, yang kadang kala dananya digunakan bukan untuk kebutuhan yang semestinya.

Di saat yang sama, melalui program ini juga menambah pendapatan pengusaha warung makan, yang notabene juga kelompok ekonomi rendah. Dengan program ini, omset mereka akan bertambah karena ada pelanggan baru yang pasti jumlahnya. Inilah yang disebut “double track” program, yang membawa manfaat kepada dua kelompok masyarakat sekaligus. Pedagang kecil, juga masyarakat kurang mampu.

b. Momentum Covid-19 dan Kedermawanan Sosial

Program Bagi iPiring yang pertama kali diluncurkan pada November 2019 ini mendapatkan momentumnya ketika pandemi Covid-19 melanda dunia, termasuk Indonesia. Sebagaimana diketahui, pandemi ini menyebabkan kondisi ekonomi masyarakat terpuruk, terlebih mereka yang masuk dalam kategori rentan dan miskin. Kebijakan pembatasan sosial yang diterapkan pemerintah membuat sebagian usaha lumpuh. Akibatnya, masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, bahkan yang paling dasar sekali pun, yaitu makan.

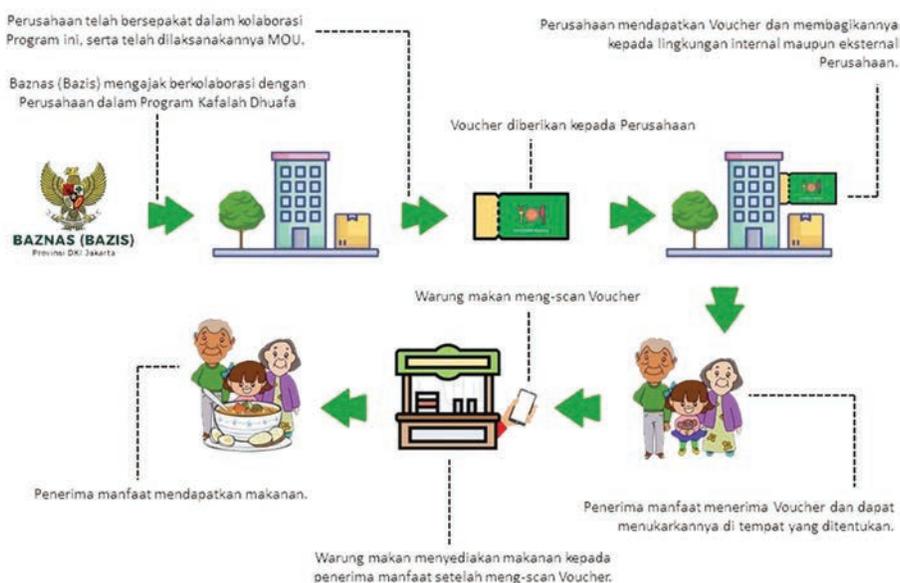
Uniknya, di tengah sulitnya ekonomi, kedermawanan masyarakat ternyata semakin meningkat. Mereka bahu-membahu dan saling membantu, meringankan saudara dan tetangga yang mengalami masalah. Ada yang menyalurkan bantuan secara langsung, ada pula yang melalui lembaga filantropi.

Melihat animo masyarakat yang sangat tinggi dalam berbagi, BAZNAS (BAZIS) pun memodifikasi program Bagi iPiring menjadi Semua Bisa Makan. Semangat yang dibangun adalah gotong royong dan kolaborasi. Melalui program ini, BAZNAS (BAZIS) mengajak masyarakat membantu tetangga atau saudara memenuhi kebutuhan dasar mereka, dengan mentraktir makan.

Masyarakat yang ingin mentraktir teman atau tetangganya makan, cukup berdonasi melalui BAZNAS (BAZIS). Lalu,

mereka akan diberikan voucher senilai donasi yang ditunaikan, untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Boleh disalurkan sendiri, atau diamanahkan melalui BAZNAS (BAZIS). Voucher itulah yang kemudian dipakai oleh penerima manfaat untuk membeli makanan di warung mitra.

Secara umum proses bisnisnya sama dengan program Bagi iPiring. Hanya saja pada program ini, BAZNAS (BAZIS) lebih melibatkan masyarakat secara luas, baik dari sisi penghimpunan donasi, maupun penyaluran voucher makan.



Semangat kolaborasi dalam program ini tercermin dalam proses penghimpunan donasi dan penyalurannya yang melibatkan masyarakat secara luas. Masyarakat, dalam hal ini bisa berbentuk individu, komunitas, majelis taklim, perusahaan, atau lembaga sosial.

Jika dipetakan, selain BAZNAS (BAZIS), ada beberapa pihak yang terlibat dalam kolaborasi program ini. Pertama adalah masyarakat donatur. Mereka adalah penyandang dana untuk terselenggaranya program ini. Tidak ada batasan minimum berapa donasi yang ingin disalurkan guna menyokong program ini.

Kedua adalah pengusaha kecil yang menjalankan usaha warung makan. Mereka adalah ujung tombak pelayanan dan penyaluran paket makanan kepada masyarakat mustahik yang berhak mendapatkan bantuan. Ketiga adalah pengembang aplikasi yang memungkinkan BAZNAS (BAZIS) melakukan monitor program dan menjamin ketepatan sasaran program ini. Selain sebagai alat utama transaksi (untuk pemindah voucher), dengan aplikasi Bagi i Piring yang sudah dikembangkan, kita dapat melihat warung makan mana yang masih memiliki porsi makan untuk dibagikan, mana yang sudah habis, dan mana yang tidak efektif keberadaannya.

Keempat, yang juga tak kalah pentingnya adalah mitra penyalur. Merekalah yang bertanggung jawab membagikan voucher makan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kelompok keempat ini juga bisa dirangkap oleh mereka yang berdonasi dalam program ini. Ketika mereka menitipkan xxx rupiah melalui BAZNAS (BAZIS), mereka juga akan ditawarkan untuk menyalurkan

voucher makan kepada yang berhak, sehingga semangat dan nuansa berbagi juga tetap kental dirasakan.

Sejak digulirkan, banyak pihak telah ambil bagian dalam program ini. Dari sektor swasta ada JNE, Tugu Reasuransi; dari badan usaha daerah ada Transjakarta dan Bank DKI Syariah; dari unsur masyarakat ada FKDT dan STMI. Selain itu tentu saja unsur pemerintahan di DKI yang menyokong penuh program ini, baik di tingkat provinsi, kota, kecamatan, hingga lingkungan.

Selain itu, dari sisi warung makan yang melayani mustahik, ada lebih dari 610 warung makan yang menjadi mitra. Mereka tersebar di 6 wilayah administratif DKI Jakarta.



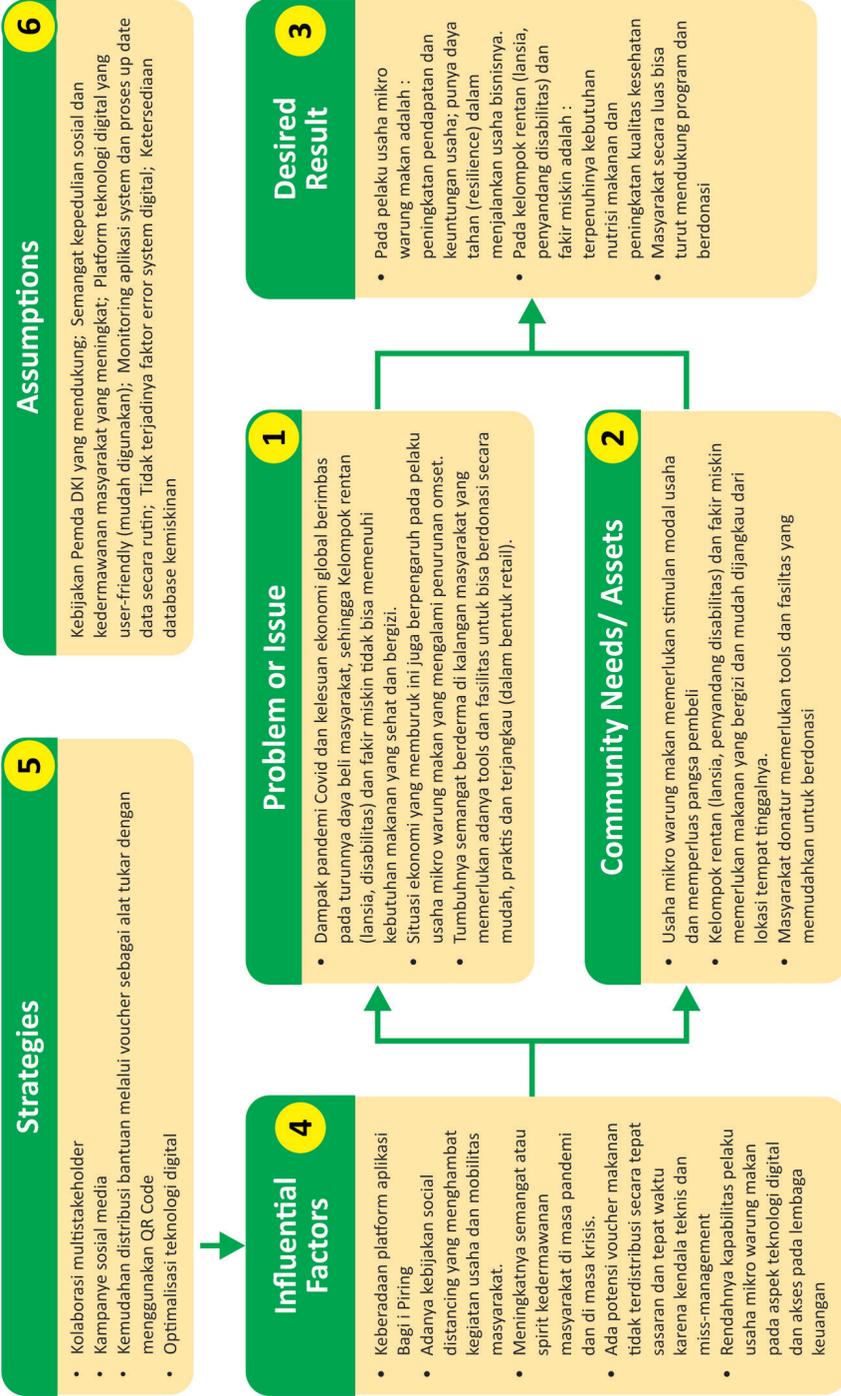
Jumlah Voucher Makan yang Dimanfaatkan Warga pada tahun 2022



Jumlah Warung Mitra Program SBM

c. Theory of Change





1. Pernyataan Masalah (Problem) :

- Dampak pandemi Covid-19 dan kelesuan ekonomi global berimbas pada turunnya daya beli masyarakat. Kelompok rentan (lansia, disabilitas) dan fakir miskin di wilayah DKI Jakarta yang selama ini sudah dalam kondisi sulit menjadi semakin terpuruk sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan makanan yang sehat dan bergizi.
- Situasi ekonomi yang memburuk ini juga berpengaruh pada pelaku usaha mikro warung makan yang mengalami penurunan omset.
- Di tengah situasi krisis, ternyata semangat berderma dan berbagi di kalangan masyarakat maupun para pihak yang peduli semakin tumbuh. Mereka membutuhkan sarana untuk bisa berderma dengan cara yang mudah, praktis dan terjangkau (dalam bentuk retail).

2. Kebutuhan Komunitas (Community Needs/ Assets) :

- Kebutuhan pelaku usaha mikro warung makan adalah: 1) memerlukan stimulan modal usaha untuk meningkatkan daya tahan usahanya; 2) ada kebutuhan mempertahankan dan meluaskan pangsa pasar usaha warung makannya, di tengah imbas pandemi covid; 3) ada kebutuhan meningkatkan kualitas makanan antara

lain kebersihan dan cita rasa makanan.

- Sementara kebutuhan kelompok rentan, yakni lansia, penyandang disabilitas dan fakir miskin adalah: mendapatkan pemenuhan atas kebutuhan makanan yang bergizi dan menyehatkan; secara jarak ketersediaan makanan pokok tersebut mudah dijangkau dari lokasi tempat tinggalnya.
- Dari sisi donatur, kebutuhannya adalah adanya *tools* dan fasilitas berdonasi yang mudah, praktis dan terjangkau karena mereka bisa berdonasi dalam bentuk retail

3. Hasil yang diharapkan (Desired Result) :

- Hasil yang diharapkan pelaku usaha mikro warung makan adalah: peningkatan pendapatan dan keuntungan usaha; punya daya tahan (*resilience*) dalam menjalankan usaha bisnisnya.
- Sementara pada kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas) dan fakir miskin adalah: terpenuhinya kebutuhan nutrisi makanan dan peningkatan kualitas kesehatan.
- Masyarakat secara luas juga bisa turut mendukung program dan berdonasi.

4. Faktor-faktor yang berpengaruh (Influential Factors) :

- Keberadaan platform aplikasi Bagi i Piring

- Adanya kebijakan *social distancing* yang menghambat kegiatan usaha dan mobilitas masyarakat.
- Meningkatnya semangat atau spirit kedermawanan masyarakat di masa pandemi dan di masa krisis.
- Ada potensi voucher makanan tidak terdistribusi secara tepat sasaran dan tepat waktu kepada kelompok rentan dan fakir miskin (*eligible community*) karena kendala teknis dan *miss-management* (salah pemetaan; kurangnya SDM; faktor ketidakamanan)
- Rendahnya kapabilitas pelaku usaha mikro warung makan pada aspek teknologi digital dan aksesibilitas pada lembaga keuangan karena sebagian masih belum mempunyai rekening bank. Hal ini menjadi hambatan dalam proses pengiriman dana.

5. Strategi :

- Kolaborasi multistakeholder antara sektor usaha (berupa program CSR), sektor pemerintah (berupa database, political will), dan civil society (berupa donasi).
- Kampanye sosial media untuk membangun kepedulian sosial dari masyarakat yang mampu dan memberikan dukungan pada program Semua Bisa Makan
- Kemudahan distribusi bantuan melalui voucher sebagai alat tukar; menggunakan QR Code yang memudahkan

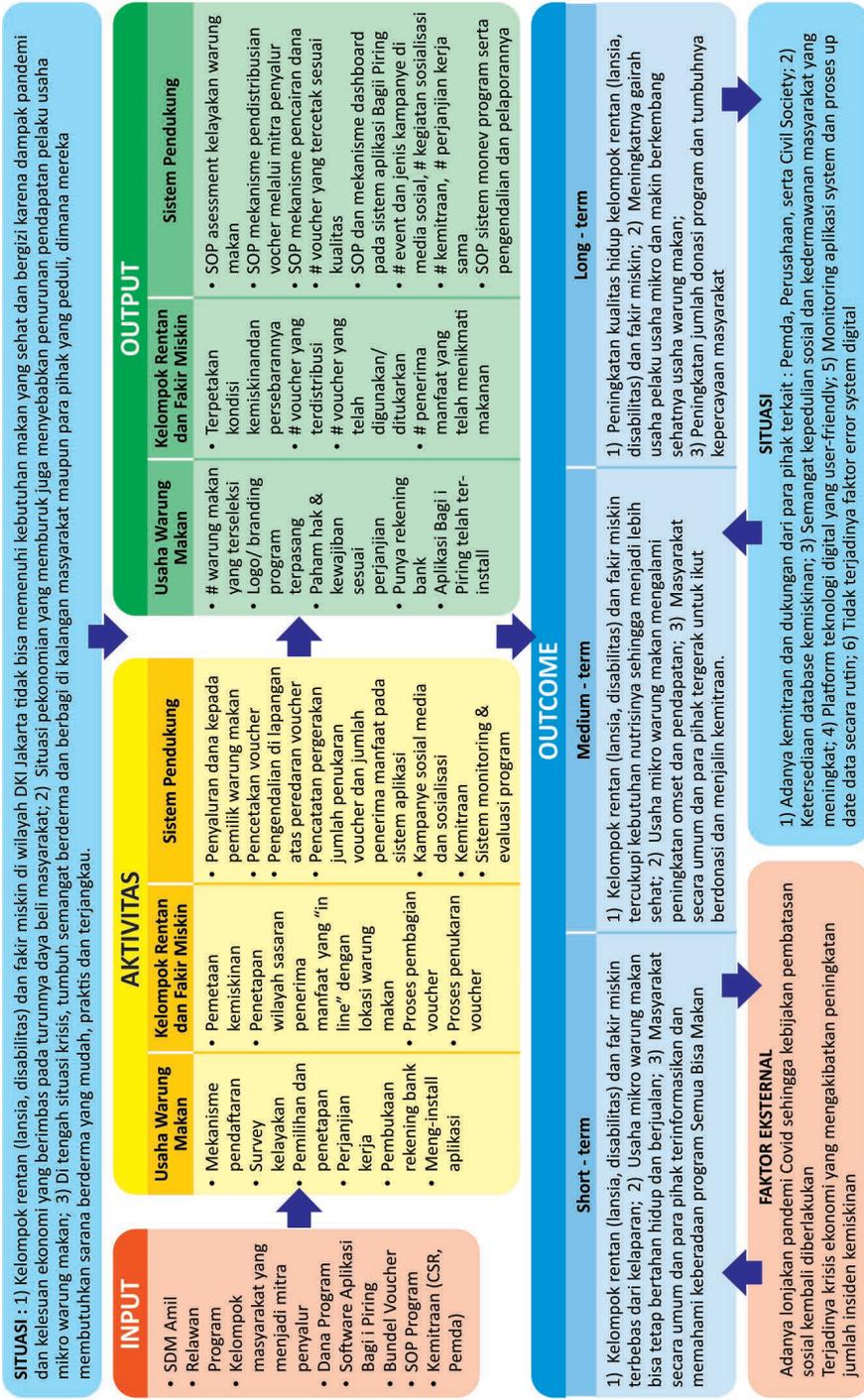
pengendalian peredaran dan penggunaan voucher. Tetapi di sisi lain ada kelemahan pada bentuk fisik voucher yang mudah rusak sehingga tidak bisa di-scan. Hal ini bisa menyebabkan “idle” dana dari sisi pelaku usaha mikro warung makan, selain itu kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, fakir miskin) tidak bisa memenuhi kebutuhan makannya.

- Optimalisasi teknologi digital

6. Asumsi :

- Kebijakan Pemda DKI yang mendukung
- Semangat kepedulian sosial dan kedermawanan masyarakat yang meningkat
- Platform teknologi digital yang user-friendly (mudah digunakan)
- Monitoring aplikasi system dan proses up date data secara rutin
- Tidak terjadinya faktor error system digital
- Ketersediaan database kemiskinan

d. Logic Model Program SBM



Definisi Situasi :

- Dampak pandemi Covid dan kelesuan ekonomi global berimbas pada turunnya daya beli masyarakat. Kelompok rentan (lansia, disabilitas) dan fakir miskin di wilayah DKI Jakarta yang selama ini sudah dalam kondisi sulit menjadi semakin terpuruk sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan makanan yang sehat dan bergizi.
- Situasi pandemi dan kondisi perekonomian yang memburuk ini juga menyebabkan penurunan drastis pendapatan pelaku usaha mikro. Salah satu sektor yang terimbas adalah usaha mikro warung makan. Warung makan sepi pembeli dan mengalami penurunan omset. Hal ini perlu suatu solusi, dengan tak hanya sebatas memberdayakan pelaku usaha mikro warung makan, tapi juga hidangannya bisa dinikmati banyak orang secara gratis dengan dukungan kedermawanan publik.
- Di tengah situasi krisis, tumbuh semangat berderma dan berbagi di kalangan masyarakat maupun para pihak yang peduli (pemerintah daerah, perusahaan dan civil society). Mereka membutuhkan sarana untuk bisa berderma dengan cara yang mudah, praktis dan terjangkau (dalam bentuk retail).

Identifikasi Outcome :

Long-term Outcome :

- Peningkatan kualitas hidup kelompok rentan (lansia, disabilitas) dan fakir miskin
- Meningkatnya gairah usaha pelaku usaha mikro dan makin berkembang sehatnya usaha warung makan
- Peningkatan jumlah donasi program dan tumbuhnya kepercayaan masyarakat

Medium-term Outcome :

- Kelompok rentan (lansia, disabilitas) dan fakir miskin tercukupi kebutuhan nutrisinya sehingga menjadi lebih sehat
- Usaha mikro warung makan mengalami peningkatan omset dan pendapatan
- Masyarakat secara umum dan para pihak tergerak untuk ikut berdonasi dan menjalin kemitraan.

Short-term Outcome :

- Kelompok rentan (lansia, disabilitas) dan fakir miskin terbebas dari kelaparan
- Usaha mikro warung makan bisa tetap bertahan hidup dan berjualan
- Masyarakat secara umum dan para pihak terinformasikan dan memahami keberadaan program Semua Bisa Makan

Inputs, Activities, and Outputs:

1. Inputs Program
 - a. SDM Amil BAZNAS BAZIS DKI
 - b. Relawan Program Semua Bisa Makan
 - c. Komunitas/ kelompok masyarakat yang menjadi mitra penyalur (majelis taklim, pengurus masjid dll)
 - d. Dana Program
 - e. Software Aplikasi Bagi i Piring
 - f. Bundel Voucher
 - g. SOP Program
 - h. Kemitraan (CSR Perusahaan, Pemerintah Daerah)
2. Aktivitas Program

Usaha Warung Makan :

- a) Mekanisme pendaftaran warung makan
- b) Survey kelayakan warung makan
- c) Pemilihan warung makan dan pemasangan *branding* program Semua Bisa Makan di semua warung yang terseleksi
- d) Perjanjian kerja dengan pemilik warung makan
- e) Pemilik warung makan membuka rekening bank untuk memudahkan transfer dana program (dana deposit)
- f) Meng-*install* aplikasi BagiiPiring

Kelompok rentan dan fakir miskin sebagai penerima manfaat :

- a) Pemetaan kemiskinan berdasarkan database dari Pemda DKI Jakarta juga berdasarkan informasi dari pengurus masjid maupun anggota masyarakat lainnya
- b) Penetapan daerah kantong kemiskinan sebagai dasar untuk penetapan pemilihan penyebaran lokasi warung makan
- c) Pembagian voucher kepada penerima manfaat baik secara langsung maupun dengan melibatkan mitra penyalur (pengurus masjid, majelis taklim, aparat kelurahan dll)
- d) Penukaran voucher oleh penerima manfaat kepada warung makan. Kemudian warung makan memindai voucher dan penerima manfaat mendapatkan makanan senilai Rp 15.000,-/ bungkus

Sistem Pendukung

- a) Proses penyaluran dana program (dana deposit) kepada pemilik warung makan
- b) Pencetakan voucher
- c) Pencatatan jumlah penukaran voucher dan jumlah penerima manfaat serta persebarannya oleh Sistem pada platform Bagi i Piring.
- d) Melakukan pengendalian di lapangan atas proses peredaran voucher agar terdistribusi secara tepat sasaran dan tepat waktu kepada kelompok rentan dan fakir miskin

- e) Melakukan kampanye program baik melalui media sosial maupun sosialisasi langsung kepada para pihak terkait
- f) Menjalin kemitraan dan membuat perjanjian kerja sama
- g) Melakukan monitoring dan evaluasi program secara tersistem.

3. Output

Usaha Warung Makan

- a) Warung makan yang terseleksi sesuai kriteria dan prosedur (SOP)
- b) Logo/ *branding* program terpasang di semua warung makan yang terpilih dalam waktu
- c) Pemilik warung makan paham akan hak dan kewajibannya sesuai perjanjian kerja
- d) Semua pemilik warung makan yang terpilih telah membuka rekening pada bank syariah sesuai arahan, dalam kurun waktu
- e) Aplikasi BagiiPiring telah ter-*install* pada *gadget* pemilik warung makan, dan telah paham cara penggunaannya

Kelompok Rentan dan Fakir Miskin sebagai penerima manfaat:

- a) Kondisi kemiskinan dan persebarannya terpetakan, dan digunakan sebagai dasar dalam penetapan titik-titik lokasi warung makan

- b) voucher yang terdistribusi sesuai proporsi wilayah kantong kemiskinan
- c) voucher yang telah digunakan/ ditukarkan oleh para penerima manfaat sesuai target waktu dan target lokasi
- d) kelompok rentan (disabilitas, lansia) dan fakir miskin yang telah menikmati makanan, sesuai dengan kriteria dan persebaran wilayah sasaran

Sistem Pendukung

- a) Tersusun SOP *assessment* kelayakan warung makan
- b) Tersusun SOP mekanisme pendistribusian voucher melalui mitra penyalur
- c) Tersusun SOP mekanisme pencairan dana deposit kepada warung makan
- d) Voucher yang tercetak sesuai kualitas dengan bentuk fisik yang tidak mudah rusak dan bisa terpindai (ter-scan) dengan baik.
- e) Tersusun SOP dan mekanisme dashboard pada sistem aplikasi Bagii Piring yang memudahkan proses pemantauan jumlah penukaran voucher, jumlah penerima manfaat serta persebarannya.
- f) Event dan jenis kampanye program yang telah dilakukan melalui media sosial, # kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan
- g) Kemitraan yang telah terjalin dan perjanjian kerja sama yang telah dibuat

- h) Tersusun SOP sistem monitoring dan evaluasi program serta pengendalian dan pelaporannya

Informasi lain yang perlu diingat:

1. Faktor Eksternal

- Adanya lonjakan pandemi Covid sehingga kebijakan pembatasan sosial kembali diberlakukan
- Terjadinya krisis ekonomi yang mengakibatkan peningkatan jumlah insiden kemiskinan

2. Asumsi

- Adanya kemitraan dan dukungan dari para pihak terkait : Pemda DKI Jakarta, Perusahaan, serta Civil Society (Majelis Taklim, Relawan dll)
- Ketersediaan database kemiskinan
- Semangat kepedulian sosial dan kedermwanaan masyarakat yang meningkat
- Platform teknologi digital yang user-friendly (mudah digunakan)
- Monitoring aplikasi system dan proses up date data secara rutin
- Tidak terjadinya faktor error system digital

Kami sangat bangga kepada BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta atas program ini. Semoga program ini bermanfaat dan berdampak bagi UMKM khususnya yang berada di Jakarta.

Hari Gumbira

[Pimpinan Klaster Bank DKI Syariah Wahid Hasyim]



DIFABIS

Para pengguna KRL dan MRT yang kerap turun dan naik di stasiun Sudirman atau Dukuh Atas tentu akrab dengan terowongan Kendal yang menghubungkan kedua sisi Jalan Jenderal Sudirman. Terowongan ini juga menjadi kawasan di mana warga Jakarta bisa beralih moda transportasi antara KRL, MRT dan Trans-Jakarta sehingga dinamakan Transit Oriented Development (TOD).

Terowongan Jalan Kendal awalnya ruas jalan yang menghubungkan Jalan Tanjung Karang di sisi barat dengan Jalan Blora di sisi timur Jalan Jenderal Sudirman. Namun sejak tahun 2019, terowongan ini disulap menjadi kawasan pedestrian yang artistik dan bersahabat. Enak dijadikan tempat nongkrong, janjian, atau sekedar jalan-jalan. Di terowongan Kendal ini juga kerap digelar berbagai event seni budaya dan kegiatan sosial.

Di sisi timur sebelah kanan, tepatnya beberapa langkah menuju stasiun KRL, sejak Februari 2021 lalu berdiri dua buah kedai yang terbuat dari kayu berwarna coklat. Bentuknya milenial dan artistik. Kedai pertama menjajakan aneka kopi dan teh, seperti layaknya café yang berjamuran di sudut-sudut kota. Kedai kedua menjajakan aneka jenis kue, seperti bolen, brownies, bolu, dan sebagainya.

Kedua kedai ini memiliki brand *Difabis Coffe and Tea* yang berada di bawah pengelolaan BAZNAS (BAZIS). Menu yang dijajakan kedua kedai tersebut sebenarnya biasa-biasa saja, banyak ditemukan di tempat-tempat lain. Namun yang berbeda dan layak diapresiasi, kedua kedai tersebut digawangi oleh anak-anak muda penyandang disabilitas atau kaum difabel.

“Kami berenam, lima orang diantaranya penyandang tuna rungu atau tuli, dan saya sendiri tuna daksa,” kata Robiatin yang ditunjuk oleh BAZNAS (BAZIS) sebagai koordinator pengelola kedua kedai tersebut.

Atin, panggilan akrabnya, mengaku sudah mengelola kedai ini sejak berdiri bulan Februari 2021 lalu. Sementara yang lainnya, kata Atin, ada yang juga sama-sama dari awal, ada juga yang baru seminggu.

“Mereka itu lulusan Sekolah Luar Biasa(SLB) yang melamar ke sini atas rekomendasi Baznas,” kata wanita yang bertempat tinggal di Kedoya itu.

Difabis Coffe and Tea buka setiap hari, mulai pukul 08.00 WIB sampai Pukul 19. 00. Sistem kerjanya, dibagi dalam dua shift,yakni pukul 08.00 sampai 13.30 WIB dan selanjutnya sampai tutup pukul 19.00.

“Masing-masing kedai, setiap shiftnya dijaga satu orang, dan satu orang lagi kebagian libur. Dalam satu minggu masing-masing kebagian libur dua hari,” lanjut Atin.

Berbicara omset, menurut Atin yang setiap harinya memakai sepeda motor beroda tiga itu, total perolehan dari kedua kedai tersebut hampir Rp2 juta setiap harinya. Penjualan biasanya rame saat pagi dan sore hari, yakni saat banyak warga yang pergi dan pulang kerja. Sedangkan di hari Sabtu dan Minggu, saat banyak pekerja libur, terowongan Kendal banyak dimanfaatkan warga

yang olahraga, jogging, bersepeda atau sekedar jalan-jalan sehingga *Difabis Coffe and Tea* tetap rame.

“Apalagi saat viralnya *Citayam Fashion Week*, lumayan bisa nambah omset.” kata Atin

Keuntungan dari kedua kios tersebut dikelola BAZNAS (BAZIS) untuk pengembangan dan pemberdayaan kaum difabel. Sedangkan para difabel yang mengelola kedua kedai itu sendiri mendapatkan gaji atau upah dari BAZNAS (BAZIS) ditambah bonus yang dibagikan setiap bulan.

“Upahnya lumayan lah walaupun masih dibawah UMR, namun sesuai dengan jam kerjanya, dan kita juga kan dapat bonus yang setiap bulannya bervariasi nilainya sesuai omset,” kata Atin.

Yang juga menarik dari *Difabis Coffe and Tea*, yakni di kios yang menjual kopi dan teh, adalah slogan “sambil berbagi dan belajar bahasa isyarat”. Dalam slogan sambil berbagi, teknisnya, pengunjung dapat membeli kopi atau minuman lainnya, tapi bukan untuk dirinya. Ada semacam voucher yang diperoleh pembeli dan kemudian ditempelkan di papan tulis yang berada di depan kios. Voucher tersebut bisa diambil oleh siapa saja, misalnya pedagang atau tukang ojek untuk ditukar dengan satu jenis minuman. Jadi ada upaya untuk membangun altruism di tengah masyarakat dengan membudayakan berbagi.

Sedangkan pada slogan belajar bahasa isyarat, di depan kios dipajang gambar berbagai bahasa isyarat yang biasa digunakan

tuna rungu dan artinya. Namun, kata Atin, pengunjung tidak perlu menerapkan bahasa isyarat untuk membeli kopi, teh atau kue di *Difabis Coffe and Tea* tersebut.

“Penjaga kios sudah mahir membaca gerak mulut pembeli sehingga paham apa maksudnya,” kata Atin.

Atin bersyukur, dengan kedua kios tersebut, teman-temannya yang difabel bisa mandiri dan berkarya. “Difabis sendiri sebetulnya kependekan dari difabel bisa, maksudnya kaum difabel juga bisa berkarya, bisa bekerja, dan bisa mandiri,” kata ibu dari satu orang anak berusia 7 tahun itu.



a. Advokasi dan Pesan Kesetaraan

Digulirkannya program Difabis tidak terlepas dan perhatian yang tinggi dari pemerintah provinsi DKI Jakarta, khususnya Gubernur Anies Baswedan, terhadap isu kesetaraan bagi orang-orang marjinal, khususnya penyandang disabilitas. Selama ini, para penyandang disabilitas kerap kali terabaikan atau bahkan dikucilkan masyarakat sekitar.

Memberikan ruang untuk berekspresi dan menunjukkan kemampuan diri, itulah yang menjadi tujuan diinisiasinya program Difabis. Karena keterbatasan, umumnya penyandang disabilitas sangat bergantung kepada orang lain. Kondisi ini membuat mereka minder dan akhirnya tak mampu bertahan dan mandiri. Padahal, jika kita didampingi dan didukung, mereka dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki.

Maksud lain dari program ini adalah advokasi terhadap penyandang disabilitas agar masyarakat umum terbiasa hidup berdampingan dengan mereka. Melalui café Difabis ini terbangun ruang interaksi antara masyarakat umum dengan penyandang disabilitas. Dengan interaksi dan komunikasi yang intens itu, akan terbangun kesadaran positif di tengah masyarakat. Mereka akan dianggap *common*, tidak ada lagi jarak dan sekat yang selama ini kerap kali menimbulkan stereotype di tengah-tengah masyarakat.

Melalui Difabis, kaum difabel yang kebanyakan anak muda sengaja diberi kesempatan magang dari tiga sampai enam bulan menjadi peracik minuman. Mereka juga diberi pengajaran menggunakan berbagai aplikasi pengiriman dan pemesanan

makanan secara daring. Harapannya, selepas magang, kaum muda difabel itu mampu bekerja di tempat yang lebih besar atau berwirausaha sendiri.

Saat ini, café Difabis telah berdiri di tiga tempat, yaitu Terowongan Kendal, Jakarta Pusat, kantor Walikota Jakarta Timur, dan Kantor Walikota Jakarta Utara. Penjualan kopi dan berbagai varian minuman lainnya di ketiga café ini cukup menggembirakan. Berdasarkan data yang dihimpun BAZNAS (BAZIS), penjualan pada bulan Oktober 2022, café Difabis di Terowongan Kendal mencapai 1.385 gelas, disusul Difabis Walikota Jakarta Utara sebanyak 1.300 gelas, dan Difabis Walikota Jakarta Timur 650 gelas.

Selain membawa dampak ekonomi bagi penyandang disabilitas yang diberdayakan melalui program ini, Difabis juga terbukti meningkatkan modal sosial bagi mereka. Berdasarkan hasil kaji dampak dengan menggunakan model CIBEST (Center of Islamic





Cafe Difabis di kawasan Kantor Walikota Jakarta Utara

Business and Economic Studies), diketahui terjadi peningkatan skor yang sangat signifikan antara sebelum berpartisipasi dalam program dan setelah berpartisipasi, terutama di aspek modal sosial.

Tingganya peningkatan skor *social capital* ini karena para penyandang disabilitas ini mengakui mereka mendapat banyak pengetahuan baru dan interaksi sosial yang tinggi dengan banyak orang baru. Sebelumnya, mereka diketahui memiliki tingkat percaya diri yang rendah karena keterbatasan fisik. Akibatnya, mereka menjadi pribadi yang cenderung pendiam dan tidak mau bersosialisasi dengan masyarakat.

Pada program ini mereka dapat lebih percaya diri dan dapat bersahabat dengan kondisinya sekarang, bahkan mereka beranggapan bahwa kekurangan mereka ini dapat di jadikan kelebihan dan bukan penghalang bagi mereka untuk beraktifitas. Sedangkan pada indikator *economic capital* terdapat kenaikan,

membuktikan bahwa program coffe difabis BAZNAS (BAZIS) ini dapat mengubah ekonomi mereka dan menyejahterakan keluarga mereka.

b. Kolaborasi Jadi Bisa

Semangat dan nilai kolaborasi juga begitu nampak dalam program ini. Untuk program Café Difabis, setidaknya ada 4 pihak yang terlibat dalam program ini. Pertama adalah kelompok atau komunitas penyandang disabilitas yang merekomendasikan calon penerima manfaat. Kedua, pemerintah daerah (provinsi atau kota) yang menyediakan tempat. Ketiga adalah BAZNAS (BAZIS) yang menyelenggarakan program. Keempat adalah pihak donor atau kelompok support lainnya.

Dengan kolaborasi yang terjalin di antara pemangku kepentingan ini, program ini dapat berjalan dengan baik. Kita tidak perlu menyewa tempat yang sangat mahal di wilayah yang cukup strategis, karena Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota telah memfasilitasinya. Penerima manfaat pun terseleksi dengan baik, mereka yang memiliki potensi dapat berkembang karena terlibat dalam program ini.

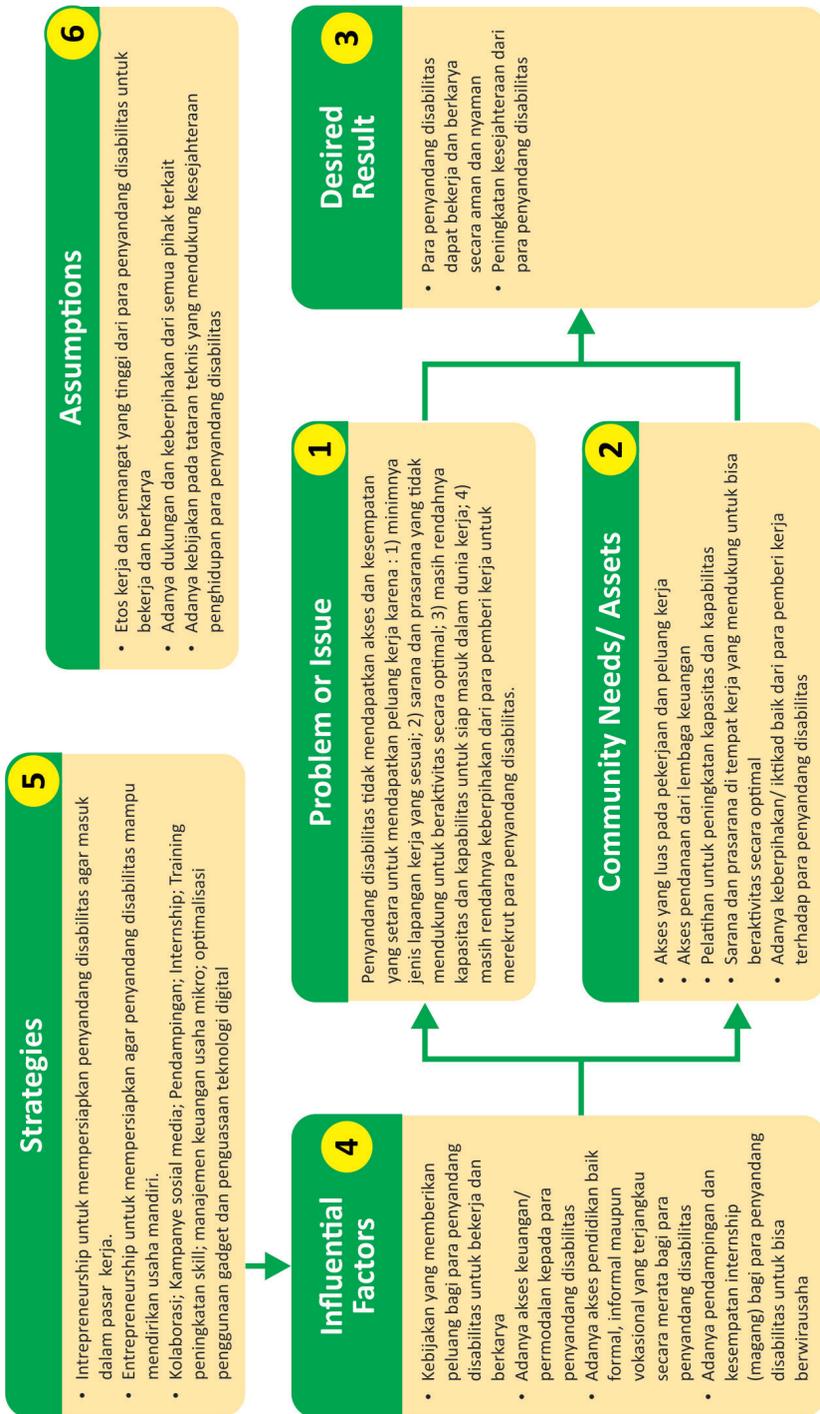
Setelah kedai kopi, Difabis juga dikembangkan ke berbagai keterampilan lain seperti pangkas rambut dan salon. Dengan demikian, semakin banyak penyandang disabilitas yang terakomodasi dan tersalurkan keterampilannya, sebagai bekal untuk kehidupan mereka ke depannya.

Selain itu, di bidang pendidikan agama, BAZNAS (BAZIS) juga telah meresmikan pesantren tahfidz khusus penyandang disabilitas. Pesantren Tahfiz Difabel “KH. Lutfi Fathullah” BAZNAS (BAZIS) DKI menjadi nama resmi dari pesantren difabel tersebut. Di tempat ini, para santri-santriwati yang semuanya tuna rungu dididik Alquran agar mampu menjadi penghafal dan pendidik di bidang agama bagi penyandang disabilitas lainnya.

Difabis merupakan bukti nyata bahwa para penyandang disabilitas ini sebenarnya memiliki potensi yang besar dalam diri mereka. Dengan sedikit sentuhan, berupa pelatihan keterampilan dan pendampingan, keterbatasan tak menghalangi mereka untuk berkarya.

c. Theory of Change





Strategies

5

- Entrepreneurship untuk mempersiapkan penyandang disabilitas agar masuk dalam pasar kerja.
- Entrepreneurship untuk mempersiapkan agar penyandang disabilitas mampu mendirikan usaha mandiri.
- Kolaborasi; Kampanye sosial media; Pendampingan; Internship; Training peningkatan skill; manajemen keuangan usaha mikro; optimalisasi penggunaan gadget dan penguasaan teknologi digital

Assumptions

6

- Etos kerja dan semangat yang tinggi dari para penyandang disabilitas untuk bekerja dan berkarya
- Adanya dukungan dan keberpihakan dari semua pihak terkait
- Adanya kebijakan pada tataran teknis yang mendukung kesejahteraan penghidupan para penyandang disabilitas

Influential Factors

4

- Kebijakan yang memberikan peluang bagi para penyandang disabilitas untuk bekerja dan berkarya
- Adanya akses keuangan/ permodalan kepada para penyandang disabilitas
- Adanya akses pendidikan baik formal, informal maupun vokasional yang terjangkau secara merata bagi para penyandang disabilitas
- Adanya pendampingan dan kesempatan internship (magang) bagi para penyandang disabilitas untuk bisa berwirausaha

Problem or Issue

1

Penyandang disabilitas tidak mendapatkan akses dan kesempatan yang setara untuk mendapatkan peluang kerja karena : 1) minimnya jenis lapangan kerja yang sesuai; 2) sarana dan prasarana yang tidak mendukung untuk beraktivitas secara optimal; 3) masih rendahnya kapasitas dan kapabilitas untuk siap masuk dalam dunia kerja; 4) masih rendahnya keberpihakan dari para pemberi kerja untuk merekrut para penyandang disabilitas.

Community Needs/ Assets

2

- Akses yang luas pada pekerjaan dan peluang kerja
- Akses pendanaan dari lembaga keuangan
- Pelatihan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas
- Sarana dan prasarana di tempat kerja yang mendukung untuk bisa beraktivitas secara optimal
- Adanya keberpihakan/ iktikad baik dari para pemberi kerja terhadap para penyandang disabilitas

Desired Result

3

- Para penyandang disabilitas dapat bekerja dan berkarya secara aman dan nyaman
- Peningkatan kesejahteraan dari para penyandang disabilitas

1. Pernyataan Masalah (Problem) :

- Penyandang disabilitas tidak mendapatkan akses dan kesempatan yang setara untuk mendapatkan peluang kerja karena : 1) minimnya jenis lapangan kerja yang ramah terhadap difabel; 2) sarana dan prasarana yang tidak mendukung penyandang disabilitas untuk beraktivitas secara optimal; 3) masih rendahnya kapasitas dan kapabilitas dari penyandang disabilitas untuk siap masuk dalam dunia kerja; 4) masih rendahnya keberpihakan dari para pemberi kerja untuk merekrut para penyandang disabilitas.

2. Kebutuhan Komunitas (*Community need/asset*) :

- Akses yang luas pada pekerjaan dan peluang kerja
- Akses pendanaan dari lembaga keuangan
- Pelatihan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas
- Sarana dan prasarana di tempat kerja yang mendukung para penyandang disabilitas untuk beraktivitas secara optimal
- Adanya keberpihakan/ iktikad baik dari para pemberi kerja terhadap para penyandang disabilitas

3. Hasil yang Diharapkan (*Desired Result*) :

- Para penyandang disabilitas dapat bekerja dan berkarya secara aman dan nyaman

- Peningkatan kesejahteraan dari para penyandang disabilitas

4. Faktor-faktor yang Berpengaruh (*Influential Factors*) :

- Kebijakan yang memberikan peluang bagi para penyandang disabilitas untuk bekerja dan berkarya
- Adanya akses keuangan/ permodalan kepada para penyandang disabilitas
- Adanya akses pendidikan baik formal, informal maupun vokasional yang terjangkau secara merata bagi para penyandang disabilitas
- Adanya pendampingan dan kesempatan internship (magang) bagi para penyandang disabilitas untuk bisa berwirausaha

5. Strategi :

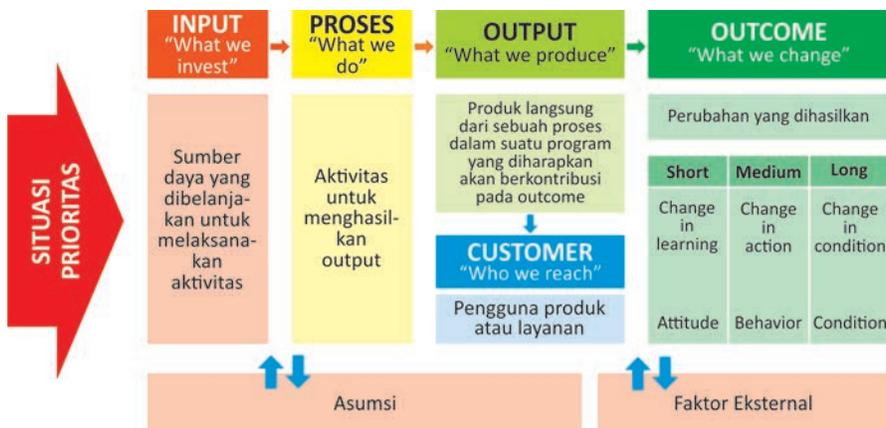
- Pemberdayaan melalui entrepreneurship adalah bagaimana mempersiapkan tenaga kerja penyandang disabilitas agar dapat diterima di pasar tenaga kerja.
- Pemberdayaan melalui entrepreneurship adalah pendidikan bagaimana penyandang disabilitas mampu untuk mendirikan usaha mandiri.
- Kolaborasi
- Kampanye sosial media
- Pendampingan

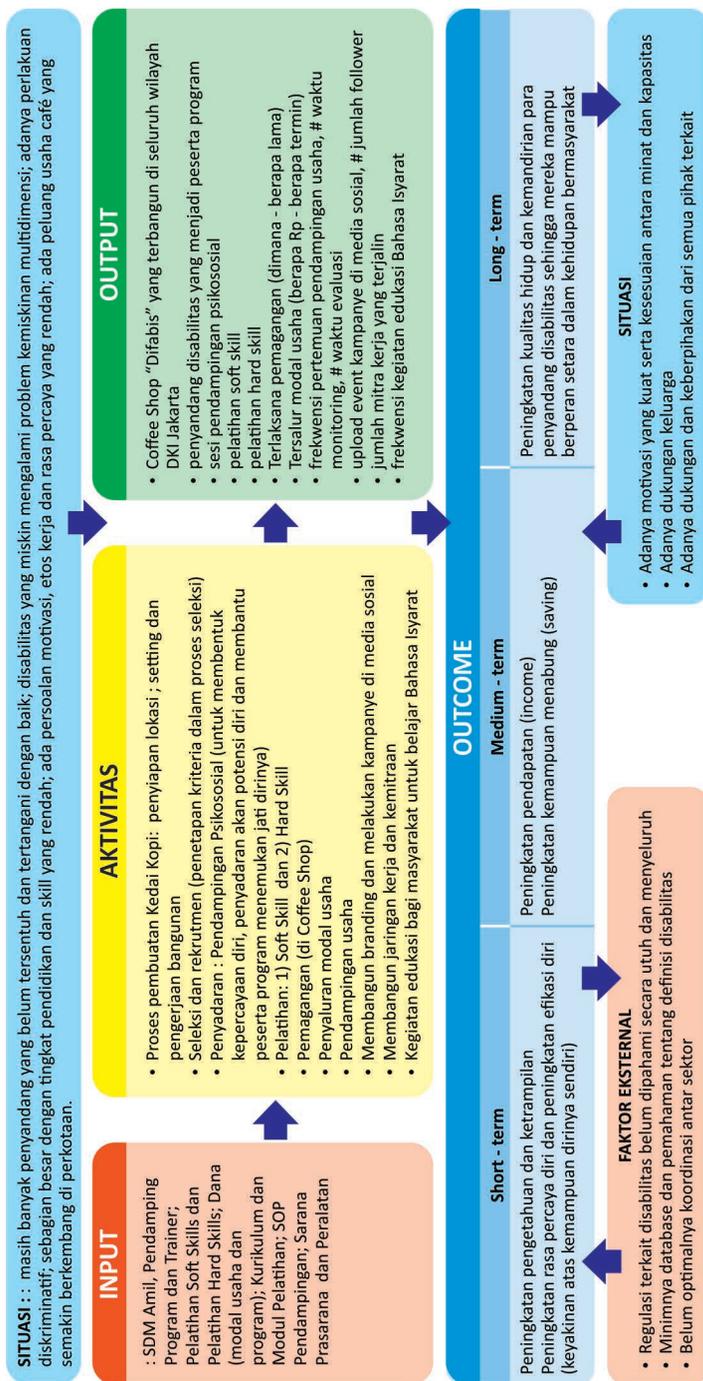
- Internship
- Training peningkatan skill; manajemen keuangan usaha mikro; optimalisasi penggunaan gadget dan penguasaan teknologi digital

6. Asumsi (Assumption) :

- Etos kerja dan semangat yang tinggi dari para penyandang disabilitas untuk bekerja dan berkarya
- Adanya dukungan dan keberpihakan dari semua pihak terkait
- Adanya kebijakan pada tataran teknis yang mendukung kesejahteraan penghidupan para penyandang disabilitas

d. Logic Model





Definisi Situasi :

Apabila merujuk pada prediksi PBB bahwa jumlah penduduk penyandang disabilitas adalah sebesar 15% dari jumlah penduduk di negara tersebut, maka masih banyak penyandang disabilitas yang belum tersentuh dan tertangani dengan baik. Model pengembangan ekonomi bagi para penyandang disabilitas masih belum menyentuh hajat hidup mereka, ditambah lagi masih minimnya lembaga yang dapat mengayomi masa depan mereka.

Penyandang disabilitas terkucil dari arus utama perekonomian dan cenderung hanya terlibat dalam aktifitas-aktifitas pseudo-ekonomi sehingga mereka mengalami beban kemiskinan multidimensi.

Rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan penyandang disabilitas menyebabkan mereka tidak memiliki skill yang memadai untuk mendapatkan pekerjaan. Penyandang disabilitas yang tidak memiliki pekerjaan (menganggur) tentunya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka secara mandiri sehingga menjadi beban keluarganya

Jikalau penyandang disabilitas berhasil menemukan pekerjaan, mereka mungkin dirugikan oleh tempat kerja yang tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhannya, dan mereka juga menghadapi hambatan terkait dengan akses fisik dan transportasi.

Membangun motivasi dan rasa percaya diri para penyandang disabilitas merupakan tantangan tersendiri. Banyak penyandang disabilitas yang sering diperlakukan permisif oleh keluarganya, tidak pernah bergaul dengan dunia luar, kurang memiliki informasi, sehingga mereka seringkali kurang memiliki motivasi dan keberanian untuk maju.

Kemampuan dan keberanian untuk berwirausaha yang masih rendah, begitu pula dengan kemampuan manajerial dan kapasitas membangun jaringan kerja, menjadikan penyandang disabilitas sulit untuk menjalankan usaha mandiri.

Sampai saat ini jenis ketrampilan yang diberikan kepada penyandang disabilitas kurang beragam dan belum berbasis pada kebutuhan pasar tenaga kerja atau peluang usaha. Padahal masih banyak jenis ketrampilan yang bisa dilakukan penyandang disabilitas, seperti ketrampilan sebagai barista.

Perkembangan bisnis cafe di Indonesia saat ini khususnya di kota-kota besar semakin berkembang dengan pesat. Banyak bermunculan wirausahawan yang membuka usaha cafe dengan berbagai konsep atau ide-ide yang dibuat untuk memikat konsumen dari berbagai kalangan. Dalam mengunjungi cafe, konsumen tidak hanya mencari produk saja berupa makanan dan minuman, tapi juga menginginkan pengalaman yang berbeda. Usaha café ini dapat membuka peluang kerja bagi penyandang disabilitas dengan sebuah konsep yang unik.

Identifikasi Outcome :

Long-term Outcome :

- Peningkatan kualitas hidup dan kemandirian para penyandang disabilitas sehingga mereka mampu berperan setara dalam kehidupan bermasyarakat

Medium-term Outcome :

- Peningkatan pendapatan para penyandang disabilitas (income)
- Peningkatan kemampuan menabung (saving)

Short-term Outcome :

- Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan
- Peningkatan rasa percaya diri dan peningkatan efikasi diri (keyakinan atas kemampuan dirinya sendiri)

Inputs, Activities, and Outputs:

1. Inputs Program

- a. SDM : Amil; Pendamping Program; Trainer
- b. Sarana dan prasarana berupa lokasi tanah dan bangunan kedai kopi; peralatan; mebeulair
- c. Modal usaha
- d. Sumber pendanaan mandiri yang rutin yang dapat digunakan untuk keberlanjutan pelaksanaan program

- e. SOP Pendampingan;
- f. Kurikulum dan Modul Pelatihan yang terstandar baik itu format, konten, metode pembelajaran maupun sistem monitoringnya.

2. Aktivitas Program

- a. Proses pembuatan Kedai Kopi:
 - penyiapan lokasi
 - setting dan pengerjaan bangunan Kedai Kopi
- b. Seleksi dan rekrutmen (penetapan kriteria dalam proses seleksi)
- c. Penyadaran :
 - Pendampingan Psikososial : untuk membentuk kepercayaan diri, penyadaran akan potensi diri dan membantu peserta program menemukan jati dirinya
- d. Pelatihan
 - Soft Skill : untuk menghilangkan mental block dan memperbaiki mind set; membangun etos kerja, serta mengenalkan budaya kerja
 - Hard Skill :
 - » Teori industri kopi dari hulu ke hilir
 - » Praktek teknik menyajikan kopi secara professional
 - » Pelatihan stock opname usaha Coffee Shop

- » Pelatihan pengelolaan keuangan pribadi dan manajemen keuangan usaha kecil
- » Pelatihan fotografi dan videografi untuk optimalisasi medsos instagram
- e. Pemagangan (di Coffee Shop) : untuk pengenalan suasana dan realitas usaha secara intens dan empirik
- f. Penyaluran modal usaha
- g. Pendampingan usaha
- h. Membangun branding dan melakukan kampanye di media sosial
- i. Membangun jaringan kerja dan kemitraan
- j. Kegiatan edukasi bagi masyarakat atau pengunjung yang ingin bersama-sama belajar Bahasa Isyarat

3. Output

- a. Terbangunya (berapa?) Coffee Shop “Difabis” di seluruh wilayah DKI Jakarta
- b. Terekrut (berapa?) penyandang disabilitas yang menjadi peserta program
- c. Terlaksananya proses penyadaran berupa pendampingan psikososial dalam (berapa?) sesi dalam kurun waktu (berapa lama?)
- d. Terlaksana pelatihan soft skill (berapa sesi?) dan kapan waktunya?
- e. Terlaksana pelatihan hard skill (berapa sesi?) dan kapan waktunya?

- f. Terlaksana pemagangan (dimana?) berapa lama?
- g. Telah tersalur modal usaha berapa Rp ? berapa kali termin pencairan?
- h. Telah terlaksana pendampingan usaha, berapa frekwensi pertemuan?, monitoring berapa kali per tahun?, evaluasi akhir tahun?
- i. Terlaksana kampanye di media sosial min berapa kali/hari upload dan up date moment? Berapa jumlah follower?
- j. Berapa jumlah mitra kerja yang terjalin/ tahun, siapa saja?
- k. Berapa kali frekwensi kegiatan edukasi Bahasa Isyarat ?

Informasi lain yang perlu diingat:

1. Faktor Eksternal :

- a. Peraturan perundangan tentang penyandang disabilitas belum diimplementasikan secara optimal di lapangan. Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang disabilitas pada tahun 2011, berikut terbitnya UU No 19 tahun 2011 tentang penyandang disabilitas, tetapi tampaknya sosialisasi oleh para stakeholders masih minim sehingga belum banyak dipahami.
- b. Minimnya database dan masih adanya ketidaksepahaman tentang definisi penyandang

disabilitas, menyebabkan kesulitan untuk menjangkau mereka dalam melakukan intervensi pemberdayaan

- c. Koordinasi antar sektor yang belum berjalan dengan baik diantara para pihak yang bertanggung jawab atas masa depan bagi para penyandang disabilitas

2. Asumsi

- a. Adanya motivasi serta kesesuaian antara minat dan kapasitas dari penyandang disabilitas

Motivasi penyandang disabilitas sendiri perlu dikembangkan, sehingga mereka memiliki kesadaran bahwa keberhasilan tidak terlepas dari motivasi diri untuk bisa berkembang. Motivasi penyandang disabilitas akan mudah untuk ditingkatkan, jika mereka merasa senang dalam melakukan pekerjaan, oleh karena itu kesesuaian antara minat, kapasitas yang dimiliki merupakan faktor penting dalam pemilihan bidang yang akan ditempuh.

- b. Adanya dukungan keluarga

Keluarga sangat diperlukan dalam memberikan motivasi dan memberikan dukungan serta memfasilitasi penyandang disabilitas dalam mengembangkan diri guna tercapai peningkatan kesejahteraan mereka.

- c. Adanya dukungan dan keberpihakan dari semua pihak terkait



MASJID TANGGAP BENCANA

Ketika hujan deras, dan siklus 5 tahunan, kawasan yang berada di Cipinang Melayu Jakarta Timur ini selalu akrab banjir. Banyak rumah warga yang terendam, sehingga penghuninya terpaksa mengungsi ke tempat yang aman. Terlebih mereka yang memiliki balita dan manula.

Setiap banjir itu pula, Masjid Al Muqorrobin yang berada di RT 5 RW 3 Cipinang Melayu, Kampung Makassar Jakarta Timur, langganan menjadi posko penanganan korban banjir di wilayah tersebut. Beragam layanan kedaruratan disiagakan di sini, seperti dapur umum, dan layanan medis. Selain itu, personil lengkap dengan peralatan evakuasi, perahu karet, dan mobil ambulans, juga senantiasa siaga.

Masjid Al Muqorrobin adalah salah satu dari 143 masjid yang menjadi mitra BAZNAS (BAZIS) dalam program kebencanaan. Mereka tergabung dalam program Masjid Tanggap Bencana (MTB). Program ini merupakan turunan dari BAZNAS (BAZIS) Tanggap Bencana (BTB), yang dibentuk BAZNAS, baik tingkat pusat maupun provinsi.

Melalui program ini, BAZNAS (BAZIS) menjadikan masjid sebagai mitra strategis dalam manajemen bencana, baik mitigasi maupun respon. Ketika memutuskan masjid menjadi mitra strategis, maka kami aktif melakukan pendampingan dan penguatan kompetensi agar personil masjid (takmir) bisa menjadi relawan andal dalam mengelola kebencanaan.



Masjid, selain sebagai tempat ibadah juga bisa menjadi entitas masyarakat yang sangat penting dalam manajemen bencana. Masjid bisa menjadi tempat berlindung (*shelter*) masyarakat saat terjadi bencana alam. Masjid bisa menjadi pusat informasi masyarakat ketika terjadi bencana. Masjid juga bisa menjadi pusat mitigasi, mulai dari pencegahan sampai pemulihan korban bencana alam, seperti gempa, banjir, gunung meletus, longsor, dan sebagainya.

Untuk itu, peran masjid sebagai komponen penting dalam manajemen bencana harus dipersiapkan sebaik mungkin. Ada pelatihan dan pendampingan yang simultan agar masjid beserta perangkatnya dapat menjadi tempat yang aman sekaligus nyaman bagi penyintas bencana.

Memersiapkan masjid yang ideal sebagai pusat operasi manajemen bencana memang memerlukan upaya yang serius. Tidak cukup kita datang saat bencana terjadi, tanpa menyiapkan kesiapsiagaan pengurus dan jamaahnya sejak jauh-jauh hari.

Seperti yang dilakukan BAZNAS (BAZIS) selama ini, secara intens kami melakukan pelatihan dan pendampingan. Pengurus dan remaja masjid menjadi sasaran utama. Beberapa materi pelatihan yang diberikan kepada para remaja masjid antara lain kajian risiko bencana, pembuatan peta dasar, peta ancaman, peta evakuasi, pembuatan sistem peringatan dini, prosedur tetap, dan gladi posko ketika terjadi bencana.

BAZNAS (BAZIS) menyadari betul peran penting masjid di tengah-tengah masyarakat. Selama ini keberadaan masjid menjadi

modal sosial yang sangat besar. Untuk itu BAZNAS (BAZIS) menjalin kolaborasi dengan ratusan masjid yang ada di Jakarta dalam program ini.

Saat ini sudah ada 143 masjid yang menjadi mitra aktif BAZNAS (BAZIS) Tanggap Bencana. Mereka akan selalu siap sedia ketika bencana terjadi, baik di daerah sekitar mereka, maupun di wilayah lain jika membutuhkan bantuan tambahan. Selain tanggap saat bencana, mereka juga rutin memberikan edukasi mitigasi bencana kepada jamaah dan masyarakat sekitar masjid.

Selain saat bencana alam, keterlibatan masjid dalam menghadapi bencana non-alam seperti pandemi juga sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Mereka lah yang berada di barisan terdepan dalam membantu dan melayani masyarakat.

Untuk itu, BTB secara rutin dan aktif menggalakkan kegiatan pelatihan bagi takmir masjid dan mushola di berbagai wilayah di DKI Jakarta. Secara garis besar kegiatan pelatihan Masjid Tanggap Bencana dilakukan dalam tiga tahapan utama:

1. Sosialisasi

Pemahaman yang baik dan menyeluruh tentang program Masjid Tanggap Bencana penting untuk dilakukan sebelum proses pelaksanaan kegiatan pelatihan. Oleh sebab itu, pengenalan program Masjid Tanggap Bencana hendaknya diberikan kepada semua peserta. Adapun tujuan dari pelaksanaan sosialisasi Masjid Tanggap Bencana ini adalah:

- a. Memberikan pemahaman kepada peserta tentang Program Masjid Tanggap Bencana secara utuh
- b. Memberikan kesempatan kepada semua peserta untuk menguatkan semangat kerja sama, komunikasi, dan koordinasi dalam melaksanakan peningkatan kemampuan komunitas masyarakat secara berkelanjutan.

2. Edukasi

Edukasi merupakan serangkaian kegiatan pelatihan Masjid Tanggap Bencana untuk mengenali secara baik dalam mengkaji risiko bencana, menyusun rencana tindakan mengurangi risiko bencana, dan latihan peningkatan keterampilan teknis melalui kegiatan simulasi kejadian bencana. Adapun edukasi pada pelatihan Masjid Tanggap Bencana mencakup:

- a. Kajian Risiko Bencana dan Rencana Aksi
- b. Pembuatan Sistem Peringatan Dini dan Peran
- c. Pembuatan Peta
- d. Manajemen Bencana Dasar dan Manajemen Posko
- e. Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD)
- f. Fire Rescue
- g. Simulasi

3. Pelaporan

BAZNAS (BAZIS) Tanggap Bencana bertanggung jawab untuk melakukan pembuatan laporan kegiatan.

A. MANAJEMEN BENCANA

Bencana adalah rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan yang disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (Dalglish et al., 2007). Bencana dapat terjadi, karena ada dua kondisi yaitu adanya peristiwa atau gangguan yang mengancam dan merusak (hazard) dan kerentanan (vulnerability) masyarakat. Bila terjadi hazard, tetapi masyarakat tidak rentan, maka berarti masyarakat dapat mengatasi sendiri peristiwa yang mengganggu. Suatu bencana dapat dirumuskan sebagai berikut: **Bencana = Bahaya x Kerentanan.**

Manajemen bencana adalah sebuah proses yang terus menerus dimana pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil merencanakan dan mengurangi pengaruh bencana, mengambil tindakan segera setelah bencana terjadi dan mengambil langkah-langkah untuk pemulihan. Prinsip manajemen bencana adalah bagaimana mengatasi keterbatasan manusia dalam memprediksi dan menghadapi bencana, yang kemudian dituangkan dalam strategi dan kebijakan dalam mengantisipasi, mencegah dan menangani bencana melalui tahapan penanggulangan bencana. Untuk memahami tugas pokok BAZNAS Tanggap Bencana maka perlu dipahami terlebih dahulu fase atau tahapan dalam manajemen kebencanaan.



Tahapan dalam Manajemen Kebencanaan :

a. Tahap Pencegahan (Prevention)

Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana (jika mungkin dengan meniadakan bencana. Misalnya : melarang pembakaran hutan dalam perladangan; melarang penambangan batu di daerah yang curam

b. Tahap Mitigasi.

Upaya yang dilakukan untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi serta menanggulangi resiko bencana. Rangkaian upaya yang dilakukan dapat berupa perbaikan dan modifikasi lingkungan fisik maupun penyadaran serta peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Ada dua bentuk mitigasi yakni mitigasi structural (membuat chekdam, bendungan, tanggul sungai

dll) dan mitigasi non structural (peraturan, tata ruang, pelatihan)

c. Tahap Kesiapsiagaan (Preparedness)

Upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana, melalui pengorganisasian langkah-langkah yang tepat, efektif dan siap siaga. Misalnya : penyiapan sarana komunikasi, pos komando dan penyiapan lokasi evakuasi. Tahap Kesiapsiagaan dilakukan menjelang sebuah bencana akan terjadi. Pada tahap ini alam menunjukkan tanda atau signal bahwa bencana akan segera terjadi. Maka pada tahapan ini, seluruh elemen terutama masyarakat perlu memiliki kesiapan dan selalu siaga untuk menghadapi bencana tersebut.

d. Peringatan Dini (Early Warning)

Upaya untuk memberikan tanda peringatan bahwa bencana kemungkinan akan segera terjadi. Pemberian peringatan dini harus : menjangkau masyarakat (accessible), segera (immediate), tegas tidak membingungkan (coherent), bersifat resmi (official)

e. Tahap Tanggap Darurat (Emergency Response)

Upaya yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana, untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan, terutama berupa penyelamatan korban dan harta bencana, evakuasi dan pengungsian. Bantuan darurat (relief)

merupakan upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa : pangan, sandang, tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi dan air bersih. Pendekatan pemberian bantuan, ada pendekatan konvensional dan ada pendekatan pemberdayaan.

f. Tahap Pemulihan (Recovery)

Proses pemulihan kondisi masyarakat yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana pada keadaan semula. Upaya yang dilakukan adalah memperbaiki prasarana dan pelayanan dasar (jalan, listrik, air bersih, pasar puskesmas dll)

g. Tahap Rehabilitasi (Rehabilitasi)

Upaya langkah yang diambil setelah kejadian bencana untuk membantu memperbaiki rumahnya, fasilitas umum dan fasilitas sosial penting, dan menghidupkan kembali roda perekonomian.

h. Tahap Rekonstruksi (Reconstruction)

Program jangka menengah dan jangka panjang guna perbaikan fisik, sosial dan ekonomi untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang lebih baik dari sebelumnya.

Jenis program Tanggap Bencana pada BAZNAS (BAZIS) adalah :

1. Program Tanggap Darurat.

Program ini merupakan kegiatan merespon saat terjadi bencana secara cepat tepat untuk memberi bantuan berupa kebutuhan mendesak. Program tersebut disesuaikan dengan kebutuhan, jenis bencana dan hasil assessment tim di lapangan. Kegiatan dilakukan adalah pencarian dan pertolongan korban saat bencana dan distribusi bantuan. Program berikutnya adalah program pasca bencana atau pemulihan. Contoh kegiatan distribusi logistik bahan pangan seperti layanan dapur umum, dapur air, gizi balita/bayi dan makanan siap saji. Logistik non pangan seperti penyediaan layanan kesehatan, ruang ramah asap, family kit, fasilitasi dan air bersih. Pada saat early recovery BAZNAS Tanggap menyediakan layanan psikososial dan layanan bangunan darurat.

2. Program Pengurangan Risiko Bencana.

Program ini merupakan kegiatan edukasi kepada komunitas. Program tersebut dibagi sesuai karakteristik masyarakat yakni sekolah, kampung, masjid, dan komunitas yang rentan terhadap bencana. Selain edukasi program BAZNAS Tanggap Bencana perlu penguatan dan jejaring dalam pelaksanaan program penanggulangan bencana. Program yang dilakukan adalah event nasional dan

internasional penanggulangan bencana dan pembentukan, pembinaan, dan penguatan relawan di daerah. Semua kegiatan tersebut adalah dalam rangka mengurangi risiko bencana kepada masyarakat yang rentan terhadap bencana.



Penanggulangan atau pengurangan resiko bencana oleh komunitas (community based disaster risk management) merupakan upaya pemandirian masyarakat dalam menghadapi resiko bencana yang kerap dihadapi. Komunitas terlibat dan bertanggung jawab terhadap program sejak perencanaan hingga pelaksanaan. Partisipasi aktif masyarakat diharapkan akan mengurangi kerentanan dan memperkuat kapasitas komunitas dalam penanggulangan bencana secara swadaya. Dengan demikian menghindari ketergantungan komunitas pada pihak eksternal.

B. LOGIC MODEL PROGRAM MTB

Definisi Situasi :

- Dalam menghadapi bencana, masyarakat sering tidak siap dikarenakan tidak adanya informasi bahaya dan cara melakukan penyelamatan. Masyarakat yang tidak memiliki kesiapsiagaan dalam menghadapi suatu bencana yang terjadi karena kurang mendapatkan pengetahuan tentang kebencanaan. Hal ini menyebabkan rendahnya pengetahuan masyarakat atau sebuah komunitas untuk berbuat sesuatu sesuai dengan perannya masing-masing. Untuk itu perlu dilakukan program mitigasi bencana dan peningkatan kapasitas kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
- Aktivitas manajemen bencana meliputi upaya pada saat pra-bencana, tanggap darurat dan pasca-bencana. Namun hal yang sering dilakukan adalah kegiatan masih berfokus pada tanggap darurat semata. Padahal yang sangat dibutuhkan adalah upaya kesiapsiagaan pada saat sebelum kejadian bencana melalui pencegahan dan mitigas. Sehingga jatuhnya korban akibat bencana yang terjadi di suatu lokasi kejadian bisa diminimalisir.
- Perencanaan anggaran belum maksimal. Perlunya adanya analisa perencanaan anggaran dalam upaya penanggulangan bencana sehingga dapat meningkatkan keefektifan dan efisien dalam merencanakan program penanganan bencana. Dalam melakukan tanggap

darurat sering menunggu dari ketersediaan anggaran yang didapatkan melalui donasi kebencanaan. Seharusnya dalam manajemen bencana yang mesti disiapkan adalah perencanaan yang baik melalui rencana kontingensi (renkon) dalam wilayah rawan bencana. Sehingga kajian risiko bencana dan penyusunan rencana kontingensinya telah dilakukan dengan baik.

- Belum adanya komunitas khususnya yang berbasis masjid yang bergerak dalam penanganan bencana di suatu lokasi tertentu. Kalaupun ada, sifatnya masih sporadis dimana gerakan penanganan bencana yang terjadi masih belum terorganisir dengan baik.
- Perlu adanya model manajemen bencana yang melibatkan beberapa unsur di masyarakat dalam hal ini masjid (pengurus/ takmir masjid dan jamaah), mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi dalam penanggulangan bencana.

Identifikasi Outcome :

Long-term Outcome :

- a. Meminimalkan resiko bencana
 - Penurunan angka kematian dan kesakitan akibat bencana
 - Mengurangi dampak buruk pada perekonomian akibat bencana

- Mengurangi potensi kehilangan kesejahteraan akibat bencana
- b. Membangun masyarakat tangguh bencana berbasis masjid

Medium-term Outcome :

- a. Mencegah terjadinya bencana
- b. Mampu mengelola resiko bencana secara mandiri
- c. Meningkatkan kepedulian dan rasa tanggung jawab terhadap resiko bencana di luar tempat tinggalnya
- d. Meminimalisir dampak bencana pada kerusakan asset dan hilangnya mata pencaharian

Short-term Outcome :

- a. Meningkatkan kesadaran terhadap kebencanaan
- b. Menambah dan memperkaya pengetahuan tentang :
 - Konsep pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan bencana
 - Aplikasi teknologi dalam mitigasi bencana
- c. Meningkatkan komitmen, sikap, ketrampilan, motivasi dalam pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan bencana

Inputs, Aktivitas dan Outputs:

Inputs Program

- a. SDM (Amil, Pengurus Masjid dan Relawan Berbasis Masjid)

- b. Waktu
- c. Dana (penganggaran dana untuk penanganan kebencanaan)
- d. Teknologi
- e. Sarana/ Prasarana
- f. Mitra kerja (Pemda DKI Jakarta, BNPB, BPBD DKI Jakarta, BAZNAS RI)

	Mitigasi	Kesiapsiagaan	Respon/ Tanggap Darurat	Recovery
Aktivitas	<ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi kemungkinan keadaan darurat (identifikasi resiko dan pemetaan bahaya) 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong keterlibatan masyarakat (baik pengurus masjid maupun warga di sekitar masjid) dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana • Mengembangkan dan menerapkan rencana kontingensi dan prosedur penanganan bencana – early warning system berbasis masjid 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dalam aksi respon/ tanggap darurat • Pelibatan organisasi mitra • Membangun rantai komando dengan mengaktifkan pusat operasi kedaruratan 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan aktivitas dan tindakan untuk kembali pada situasi normal atau bahkan lebih aman setelah keadaan darurat • Membangun hunian sementara

	Mitigasi	Kesiapsiagaan	Respon/ Tanggap Darurat	Recovery
	<ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi kelompok masyarakat rentan • Mengidentifikasi infrastruktur dan bangunan yang rawan terhadap bencana • Menyiapkan kebijakan, strategi dan SOP manajemen penanganan bencana berbasis masjid 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan dan pelatihan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan bencana kepada para pengurus masjid dan relawan masjid • Mengembangkan kurikulum pendidikan dan pelatihan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan bencana kepada para pengurus masjid dan relawan masjid. • Melakukan kampanye pendidikan kebencanaan di sosial media • Pengembangan aplikasi tanggap bencana berbasis masjid (?) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan bantuan keदारuratan antara lain meliputi : pencarian dan proses evakuasi, penanganan korban dan layanan medis/ pengobatan, trauma care, shelter, sanitasi dan air bersih, dapur umum, bantuan pangan dan non pangan, air hangat dan makanan siap saji. 	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun sarana ibadah darurat • Membangun sarana pendidikan darurat (ada kegiatan trauma healing bagi anak-anak) • Aktivitas dukungan psikososial bagi keluarga penyintas • Pemulihan ekonomi dan mata pencaharian (livelihood)

	Mitigasi	Kesiapsiagaan	Respon/ Tanggap Darurat	Recovery
Output	<ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya kebijakan disaster risk reduction (pengurangan resiko bencana) berbasis komunitas masjid : strateginya, pengarusutamaan penanganan kebencanaannya, dan Standard Operational Pro-cedur (SOP) 	<ul style="list-style-type: none"> Membangun kemitraan dalam penanganan bencana bersama dengan Pemda DKI, BNPB, BPBD DKI, BAZNAS RI. Terbentuknya keterlibatan warga, pengurus masjid dan relawan berbasis masjid dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana (community preparedness) Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan bencana kepada para pengurus masjid dan relawan berbasis masjid. 	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi sumber-sumber pendanaan untuk bisa memberikan pelayanan yang diperlukan dan melakukan penggalangan donasi Terbentuknya koordinasi aksi tanggap darurat bencana yang melibatkan mitra kerja multistakeholders Terbangunnya rantai komando dengan berfungsi pusat operasi kedaruratan berbasis masjid 	<ul style="list-style-type: none"> Masyarakat penyintas bencana berangsur-angsur kembali pada kehidupan normal, dengan terbangunnya sarana prasarana darurat : <ul style="list-style-type: none"> » terbangun hunian sementara

	Mitigasi	Kesiapsiagaan	Respon/ Tanggap Darurat	Recovery
	<ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya analisis kebencanaan/ kedaruratan ter-masuk pemetaan bahaya dan identifikasi resiko • Terbangunnya manajemen sumber daya air dan manajemen sumber daya alam yang selaras dengan manajemen resiko bencana/ banjir/ kekeringan, termasuk solusi yang berbasis penataan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kampanye pendidikan kebencanaan di media sosial • Terlaksananya kampanye pendidikan kebencanaan di media sosial • Tersusunnya kurikulum pendidikan dan pelatihan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan bencana kepada para pengurus masjid dan relawan berbasis masjid. • Terbangunnya kapasitas pengurus masjid dan relawan berbasis masjid dalam melaksanakan emergency respon. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kegiatan bantuan kedaruratan : <ul style="list-style-type: none"> » pencarian dan proses evakuasi, » penanganan korban dan layanan medis/ pengobatan, trauma care, » shelter, » sanitasi dan air bersih, » dapur umum, air hangat dan makanan siap saji. » bantuan pangan dan non pangan, 	<ul style="list-style-type: none"> » terbangun sarana pendidikan darurat » terlaksana kegiatan trauma healing bagi anak-anak » terlaksananya kegiatan dukungan psikososial bagi keluarga penyintas • Pemulihan kegiatan perekonomian

	Mitigasi	Kesiapsiagaan	Respon/ Tanggap Darurat	Recovery
	<ul style="list-style-type: none"> Dikembangkan-nya infrastruktur dan bangunan yang aman dan tahan terhadap bencana 	<ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya contingency and emergency plan berbasis komunitas masjid Terbangunnya sistem peringatan dini terhadap bahaya bencana (early warning system) pada komunitas masjid baik warga sekitar, pengurus masjid maupun para relawan/ pemuda Terjalinnya kemitraan multistakeholder dalam penanganan kebencanaan dan sistem jaring pengaman yang adaptif (adaptive safety nets) 	<ul style="list-style-type: none"> Terkumpulnya dana penggalangan donasi sehingga dapat meng-cover kegiatan aksi kedaruratan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemulihan mata pencaharian para penyintas

Informasi lain yang perlu diingat:

1. Faktor Eksternal :

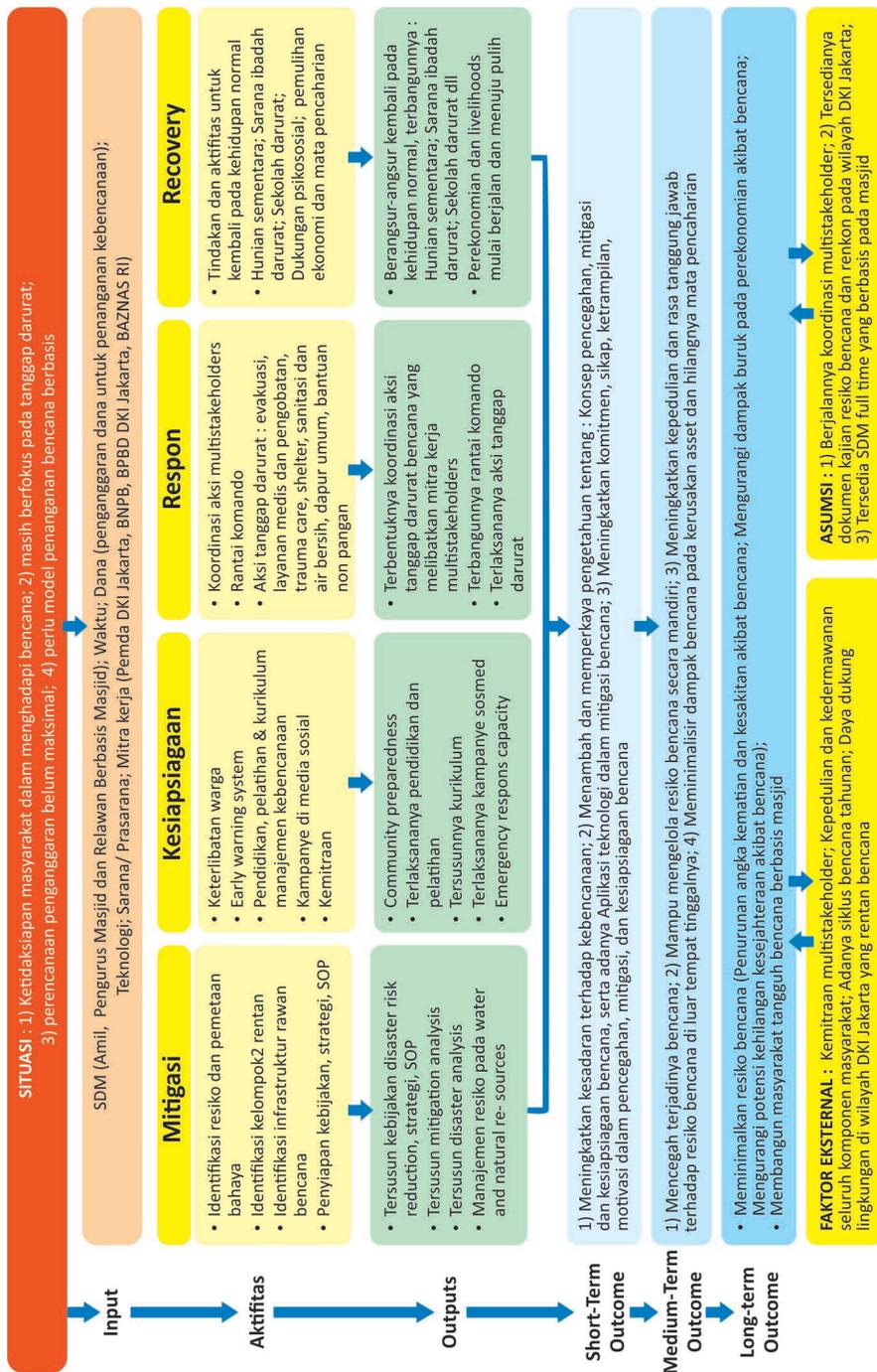
- a. Dukungan kemitraan pentahelix (multistakeholder) dalam penanganan kebencanaan
- b. Kepedulian dan kedermwanan seluruh komponen masyarakat dalam masalah kebencanaan
- c. Adanya siklus bencana tahunan.
- d. Daya dukung lingkungan di wilayah DKI Jakarta yang rentan bencana

2. Asumsi :

- a. Berjalannya fungsi koordinasi lintas pelaku dalam penanganan kebencanaan di wilayah DKI Jakarta, antara BNPB, BPBD DKI Jakarta, BAZNAS RI, BAZNAS BAZIS DKI dan Pengurus Masjid di seluruh wilayah DKI Jakarta.
- b. Tersedianya dokumen kajian risiko bencana dan *contingency plan* yang telah disusun oleh Pemda DKI dalam hal ini BPBD wilayah DKI, sebagai kerangka acuan. Pengkajian risiko bencana merupakan suatu pendekatan untuk memperlihatkan potensi negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang mengancam, dengan menggunakan parameter indeks ancaman, kerentanan dan kapasitas. Sedangkan *contingency plan* merupakan perencanaan dalam

menghadapi risiko bencana di suatu wilayah tertentu. Rencana kontigensi ini mungkin tidak selalu diaktifkan jika keadaan yang diperkirakan tidak pernah terjadi. Namun keberadaan dokumen ini sangat penting dalam melakukan program penanganan kebencanaan khususnya di wilayah DKI Jakarta.

- c. Ketersediaan SDM pengurus masjid yang secara totalitas dapat menjalankan program Masjid Tanggap Bencana, bukan sebagai pekerjaan sampingan. Sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dalam menjalankan suatu program kegiatan.





BEDAH KAWASAN

Bangunan penuh warna nampak mencolok di sebelah kiri sebelum memasuki *under pass* Jl. Basuki Rahmat Jakarta Timur. Hiasan mural mewarnai tiap sudut kawasan, yang letaknya tak jauh dari pusat perbelanjaan mainan anak terbesar di timur Jakarta, Pasar Gembong. Ada mural berisi informasi seputar kawasan, ada juga yang mengandung pesan moral, budaya, hingga anjuran menjaga lingkungan agar tetap sehat dan bersih.

Sebanyak 138 rumah, rata-rata berlantai dua, tersusun rapi memenuhi kawasan yang dinamai “Kampung Gembira Gembong” ini. Kawasan ini juga dilengkapi dengan ruang terbuka interaksi sosial, seperti PAUD, TPA, mushola, hingga Posyandu. Selain itu, ada juga wi fi yang bisa dimanfaatkan bersama oleh penduduk setempat.

Lima bulan sebelumnya, kawasan ini adalah pemukiman padat penduduk yang berada di tepian kali Ciliwung. Saking padatnya, sinar matahari pun sulit menembus ke dalam kamar rumah warga. Alih-alih ruang terbuka hijau dan sarana interaksi sosial.

Pada Ahad, 24 April 2022, api melahap kawasan padat penduduk di Pasar Gembong, Jakarta Timur. Api diduga muncul akibat arus pendek listrik dari salah satu rumah warga. Kobaran api yang sangat cepat dan besar membuat warga dan petugas tak sanggup memadamkan api seketika. Padatnya pemukiman dan banyaknya rumah yang terbuat dari kayu membuat api begitu cepat merambat ke bangunan lain.

Kebakaran di Pasar Gembrong ini telah menghancurkan 400 bangunan. Total luas wilayah yang terbakar mencapai 1.200 meter persegi. Dalam peristiwa tersebut 450 kepala keluarga atau sekitar 1.000 jiwa di lima RT Kelurahan Cipinang Besar Utara terdampak kebakaran itu.

Tim BAZNAS (BAZIS) Tanggapan Bencana langsung turun membantu masyarakat yang terdampak musibah ini. Dalam perkembangannya, setelah masa tanggap darurat selesai, disepakati bahwa BAZNAS (BAZIS) dengan bantuan Pemerintah Provinsi akan merevitalisasi kawasan ini. Tujuannya, masyarakat yang telah kehilangan harta benda bisa kembali mendapatkan penghidupannya. Tidak hanya rekonstruksi, kawasan ini direvitalisasi menjadi kawasan hunian yang layak, aman dan sehat.

Dalam penilaian yang dilakukan tim BAZNAS (BAZIS) diketahui, salah satu kerentanan kebakaran di wilayah tersebut adalah karena ketidakmampuan mengakses sumber air untuk memadamkan api. Padahal, tak jauh dari kampung tersebut terdapat sumber air yang melimpah, yaitu Kali Ciliwung. Itu karena semua akses menuju kali tertutup bangunan rumah. Untuk itu, dalam rencana revitalisasi kampung tersebut disepakati, sepanjang garis sempadan sungai, tidak ada bangunan yang berdiri.

Berangkat dari kesepakatan ini, serta urun rembug warga yang aktif terlibat dalam perencanaan, konsep kampung diubah menjadi “*water front city*”, yaitu sungai menjadi halaman rumah. Dengan demikian, sungai yang tadinya menjadi muara pembuangan yang





kumuh dan kotor harus diubah menjadi beranda depan yang indah.

Catatan penting dalam proses revitalisasi kawasan ini adalah pelibatan masyarakat secara aktif dalam perencanaan. Kami menyebutnya “participatory design”. Masyarakat menjadi subjek mandiri yang memiliki sumbangsih besar dalam menentukan masa depan timpat tinggal mereka. Untuk itu, desain yang dilakukan harus mengakomodir kepentingan-kepentingan mereka. Tentu dengan batasan-batasan tertentu.

Pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan ini senafas dengan semangat pemerintah provinsi DKI Jakarta dan BAZNAS (BAZIS) selama ini, yaitu “kolaborasi”. Dengan pelibatan masyarakat secara aktif, program yang kita canangkan dan jalankan bisa berjalan secara berkelanjutan, karena sudah sesuai dengan kebutuhan ril masyarakat.

Tidak hanya BAZNAS (BAZIS) dan masyarakat, pihak pemerintah kota dan pemerintah provinsi juga terlibat aktif dalam pembangunan Kampung Gembira Gembrong ini. Mulai dari Dinas Sumber Daya Air (SDA), Pekerjaan Umum, Bina Marga, hingga “Pasukan Oranye” Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU), juga ambil bagian dalam proses pembangunan. Bahkan, pabrik cat ternama juga turut berpartisipasi dalam program revitalisasi ini. Mulai dari pekerjaan teknis konstruksi, hingga finishing dan perapihan sarana seperti pewarnaan dan gambar mural.

Bagi BAZNAS (BAZIS), revitalisasi terhadap kampung-kampung yang terkena bencana telah menjadi program utama sejak tahun 2020. Banyak kampung yang telah direvitalisasi dengan dengan mengusung konsep “Kampung Regeneration” yang ingin menyelaraskan dengan konsep “City Regeneration” yang diusung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Kalimat yang sering didengarkan Gubernur DKI, “singkirkan kumuhnya, hidupan kampungnya” menjadi pegangan kami. Sehingga kami memulai program ini dengan mengidentifikasi apa *vulnerability* yang dapat kami perbaiki sehingga menjadi kampung yang kuat, tangguh dan hidup. Di saat yang sama kami juga mengidentifikasi kekuatan yang bisa kita tingkatkan.

Pada konsep “Kampung Regeneration” Itu pula kami membuat standar kampung sehat yang meliputi sehat rohani, sehat jasmani, sehat intelektual, sehat finansial dan sehat lingkungan serta sosialnya. Konsep lima sehat ini kami bangun dari pemahaman

mengenai lima maksud diturunkannya agama, yang dikenal dengan Maqashid Syar'iyah.

Kampung Gembira Gembrong yang menonjolkan aneka warna merupakan citra kawasan ini secara mikro dan Provinsi DKI Jakarta secara makro sebagai kota paling multikultur di dunia. Dengan perbedaan budaya dan latar belakang penduduknya yang beragam, terdapat keharmonisan dan kesatuan visi untuk membangun tempat tinggal mereka yang lebih nyaman, aman, dan sehat.

Revitalisasi yang dilakukan di Pasar Gembrong ini dimaksudkan untuk mengembalikan karakter kampung yaitu, guyub, rukun, dan gotong royong. Untuk itu diciptakan berbagai sarana yang memungkinkan warga saling berinteraksi antara satu sama lain, sehingga menumbuhkan dan menguatkan modal sosial yang dimiliki.

Pembangunan kampung ini juga mempertimbangkan aspek kesehatan dan kebersihan. Saluran air dan sanitasi diatur sedemikian rupa sehingga tidak mencemari lingkungan kampung dan sungai yang berada di depan. Ada 16 titik sumur resapan untuk menampung air, serta *septic tank* sebagai instalasi pengolahan air limbah. Dengan demikian, kami tidak sekedar membangun fisik bangunan, melainkan juga perilaku hidup masyarakat agar lebih sehat.

Selain *hard infrastructure*, kami juga membangun *soft infrastructure* berupa : Kampung Tanggap Bencana, Kampung Sehat, Kampung Berdaya, dan Kampung Beriman. BAZNAS

(BAZIS) didukung berbagai pihak telah memberikan pelatihan kepada pemuda agar tanggap terhadap bencana seperti kebakaran, banjir, dan potensi bencana lainnya. Juga melakukan sosialisasi penggunaan listrik yang aman. Mereka juga dirahkan untuk meningkatkan kesadaran hidup sehat, program pembasmian jentik nyamuk, dan pengetesan kualitas air minum.

Di bidang ekonomi, mereka diberikan pelatihan marketing online untuk meningkatkan omset bisnis, serta beragam jenis usaha kreatif lainnya. Tak ketinggalan, berbagai penyuluhan di bidang keagamaan dan sosial juga selalu digalakkan, agar tercipta lingkungan yang kondusif.

A. MASALAH KLASIK PERKOTAAN

Salah satu masalah laten ibu kota adalah pemukiman padat dan kumuh. Kondisi hunian yang semrawut, ditambah sanitasi yang buruk dan sirkulasi udara yang terbatas, membuat kualitas hidup masyarakat sangat tidak sehat. Tingkat kerentanan masyarakat juga sangat tinggi karena potensi kebakaran dan banjir.

Masalah pemukiman padat dan kumuh ini seiring dengan laju urbanisasi yang terus terjadi di kota-kota besar, termasuk Jakarta. Bahkan, menurut catatan World Bank, laju urbanisasi di Indonesia per tahun tumbuh lebih cepat daripada negara Asia lainnya. World Bank memprediksi pada 2025 sebanyak 68 persen populasi Indonesia akan berpusat di kota. Kepadatan populasi perkotaan di Indonesia meningkat tajam, dari 7.400 orang per kilometer persegi menjadi 9.400 orang tiap tahun.

Jumlah penduduk di DKI Jakarta yang terus bertambah setiap tahun ini berakibat pada tingginya permintaan rumah bagi pekerja pendatang di ibu kota. Bagi yang berpenghasilan menengah ke atas, rumah susun sewa atau apartemen tentu menjadi pilihan. Sebaliknya, bagi pekerja informal dan serabutan, bangunan sederhana, atau bahkan tidak layak huni, menjadi satu-satunya pilihan ketika mengadu nasib di Jakarta.

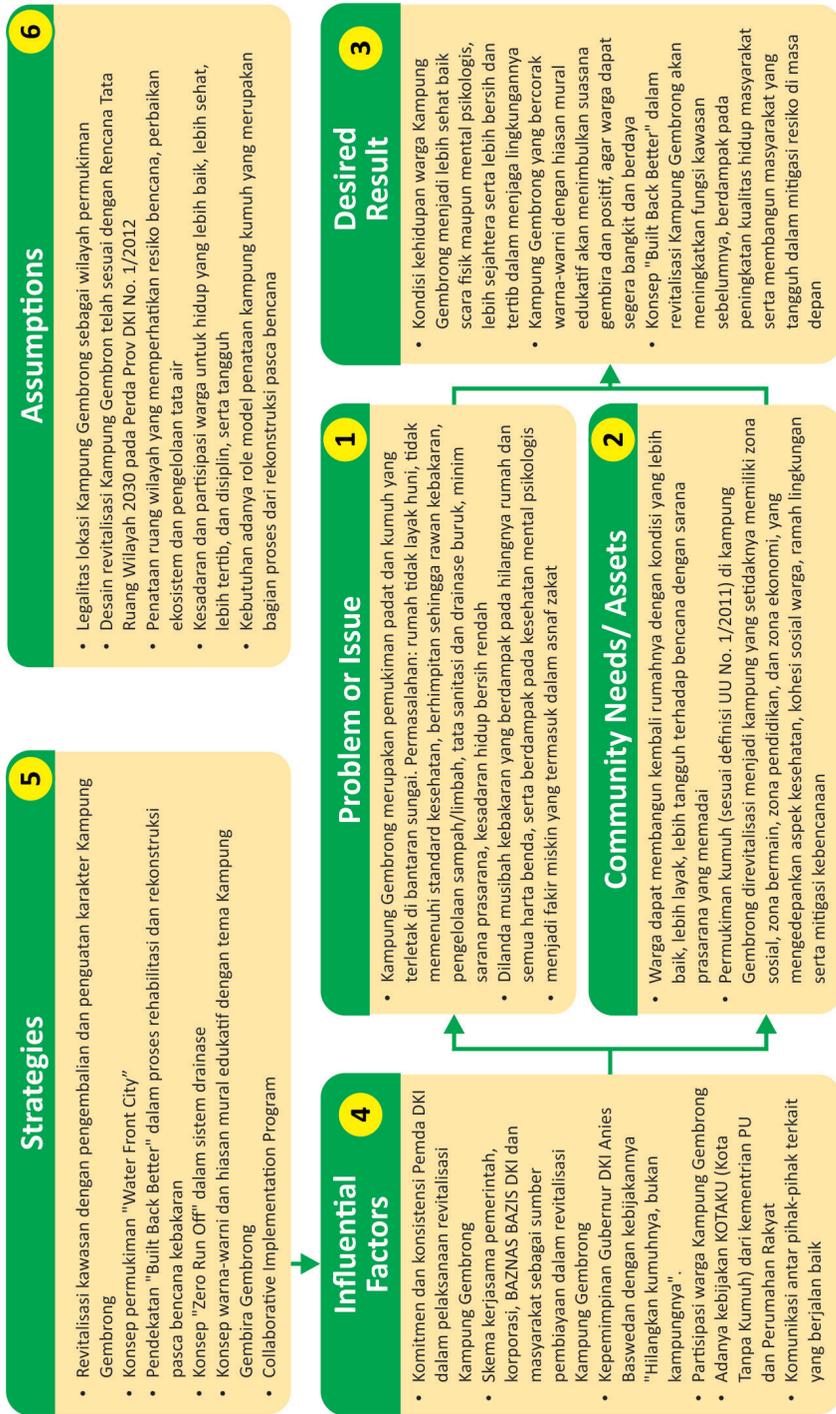
Dalam penataan kawasan, selama ini yang sering terjadi adalah relokasi atau penggusuran yang diiringi kekerasan. Warga yang terdampak pun mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi sehingga menimbulkan kohesi sosial.

Harus diakui, penataan wilayah dalam sebuah pembangunan sering kali tidak dapat dihindari. Hanya yang perlu digarisbawahi adalah menghindari cara-cara kekerasan dalam setiap prosesnya. Warga harus dilibatkan dan diajak komunikasi secara intens sehingga tujuan bersama dapat tercapai. Tidak ada pihak yang dirugikan, dan proses pembangunan dapat tercapai.

Proses revitalisasi yang dilakukan BAZNAS (BAZIS) di Pasar Gembrong, juga di berbagai wilayah lainnya di Jakarta, adalah salah satu contoh bagaimana proses pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat terdampak serta kolaborasi banyak pihak. Tak ayal, pelaksanaan pembangunan dan revitalisasi kampung ini hanya membutuhkan waktu sekitar tiga bulan setelah desain kampung disepakati.

B. STUDI KASUS PROGRAM KAMPUNG GEMBIRA GEMBRONG

a. Konstruksi Theory Of Change : Program Planning



Masalah (*problem statement*) :

Pasar Gembrong terkenal sebagai pusat penjualan aneka mainan anak yang murah meriah. Para pedagang mainan di Pasar Gembrong ini bertempat tinggal di wilayah yang disebut Kampung Gembrong. Kampung Gembrong yang terletak di pinggiran Sungai Ciliwung, termasuk permukiman padat dan kumuh yang menghadapi permasalahan antara lain : 1) luas bangunan yang sangat sempit dengan kondisi yang tidak memenuhi standar kesehatan dan kehidupan sosial, 2) kondisi bangunan rumah yang saling berhimpitan sehingga rentan terhadap bahaya kebakaran, 3) drainase yang sangat buruk, 4) jalan lingkungan yang buruk dan sempit, 5) kebiasaan masyarakat membuang limbah domestik dan sampah ke sungai yang menyebabkan penurunan kualitas air dan lingkungan serta banjir pada musim penghujan, 6) ketersediaan sarana MCK yang sangat terbatas.

Kampung Gembrong juga termasuk kawasan yang rawan bencana, khususnya kebakaran dan banjir. Kebakaran merupakan salah satu bencana yang sangat sering terjadi di daerah perkotaan padat penduduk. Warga yang berlokasi di RW 1 Kelurahan Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur, atau yang dikenal sebagai Kampung Gembrong mengalami kebakaran hebat pada 25 April 2022. Warga yang mengalami musibah kebakaran, kondisinya menjadi minus dan tidak lagi mempunyai asset sehingga mereka termasuk

kategori fakir miskin dalam asnaf zakat. Selain dampak materiil berupa kehilangan rumah dan segala harta bendanya, musibah kebakaran juga berdampak pada kondisi psikologis.

Kebutuhan Komunitas (*community needs*):

Biasanya pasca musibah kebakaran, warga akan berusaha membangun kembali rumahnya secara seadanya dan tidak tertata sehingga akan kembali menjadi pemukiman kumuh, liar dan beresiko tinggi terjadi kebakaran. Untuk itu diperlukan pendekatan “build back better” yakni membangun kembali dengan lebih baik dari sebelum kejadian bencana. Tidak hanya sekadar membangun kembali rumah atau bangunan yang hancur dengan risiko yang sama, tetapi membangun kembali Kampung Gembrong yang baru yang lebih tangguh terhadap bencana, melalui penataan prasarana, sarana dan sistem pelayanan masyarakat yang lebih baik dan lebih aman dari sebelum terjadinya bencana.

Hunian dengan sirkulasi udara yang buruk, pengap dan tidak ada pencahayaan matahari, jarak antar bangunan yang rapat dan padat, akses jalan yang sempit, sistem drainase yang buruk, kondisi persampahan yang berserakan dan menumpuk, kebiasaan warga membuang sampah dan limbah domestiknya ke sungai, serta sarana air bersih dan sarana MCK yang terbatas, direvitalisasi menjadi kawasan yang lebih baik dengan penataan pola permukiman, penataan terhadap fisik bangunan, penyediaan sarana dan prasarana seperti akses jalan

yang memadai dengan jalur evakuasi, sistem drainase yang baik, tempat pembuangan sampah dan pengelolaan sampah komunal, ruang terbuka publik yang ramah untuk semua rentang usia, sarana pendidikan yakni PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), sarana kesehatan yakni Posyandu, mushola sebagai ruang sosial pusat bagi kegiatan bermasyarakat warga, serta pengembangan ruang aktifitas ekonomi masyarakat.

Revitalisasi Kampung Gembrong ini mengedepankan aspek kesehatan, kohesi sosial warga, ramah lingkungan serta mitigasi kebencanaan, sehingga warga dapat menempati hunian baru yang lebih baik daripada sebelum bencana, dapat memiliki gaya hidup dan kebiasaan baru yang lebih tertib dan disiplin, khususnya untuk mencegah berulangnya kasus kebakaran.

Hasil Yang Diharapkan (*Desired Result - Outputs, Outcomes, Impacts*)

Warga Kampung Gembrong pasca bencana kebakaran dapat menempati kawasan permukiman yang layak huni, yaitu kampung yang sehat, kampung berdaya, kampung beriman, dan kampung tanggap bencana. Dengan menempati kawasan permukiman layak huni ini, diharapkan kondisi kehidupan warga Kampung Gembrong menjadi sehat baik secara fisik maupun mental spiritual, lebih sejahtera serta kohesi sosial antar warga juga meningkat.

Mengembalikan kehidupan warga terdampak kebakaran dengan berbagai persoalan psikologis, rasa traumatik, kehilangan harta benda dan sebagainya, dengan penataan fisik bangunan rumah permanen layak huni bernuansa warna-warni yang dihiasi mural dengan berbagai tema edukatif menggambarkan suasana Kota Jakarta, sehingga memberikan suasana gembira dan positif. Nuansa bangunan rumah berwarna-warni yang menimbulkan suasana gembira dan positif ini, diperlukan warga untuk memperbaiki kondisi mental dan psikologis pasca musibah kebakaran.

Kampung Gembrong menjadi salah satu ikon penataan kampung di Jakarta dengan mengusung konsep Kampung Gembira Gembrong yang menjadikan warga masyarakat dapat bangkit, berdaya, serta gembira dalam aktivitasnya pasca bencana kebakaran. Kampung Gembrong juga menjadi salah satu role model penanganan pasca bencana dengan konsep revitalisasi melalui pembangunan kembali suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya dan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan kembali Kampung Gembrong dengan pendekatan “build back better” tidak hanya sekadar membangun kembali rumah atau bangunan yang hancur, tetapi membangun masyarakat yang tangguh dalam memitigasi risiko bencana di masa depan.

Faktor-Faktor Yang Berpengaruh (*Influential Factors*)

Konsistensi Pemda DKI Jakarta dalam merencanakan, memprogramkan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan revitalisasi Kampung Gembrong.

Adanya skema kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat (public private community partnership) dalam proses revitalisasi kawasan Kampung Gembrong pasca bencana kebakaran

Adanya sumber-sumber pembiayaan swadaya bekerjasama dengan swasta/ perusahaan pada program CSR, bantuan/ hibah dana zakat dari BAZNAS BAZIS DKI, dan anggaran pemerintah. Penyaluran dana zakat dari BAZNAS BAZIS DKI untuk para penyintas bencana kebakaran di Kampung Gembrong karena mereka termasuk ke dalam kategori asnaf zakat yakni fakir dan miskin melalui program Bedah Kawasan.

Kepemimpinan Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Anies Baswedan dengan kebijakan “Hilangkan Kumuhnya, Bukan Kampungnya”, berupa program penataan kampung kumuh untuk menghilangkan kekumuhannya dengan tanpa menghilangkan atau menggusur kampung di sana.

Peran dan partisipasi warga masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang cukup tinggi dalam proses penanggulangan bencana, kerjasama dan koordinasi serta komunikasi yang baik antar pemangku kepentingan.

Adanya kebijakan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dari Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan, sesuai dengan Permen PUPR No. 14 tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Dan Permen PU No.18 Tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan.

Strategi

Revitalisasi kawasan Kampung Gembrong pasca bencana kebakaran melalui peningkatan kualitas penataan bangunan dan lingkungan yang memenuhi standar minimal pelayanan prasarana sarana kawasan sehingga mampu memberdayakan aktivitas sosial warga, membangun kohesivitas sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Konsep Revitalisasi Kampung Gembira Gembrong adalah revitalisasi dengan pengembalian dan penguatan karakter kampung yang terkenal sebagai pusat mainan anak yang terjangkau dan *up to date*, organik secara pertumbuhan, dan multikultur

Kampung Gembrong sebelum musibah kebakaran, merupakan kawasan permukiman yang membelakangi sungai Ciliwung dan menghadap ke jalan raya Basuki Rachmat. Dengan mengusung konsep hunian *Water Front City*, yakni pengembangan daerah tepian sungai yang menjadikan sungai sebagai halaman depan, diharapkan masyarakat akan lebih memperindah dan memelihara sungai sebagai salah satu sumber dan ekosistem lingkungan hidup mereka.

Konsep Zero Run Off pada sistem drainase yakni drainase dengan sistem vertikal sehingga air langsung masuk dan tidak menimbulkan genangan-genangan saat hujan antara lain dengan membuat sumur resapan dan kolam resapan. Permukiman padat penduduk dan padat bangunan menyebabkan peningkatan pada air limpasan karena banyaknya lapisan permukaan tanah yang tidak tembus air (*permeable*) dan berkurangnya jumlah lahan terbuka.

Pendekatan “Build Back Better” dalam proses pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca bencana kebakaran, dengan tidak hanya sekadar membangun kembali rumah atau bangunan yang hancur dengan risiko yang sama, tetapi membangun masyarakat yang tangguh bencana agar risiko bencana berkurang secara signifikan. Tidak hanya mengembalikan masyarakat ke kondisi awal, tetapi juga untuk memitigasi risiko bencana sehingga dapat lebih tangguh di masa depan. Dengan konsep Build Back Better maka menghasilkan

rancangan rumah yang lebih baik, kawasan dengan fasilitas yang lebih lengkap, pemukiman yang jauh lebih nyaman dan sehat dibandingkan dengan sebelum terjadinya musibah kebakaran.

Kolaborasi (Collaborative Implementation Program – CIP) adalah implementasi kegiatan peningkatan kualitas permukiman berbasis masyarakat melalui penanganan bersama multipihak. Collaborative Implementation Program ini adalah salah satu program Pemerintah DKI Jakarta untuk mengimplementasikan kebersamaan masyarakat dalam menata lingkungan.

Konsep Warna Kawasan Kampung Gembira Gembrong yakni penggunaan warna yang beragam pada bangunan yang mewakili citra Kawasan Kampung Gembira Gembrong secara mikro, dan Provinsi DKI Jakarta secara makro sebagai salah satu kota paling multikultur di dunia. Dengan perbedaan budaya dan latar belakang para penduduknya yang beragam, terdapat keharmonisan dan kesatuan visi yang kuat untuk kawasan dan untuk daerah yang ditinggali.

Asumsi

Lokasi kampung Gembrong secara hukum memang bisa dibangun kembali permukiman berdasarkan hasil identifikasi lokasi pada saat rekonstruksi pasca bencana kebakaran, sehingga proses revitalisasi kawasan dapat dilakukan. Tetapi ada area

yang tidak direkomendasikan untuk dibangun kembali hunian yakni pada Garis Sempadan Sungai (GSS) selebar 5 meter dari sungai yang berada di sisi selatan Kampung Gembrong yang terdampak kebakaran. Jumlah Rumah yang direlokasi adalah 19 unit rumah, karena lokasinya yang berada di Garis Sempadan Sungai sehingga tidak memungkinkan dibangun kembali rumah hunian di lokasi tersebut.

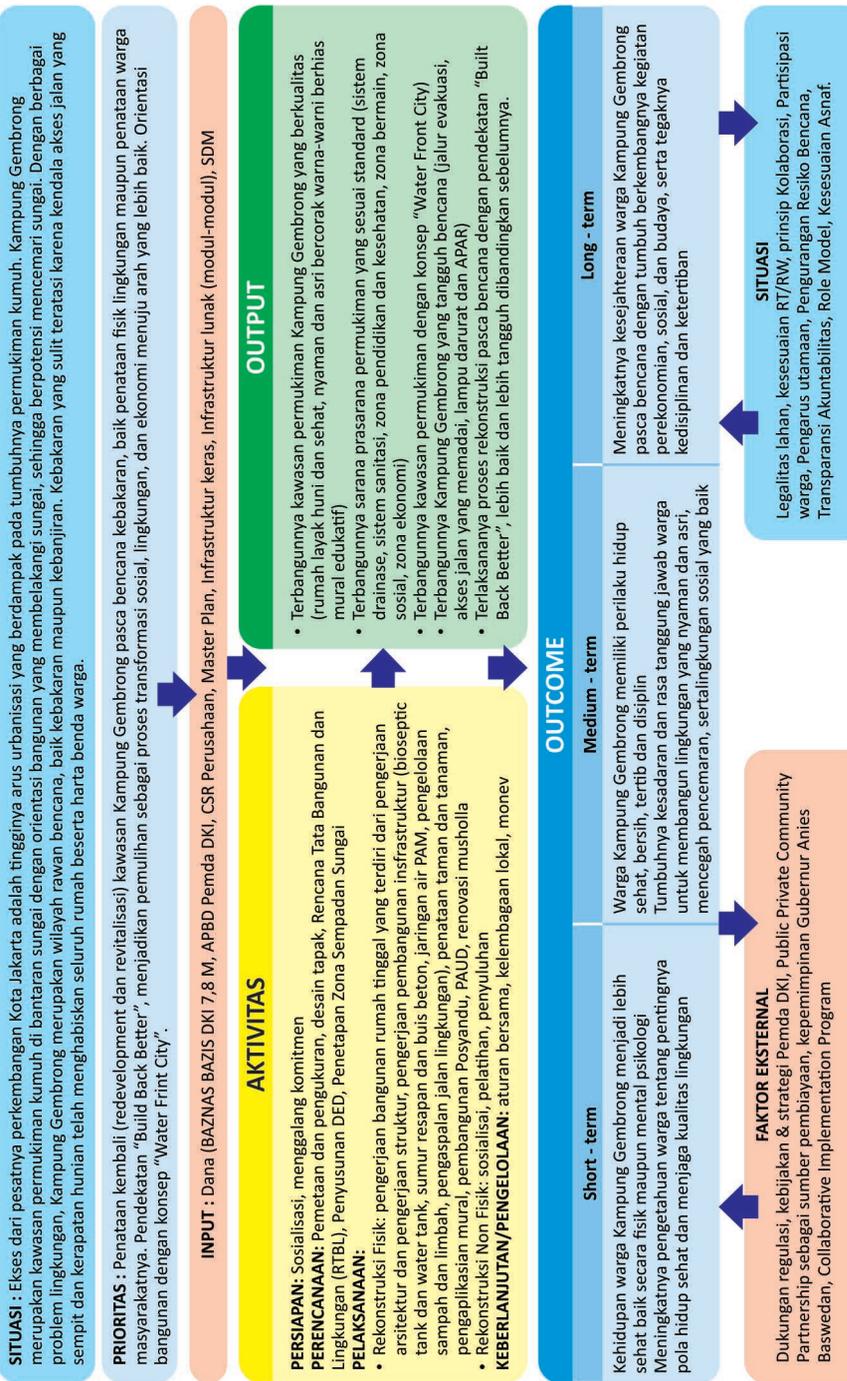
Desain revitalisasi kawasan pasca bencana kebakaran Kampung Gembrong telah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030.

Dukungan multistakeholder dalam penataan ruang wilayah Jakarta yang memperhatikan resiko bencana, perbaikan ekosistem dan pengelolaan tata air, serta *awareness* terhadap perubahan iklim dan pemanasan global.

Kesadaran dan partisipasi penuh warga Kampung Gembrong untuk membangun kehidupan yang lebih baik, lebih sehat, lebih tertib dan disiplin, serta tangguh.

Kebutuhan adanya role model penanganan pasca bencana di wilayah DKI Jakarta dengan konsep revitalisasi kawasan dan pendekatan “build back better”.

b. Logic Model Kampung Gembira Gembrong



Situasi

Perkembangan Kota Jakarta yang begitu pesat dengan berbagai daya tariknya, menyebabkan tingginya arus urbanisasi yang tidak sebanding dengan terbatasnya lahan permukiman. Hal ini menjadi salah satu faktor terbentuknya permukiman kumuh. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman kumuh merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Sedangkan perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Biasanya area permukiman kumuh di perkotaan secara sporadik menyebar pada tiga tipologi kawasan yaitu permukiman kumuh wilayah pesisir, bantaran sungai dan kampung tradisional. Permukiman kumuh bantaran sungai merupakan kawasan permukiman yang berada di sepanjang bantaran sungai, seperti Kampung Gembrong berada di bantaran sungai Ciliwung. Permukiman kumuh Kampung Gembrong ini, posisi atau orientasi bangunan rumahnya membelakangi sungai. Dengan orientasi bangunan permukiman yang membelakangi sungai, maka warga biasanya membuang sampah dan limbah domestik ke sungai. Letak

bangunan yang tidak teratur, utilitas yang tidak berfungsi baik, fasilitas pelayanan dan sarana prasarana yang minim, disertai kebiasaan penduduk yang kurang baik menyebabkan kualitas lingkungan pemukiman tepi sungai semakin buruk dan juga disfungsi sungai.

Dengan berbagai problem lingkungan tersebut, Jakarta menjadi langganan bencana banjir dan kebakaran. Banjir biasanya terjadi pada musim hujan karena terganggunya resapan dan sirkulasi air serta disfungsi sungai. Sedangkan kebakaran sering terjadi pada musim panas di kawasan kumuh dengan penataan bangunan yang padat dan memiliki fasilitas yang kurang. Kebakaran pada di kawasan permukiman padat dan kumuh telah terjadi di daerah RW 1 Kelurahan Cipinang Besar Utara Jatinegara Jakarta Timur, yang lebih dikenal dengan permukiman Pasar Gembrong atau Kampung Gembrong.

Kebakaran yang terjadi di permukiman Pasar Gembrong ini sulit teratasi karena beberapa kendala seperti; sirkulasi jalan yang kecil dan macet, perumahan yang berdempetan dengan sirkulasi lingkungan yang berliku-liku mempersulit pemadam kebakaran mencapai rumah-rumah yang terbakar. Selain itu permukiman ini tidak mempunyai cadangan air yang baik, sungai Ciliwung di sekitar Kampung Gembrong keadaannya dangkal dan penuh sampah.

Dalam konteks bencana yang menyerang suatu kawasan, maka dilakukan proses penataan kembali pasca bencana

berupa *re-development* yang berarti menata kawasan kembali. Tujuan *re-development* adalah menciptakan suatu kawasan dengan kualitas yang lebih baik lagi. *Re-development* meliputi tiga jenis program yaitu *revitalisasi*, *infill* dan *renewal*, yang pada intinya menata kembali kawasan yang sudah eksis dengan langkah perbaikan. Revitalisasi: berarti menghidupkan kembali kawasan dengan menyuntikkan fungsi/ kegiatan baru serta memperbaiki sarana/ prasarana. Pengisian (Infill): adalah peningkatan intensitas lahan/ bangunan dan memberikan gairah baru dalam suatu kawasan. Peremajaan (*renewal*): merupakan pengembangan yang bersifat memperbaharui suatu kawasan secara total.

Selain penataan kembali fisik lingkungan, dalam permukiman paska bencana yang perlu dibangun adalah kesadaran komunitas warga agar turut berperan serta dalam upaya membangun lingkungannya, karena dengan meningkatnya kualitas lingkungan akan mengurangi kemungkinan terjadinya bencana sebagai upaya mitigasi bencana. Community Based Development merupakan upaya untuk membangun lingkungan suatu komunitas dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan serta memberdayakan masyarakat secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri dengan merencanakan ruang yang dapat mengakomodir kepentingan mereka agar dapat meningkatkan kualitas lingkungannya

Prioritas

Konsep bedah kawasan atau revitalisasi kawasan kumuh merupakan bagian dari program tahunan Bedah Rumah Baznas (Bazis) DKI, dengan harapan masyarakat memperoleh rumah dan kawasan yang lebih layak huni, yaitu kampung yang sehat, kampung berdaya, kampung beriman, dan kampung tangguh bencana. Konsep rumah dibangun dengan bentuk kampung vertical dan difasilitasi dengan jalur evakuasi (evacuation route) untuk kesiapan merespon bencana. Program bedah kawasan atau revitalisasi kampung kumuh ini merupakan respon atas problem masyarakat DKI, yang ingin menghadirkan kampung yang memiliki ruang sosial, ruang ekonomi, dan tangguh terhadap bencana. Merujuk pada konsep, kampung tangguh bencana setidaknya menyediakan tiga ruang atau zona bagi masyarakat, yaitu zona pendidikan, zona bermain dan zona ekonomi. Di setiap sudut jalan kampung, juga akan dihiasi dengan street art untuk memperindah kampung. Selain itu juga disediakan green corridor dengan memanfaatkan gang-gang rumah menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Di kawasan kampung akan diterapkan zero waste melalui penyediaan pembuangan sampah pengelolaan sampah komunal. Selain itu juga dibangun sumur serapan di dalam kawasan.

Proses revitalisasi kawasan Kampung Gembrong pasca musibah kebakaran mencakup pemulihan rancangan struktur bangunan, tata ruang, sosial, ekonomi, serta kelembagaan; dengan pendekatan konsep '*Build Back Better*' yang bertujuan

untuk menghindari terjadinya kondisi kerentanan semula (yang lama) dan menjadikan proses pemulihan sebagai transformasi menuju arah yang lebih baik, mencakup transformasi sosial, ekonomi dan lingkungan.

Revitalisasi kawasan Kampung Gembrong mengedepankan konsep lingkungan yang sehat dan asri dengan bangunan sesuai kontur kawasan yang mengusung konsep *'Water Front City'*, yakni menjadikan sungai sebagai orientasi depan atau halaman depan rumah.

Revitalisasi permukiman Kampung Gembrong dilakukan dengan pembangunan rumah permanen layak huni dan sehat, penataan fisik bangunan bernuansa warna-warni yang dihiasi mural bertema edukatif menggambarkan suasana Kota Jakarta, sistem drainase dengan konsep *Zero Run Off*, sarana prasarana dan aspek sanitasi yang memenuhi standard, serta mitigasi kebencanaan dengan jalur evakuasi dan pencegahan kebakaran.

Outcome

Short-term Outcome:

- Dengan menempati rumah permanen layak huni yang sehat di kawasan Kampung Gembira Gembrong maka kehidupan warga menjadi lebih sehat baik secara fisik maupun mental psikologis.
- Meningkatnya pengetahuan warga Kampung Gembrong tentang pentingnya upaya menjaga kualitas lingkungan

dan hunian yang sehat dengan menerapkan pola hidup sehat, menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, serta mekanisme mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.

Intermediate Outcome:

- Warga Kampung Gembrong memiliki perilaku hidup sehat, bersih, tertib dan disiplin, serta menjadi masyarakat yang sadar pentingnya tinggal di permukiman yang tertata selaras dengan lingkungan yang lebih luas dan tanggap bencana.
- Tumbuhnya kesadaran dan rasa tanggung jawab dari warga Kampung Gembrong untuk membangun lingkungan sosial yang baik, lingkungan yang nyaman dan asri, lingkungan yang tidak tercemar dengan menjaga sungai sebagai salah satu sumber dan ekosistem lingkungan hidup mereka, serta untuk mencegah berulangnya kasus kebakaran.

Longterm Outcome:

- Meningkatnya kesejahteraan warga Kampung Gembrong pasca bencana dengan tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, serta tegaknya kedisiplinan dan ketertiban

Input

- Dana pembangunan rumah hunian dari BAZNAS BAZIS DKI sebesar 7.8 M

- Dana APBD Pemda DKI Jakarta; Dana CSR Perusahaan
- Master Plan Revitalisasi Kawasan Kawasan Kampung Gembira Gembrong
- Infrastruktur Keras antara lain berupa Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Material Aspal Jalan, Bio Septic Tank dan Water Tank, Penutup Selokan dan Sumur Resapan, Router WiFi, Peralatan Taman dan Tanaman Hias, Peralatan Pembuatan Mural, Tempat Sampah.
- Infrastruktur Lunak berupa Modul Pelatihan (Tanggap Bencana, Pola Hidup dan Lingkungan Sehat, Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan) dan Modul Penyuluhan (Keagamaan dan Kampung Bebas Narkoba)
- Sumberdaya Manusia : Para Pekerja Terampil dan Tim Tenaga Ahli

Aktivitas

1) Persiapan:

- Sosialisasi program
- Menggalang komitmen para pemangku kepentingan

2) Perencanaan

- Melakukan pemetaan dan pengukuran di lokasi kebakaran dengan lokasi dan besaran/ luas rumah sesuai dengan lokasi dan besaran/ luas rumah awal sebelum kebakaran. Perancangan tapak yang mendetail.

- Penyusunan RPLP (Rencana Penataan Lingkungan Permukiman) yang berisi tentang rencana pola ruang, rencana pengembangan wilayah, rencana penanganan pemukiman kumuh, dan rencana penanganan ekonomi sosial.
- Rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) dengan Desain Kawasan Tanggap Bencana Kebakaran; yang memuat rencana peruntukan lahan mikro, perpetakan, rencana tapak, sistem pergerakan, prasarana dan sarana lingkungan, aksesibilitas lingkungan, dan rencana wujud visual bangunan hunian dengan warna cat warna warni dihiasi mural edukatif, serta material bangunan.
- Penyusunan Detail Engineering Design (DED)
- Penetapan Zona Sempadan Sungai adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai. Garis sempadan ini bertujuan untuk pertimbangan keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keserasian dengan lingkungan. Kondisi bangunan yang ada di Kampung Gembrong banyak yang tidak memperhatikan sempadan sungai dan saluran drainase, maka dilakukan penataan bangunan yang berada di pinggir sungai dengan memperhatikan garis sempadan sungai. Upaya penataan bangunan

pinggiran sungai dilakukan dengan memundurkan bangunan (setback) dari pinggir sungai dan membuat dinding penahan untuk mengurangi terjadinya erosi yang akan mendangkalkan aliran sungai.

3) Pelaksanaan

a. Rekonstruksi Fisik

- Pelaksanaan rekonstruksi fisik dengan prioritas penanganan atas tujuh aspek kekumuhan yaitu bangunan untuk hunian, jalan lingkungan, drainase, air bersih, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, pengamanan kebakaran, serta adanya ruang terbuka publik.
- Proses pekerjaan pembangunan rumah tinggal dengan desain bangunan layak huni berinstalasi listrik aman dan standar; memenuhi kriteria teknis rumah sehat yakni pencahayaan alami, sirkulasi udara, dan ada jarak antar bangunan rumah. Pekerjaan pembangunan rumah tinggal terdiri dari pekerjaan arsitektur dan pekerjaan struktur.
- Proses pekerjaan pembangunan infrastruktur : pembangunan sarana sanitasi, penyediaan air bersih dan air minum layak dengan pemasangan jaringan PAM, saluran drainase, pembangunan jalan lingkungan, pembangunan sarana prasarana kebakaran, dan infrastruktur pendukung lainnya.

- » penggalian dan pemasangan sumur resapan; penggalian dan pemasangan Bio Septic Tank dan Water Tank; penutupan Selokan atau Buis Beton; pemasangan router WiFi; penataan taman dan tanaman; pengaplikasian mural; penempatan tempat sampah
- Proses pembangunan sarana kesehatan berupa bangunan Posyandu; sarana pendidikan berupa bangunan PAUD; dan sarana peribadatan berupa mushola/ masjid
- Penataan orientasi bangunan dari yang tadinya membelakangi sungai Ciliwung menjadi pemukiman yang menghadap ke sungai Ciliwung. Menjadikan sungai Ciliwung sebagai halaman depan atau yang disebut dengan konsep Water Front City.
 - » melakukan pergeseran bangunan yang berada di pinggir sungai dan merelokasi hunian warga terdampak kebakaran yang berada di Garis Sempadan Sungai (GSS) selebar 5 meter dari sungai karena area GSS tidak direkomendasikan untuk dibangun hunian. Jumlah Rumah yang direlokasi adalah 19 unit rumah.

b. Rekonstruksi Non Fisik

Rekonstruksi non fisik untuk memulihkan kegiatan pelayanan publik, kegiatan sosial ekonomi serta kehidupan masyarakat (sektor kesehatan, pendidikan, sosial ekonomi, peribadatan dan kondisi mental masyarakat yang terganggu oleh bencana), kembali ke kondisi semula atau bahkan lebih baik dari kondisi sebelumnya.

- Pelayanan kesehatan kesehatan dasar dengan Posyandu; Pelayanan pendidikan anak usia dini (PAUD); Pelayanan peribadatan dan program kemakmuran masjid.
- Sosialisasi, pelatihan dan penyuluhan terkait tema Pola Hidup Sehat dan Membangun Lingkungan Sehat; Ekonomi Kreatif, Ketrampilan Usaha, Kewirausahaan dan Manajemen Usaha; Penyuluhan Keagamaan, Bahaya Miras dan Narkoba; Pelatihan tanggap darurat kebencanaan khususnya kebakaran dan banjir.

4) Keberlanjutan/ Pengelolaan

Upaya keberlanjutan dilakukan melalui: penguatan kelembagaan untuk operasional dan pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun; penerapan dan penegakan aturan bersama untuk pencegahan kumuh; penguatan kapasitas dan kolaborasi; monitoring proses dan progress kegiatan, serta capaian indicator kinerja.

Output

1. Terbangunnya kualitas kawasan Kampung Gembrong yang dapat mendukung kelangsungan hiduparganya serta mendukung produktivitas sosial budaya dan ekonomi dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan fisik :
 - rumah tinggal layak huni yang berinstalasi listrik aman dan standar, sehat dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik, serta ada jarak antar bangunan rumah
 - tumbuhnya zona ekonomi dengan pengembalian dan penguatan karakter Kampung Gembrong yang terkenal sebagai pusat mainan anak yang terjangkau dan *up to date*.
 - tumbuhnya zona sosial dengan keberadaan ruang terbuka publik yang ramah untuk semua rentang usia, yang juga sekaligus sebagai zona bermain anak-anak.
 - Kampung Gembrong menjadi kampung nyaman dan asri yang bercorak warna warni dan bernuansa gembira dengan hiasan mural edukatif; dan juga tersedianya jalur hijau dengan titik vegetasi berupa green wall dan tanaman menjalar.
2. Terbangunnya sarana dan prasarana permukiman yang sesuai dengan standard
 - terbangunnya sistem drainase dengan konsep zero run off; terdapat 16 titik rencana sumur resapan yang berada di bawah akses jalan.

- terbangunnya sistem sanitasi lingkungan dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal, tersedianya tempat sampah pada setiap blok hunian, tersedianya sarana MCK pada setiap rumah dengan bio septic tank dan water wank, serta sarana air bersih dengan aliran air PAM.
 - tersedianya Router WiFi sehingga memudahkan warga dalam akses komunikasi dan sarana belajar digital bagi pelajar.
 - terbangunnya Posyandu dengan program layanan kesehatan dasar
 - terbangunnya fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan program pembelajarannya
 - terbangunnya mushola dengan konsep desain terbuka sehingga menjadi ruang sosial yang serbaguna atau pusat bagi kegiatan bermasyarakat warga Kampung Gembira Gembrong.
3. Terbangunnya kawasan dengan konsep Water Front City
- bangunan tertata secara vertical dengan orientasi menghadap ke sungai.
 - tertatanya garis sempadan sungai selebar 5 meter untuk pertimbangan keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keserasian dengan lingkungan.

4. Terbangunnya Kampung Gembrong yang tangguh bencana
 - tersedianya lampu darurat sebagai penerangan saat keadaan darurat dan tersedianya APAR di setiap RT untuk menanggulangi kebakaran di awal kejadian agar tidak mudah merembet
 - tersedianya jalur evakuasi untuk kesiapan respon bencana dan titik kumpul warga pada saat keadaan darurat
 - terbangunnya akses jalan minimal lebar 1,2 meter dengan menggunakan material aspal, dengan petunjuk jalan atau batas antar RT yang menggunakan warna.
5. Terlaksananya pemulihan pasca bencana kebakaran dengan pendekatan “Built Back Better” pada rekonstruksi fisik maupun non fisik dan revitalisasi kawasan kumuh, sehingga menghasilkan bangunan hunian yang lebih baik, permukiman dengan sarana prasarana yang memenuhi standard, serta kawasan yang jauh lebih nyaman, sehat dan lebih tangguh bencana dibandingkan dengan sebelum terjadinya musibah kebakaran.

Faktor Eksternal

- Dukungan regulasi pada program revitalisasi kawasan kumuh pasca bencana: Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019 terkait

peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan; UU No.24 Tahun 2007, PP No. 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18 tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan; Kebijakan dan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dari Dirjen Cipta Karya Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.

- Adanya kebijakan dan strategi Pemda DKI Jakarta dalam revitalisasi kawasan kumuh Kampung Gembrong pasca bencana kebakaran, yang ditindaklanjuti dengan komitmen dan konsistensi dalam pelaksanaan programnya.
- Skema kerjasama pemerintah, korporasi, BAZNAS BAZIS DKI dan masyarakat (*public private community partnership*) sebagai sumber pembiayaan dalam program revitalisasi kawasan Kampung Gembrong pasca bencana kebakaran.
- Kepemimpinan Gubernur DKI Anies Baswedan dengan kebijakannya “Hilangkan kumuhnya, bukan kampungnya”.
- Pelibatan multistakeholders (pemerintah, korporasi, BAZNAS BAZIS DKI, masyarakat sipil) melalui *Collaborative Implementation Program* (CIP), mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat kelurahan; mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan hingga tahap implemementasi

kegiatan, yang berhasil mewujudkan revitalisasi kawasan Kampung Gembira Gembrong.

Asumsi

- Legalitas lokasi Kampung Gembrong yang secara hukum memang bisa dibangun kembali sebagai kawasan permukiman.
- Desain revitalisasi Kampung Gembrong telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 pada Perda Prov DKI No.1 Tahun 2012
- Prinsip-prinsip kolaborasi yang terjalin dengan baik, yakni partisipasi, akseptasi kehadiran setiap pihak terkait, komunikasi, saling percaya, dan saling berbagi; yang mendasari keberhasilan program revitalisasi permukiman kumuh Kampung Gembrong
- Kesadaran dan partisipasi penuh warga Kampung Gembrong untuk membangun kehidupan yang lebih baik, lebih sehat, lebih tertib dan disiplin, serta tangguh.
- Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam program revitalisasi kawasan kumuh Kampung Gembrong, dan perbaikan ekosistem
- Transparansi dan akuntabilitas publik pada proses rekonstruksi pasca bencana kebakaran dan revitalisasi kawasan kumuh Kampung Gembrong

terbakar. Tak kurang ada 4 RT terdampak, yakni RT 02, RT 04, RT 05 dan RT 06. Diskusi tadi terjadi di ruang Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan dan berjalan seru karena team internal BAZNAS (BAZIS) yang telah melakukan *assessment*, beradu ide dengan team vendor yang juga telah selesai melakukan survei.

Alhamdulillah kemudian disepakati bahwa konsep kampung akan mempertahankan batas-batas tanah yang ada. Namun demikian, mereka akan melakukan pelebaran ruang gang menjadi minimal 1,2 meter sebagai jalan evakuasi dan pertolongan pertama pada waktu bencana. Lebar jalan tersebut juga cukup untuk menanam *septic tank* bio yang memiliki dimensi yang membutuhkan lebar tersebut.

Pada diskusi tersebut kami melihat bahwa salah satu kerentanan kebakaran adalah ketidakmampuan mengakses sumber air yang berlimpah di sungai di belakang kampung. Itu karena semua akses yang tertutup dengan bangunan rumah. Padahal ada ketentuan mengenai GSS (Garis Sempadan Sungai) di mana selebar 6 meter sepanjang sungai tidak boleh dibangun dan harus menjadi jalan inspeksi.

Program revitalisasi kampung-kampung yang terkena bencana, sebenarnya telah kami laksanakan sejak tahun

2020. Banyak kampung telah selesai dikerjakan dengan mengusung konsep “Kampung Regeneration”—mengikuti konsep “City Regeneration” yang telah ditetapkan sebagai program pemerintah provinsi.

Pada program ini kami menterjemahkannya dengan apa yang secara ringkas sering disampaikan Pak Gubernur “Singkirkan kumuhnya, hidupan kampungnya.” Sehingga kami memulai dengan mengidentifikasi apa *vulnerability* dari kampung tersebut yang dapat kami perbaiki sehingga menjadi kampung yang kuat, tangguh dan hidup. Kami juga mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki dan bisa kita optimalkan.

Pada konsep “Kampung Regeneration” itu pula kami membuat standar “kampung sehat” yang meliputi sehat ruhani, sehat jasmani, sehat intelektual, sehat finansial dan sehat lingkungan serta sosialnya. Konsep lima sehat ini kami bangun dari pemahaman mengenai lima maksud diturunkan agama atau *maqasidus syar’iyah*.

Karena program telah ditetapkan, maka begitu terjadi bencana kami segera melakukan *assessment*, terutama berkaitan dengan legalitas tanah warga. Ketika Pak Gubernur melakukan peninjauan di akhir April 2022, kami telah menghitung sumber dana dan sumber daya yang kami miliki. Ketika peninjauan kedua awal Mei 2022, kami

telah selesai membangun konsep dan mempresentasikan di hadapan *stakeholders*, terutama kepada Walikota Jakarta Timur Bapak Muhammad Anwar.

Pertemuan di ruang Pola Lantai 2 Gedung Balaikota Jakarta Timur ini berjalan penuh semangat. SKPD terkait menunjukkan antusias berkolaborasi. Pak Wali sendiri turun tangan untuk memimpin rapat tanggal 28 Juni 2022 yang kemudian menyepakati waktu pelaksanaan kerja bakti seluruh eksponen masyarakat, aparat kelurahan, PPSU, Satpol PP, BPBD, juga dari BAZNAS (BAZIS). Tak ketinggalan relawan tanggap bencana BBTB (BAZNAS BAZIS Tanggap Bencana) juga relawan dari mahasiswa MDJ (Masa Depan Jakarta), yang merupakan mahasiswa penerima beasiswa BAZIS, terutama yang berasal dari wilayah Jakarta Timur.

Pada rapat tersebut, kami juga menyepakati pelatihan untuk membangun *soft infrastructure* di masyarakat terdampak saat mereka masih menempati hunian sementara. Tujuannya adalah agar pola pikir dan pola hidup masyarakat dapat berubah ketika mereka menempati kampung yang baru.

Kami menyepakati untuk 138 rumah akan dibangun oleh BAZIS dengan dana kebencanaan. Sedangkan untuk infrastruktur yang lain seperti selokan, listrik, air, jalan

akan dilakukan oleh dan dengan dana SKPD masing-masing.

Pagi itu cuaca cerah secerah warna kaos yang dipakai para peserta apel kerja bakti yang dipimpin oleh Gubernur Anies Baswedan. Beliau mencanangkan nama baru yang sesuai dengan semangat kampung tersebut menjadi sentra mainan anak-anak. Maka tanggal 1 Juli 2022 menjadi tanggal yang akan diingat oleh masyarakat karena kini kampung tersebut diberi nama Kampung Gembira Gembrong. Kampung ini juga mengusung konsep baru, *Waterfront City*, yakni kampung yang akan menjadikan sungai sebagai halamannya, sebagai ruang bermain, sebagai sahabat yang akan dirawat dan akan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Antusias masyarakat memang dari awal telah kami lihat. Kemauan untuk berubah sangat nampak pada pimpinan masyarakatnya, terutama pimpinan RW dan RT. Kepemimpinan merekalah kunci sukses sesungguhnya dari program ini.

Dengan pendekatan yang mereka lakukan, beberapa hal yang sulit kami lakukan, seperti mengatur ulang rumah-rumah yang dibangun dan penyediaan ruang public dan sarana umum, menjadi mudah. Bahkan masyarakat rela menghibahkan dan mewakafkan sebagian

tanah mereka untuk berbagai fasilitas publik seperti taman, PAUD, musholla dan Posyandu yang dibangun di kawasan tersebut.

Dari wajah cerah Kampung Gembira Gembrong ini kita mendapatkan pesan kesatu-paduan yang kuat, kerelaan dan kebersamaan yang sangat tinggi yang semoga akan menjadi pondasi kemajuan kampung tersebut di masa yang akan datang.



BAB VI

PENUTUP

Bergerak Maju dengan Inovasi

Ada yang menganggap, lembaga yang sudah terlanjur besar, mapan dan “tua” tidak akan mampu bersaing di era kekinian. Mereka akan tergilas oleh zaman karena tak mampu beradaptasi sesuai perkembangan. Beberapa korporasi besar seperti Blackberry (RIM), Nokia, dan Kodak dijadikan contoh dan momok yang menakutkan.

Memang, banyak institusi besar yang kita anggap mapan berguguran di tengah jalan. Mereka terlempar dari persaingan, dan tak mampu membendung perubahan. Mereka terjebak pada kebesaran dan privilese yang mereka dapatkan, sehingga lupa lingkungan sekitar mereka terus bergerak maju dan berinovasi.

Untuk itu, fenomena yang melanda institusi “raksasa” mesti kita antisipasi. Kebesaran lembaga, banyaknya sumber daya, dan privilese yang dimiliki tidak boleh melenakan kita sehingga membuat kita tertidur pulas, dan akhirnya mati tergilas.

Pimpinan BAZNAS (BAZIS) dan semua tim yang berada di institusi ini harus membuang jauh-jauh rasa tenang karena berada di “zona nyaman”. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ke mana angin akan membawa. Terbang tinggi atau menghempaskan ke tanah.

Maka, budaya inovasi harus selalu tumbuh pada semua lini.

Improvisasi harus selalu dilakukan pada setiap aspek lembaga, manajemen, program pendistribusian dan pendayagunaan, maupun penghimpunan. Perjalanan panjang yang dilalui BAZNAS (BAZIS) selama puluhan tahun membuktikan, bahwa tidak ada rumus baku dalam mengatasi masalah-masalah sosial ekonomi, termasuk kemiskinan di kota ini. Untuk itu, butuh inovasi, improvisasi dan adaptasi sesuai dengan perkembangan zaman.

Sepanjang lembaga ini berdiri, ada begitu banyak strategi dan metode yang dipakai dalam membantu masyarakat kecil dan lemah. Ada yang gagal, namun tak sedikit yang menuai hasil. Inovasi dan improvisasi tak berarti mengambil semua hal baru dan membuang hal lama. Kita harus menyeimbangkan, antara menjaga tradisi dan manajemen yang baik dan masih relevan, dengan inovasi dan kebaruan yang membuat lembaga ini terus bergerak maju. Semua itu demi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi umat dan masyarakat.

Inovasi juga bukan sekedar perwajahan yang menarik dan membuatnya viral. Inovasi program harus ditopang kajian dan analisis yang mendalam, sehingga keberhasilannya dapat diukur. Karena setiap rupiah yang dibelanjakan adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban.

Tugas utama organisasi ini bukan sekedar membagi-bagikan uang zakat dan derma dari para donatur. Setelah itu kita pun berlepas diri, apakah mustahik dapat terangkat derajatnya, dan

teratasi masalahnya. Kalau sekedar membagikan, tak perlu kita repot dan bersusah payah membuat berbagai program. Misi utama kita adalah menjadikan berdaya, membuat mereka bisa berjalan tegak karena dukungan dan topangan yang kita berikan.

Tentu saja, dalam setiap inovasi dan improvisasi program yang kita lakukan, tidak semua sempurna dan berjalan sesuai harapan. Ada saja kendala dan batu sandungan. Namun, semua itu tak boleh menjadikan kita patah arang. Karena ada banyak orang di luar sana yang menanti ide, gagasan, dan terobosan kita dalam memberikan pelayanan.

Kesalahan dan kekurangan hendaknya menjadikan evaluasi yang berharga agar ke depannya kita menjadi lebih baik dan melayani dan memberdayakan umat. Seraya memohon ampun kepada Allah Yang Maha pengampun untuk semua kesalahan dan kelalaian kita.

Wallahu a'lam bisshowab.

Buku ini hadir sebagai bentuk komitmen kami dalam meng-optimalkan pemanfaatan dana Zakat, Infak, dan Sedekah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan di wilayah DKI Jakarta.

Buku ini menggambarkan perjalanan transformasi BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta dalam mengembangkan program pendistribusian dan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada kolaborasi dengan berbagai pihak, serta mengembangkan inovasi program yang lebih berdaya guna dan memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat. Buku ini juga membahas potensi dan masalah yang ada di Jakarta, serta program-program pemerintah dan LSM yang ada di Jakarta dalam menangani masalah-masalah tersebut.



"Congratz! It's a well written and eye opener book. Buku ini menceritakan kisah perjuangan BAZNAS (basis) DKI Jakarta yang terlibat dalam banyak program besar menjamah mereka yang kurang beruntung dalam kehidupan. Dikemas dalam gaya bahasa yang renyah dan mengalir membawa pembaca hanyut seakan hadir dalam proses transformasi dan kolaborasi yang dilakukan. Membawa pesan yang sangat jelas untuk terus bergerak, tidak pernah menyerah, dan jeli melihat peluang. Very inspiring !"

Ir. Adiwarman Azwar Karim, SE., MBA., MAEP.



BAZNAS BAZIS
Provinsi DKI Jakarta